

KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN PARIWISATA DI DAERAH OTONOM BARU

**STRATEGI PENATAKELOLAAN PARIWISATA KABUPATEN PESAWARAN
MENUJU INDUSTRI PARIWISATA MANDIRI BERBASIS KEARIFAN LOKAL
“ONE VILLAGE ONE DESTINATION”**

*(Suatu Kajian Manajemen Pembangunan
Bidang Kepariwisata)*

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN PARIWISATA DI DAERAH OTONOM BARU

**STRATEGI PENATAKELOLAAN PARIWISATA KABUPATEN PESAWARAN
MENUJU INDUSTRI PARIWISATA MANDIRI BERBASIS KEARIFAN LOKAL
“ONE VILLAGE ONE DESTINATION”**

*(Suatu Kajian Manajemen Pembangunan
Bidang Kepariwisata)*

Dra. DIAN KAGUNGAN, MH



PUSAKA MEDIA

**Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN PARIWISATA
DI DAERAH OTONOM BARU**

**STRATEGI PENATAKELOLAAN PARIWISATA KABUPATEN PESAWARAN MENUJU
INDUSTRI PARIWISATA MANDIRI BERBASIS KEARIFAN LOKAL
“ONE VILLAGE ONE DESTINATION”**

**(Suatu Kajian Manajemen Pembangunan
Bidang Kepariwisata)**

**Penulis:
Dra. DIAN KAGUNGAN, MH**

Layout
Pusaka Media Design

xvi+ 156 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, Agustus 2019

ISBN: 978-602-5947-81-0

Penerbit
Pusaka Media
Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082280035489
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Buku ajar KEBIJAKAN PENATA KELOLAAN PARIWISATA DI DAERAH OTONOM BARU ini disusun dalam rangka pengayaan materi kuliah **MANAJEMEN PEMBANGUNAN, khususnya Manajemen Pembangunan (bidang kepariwisataan)**, di mana penulis sebagai penanggungjawab dari matakuliah tersebut. Selain itu, di **susunnya buku ajar ini sebagai salah satu output/luaran dari Penelitian Terapan Lanjutan tahap 3 yang didanai oleh Direktorat Riset Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi TA 2019 ini.**

Struktur penulisan buku dimulai dari pendahuluan (standar kompetensi, indikator dan tujuan) penyajian materi, rangkuman, latihan, sumber rujukan dan *glossary*. Buku ajar ini melakukan pembagian topik ke dalam 3 lingkup pembahasan, yakni : lingkup pertama buku ini dimulai dengan mengangkat beberapa pemahaman dasar tentang konsep kebijakan, konsep pembangunan kepariwisataan. Lingkup ke dua pembahasan tentang teknologi informasi komunikasi dalam manajemen pembangunan daerah dan pentingnya menerapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah khususnya di bidang kepariwisataan

Lingkup ke tiga mengangkat pemahaman dasar kebijakan pengembangan pariwisata di Propinsi Lampung dan kebijakan tatakelola pariwisata di Kabupaten Pesawaran (strategi tatakelola pariwisata Kabupaten Pesawaran menuju industri pariwisata mandiri berbasis kearifan lokal.

Pada lingkup ke empat buku ajar ini **diperkaya** dengan hasil riset penulis yang dibiayai DRPM, Kemenristekdikti. Dengan kata lain buku ajar ini merupakan diseminasi hasil penelitian penulis dan tim. Pada riset tersebut, kami mencoba memberikan solusi menurut kaedah akademik terhadap masalah utama yang ditemukan untuk kemudian juga dimanfaatkan sebagai pintu masuk (*entry point*) bagi pengelolaan pembangunan kepariwisataan yang baik termasuk kemampuan melakukan **inovasi** dalam **strategi membangun industri pariwisata berbasis kearifan lokal** di Kabupaten Pesawaran

Sekali lagi, buku ajar ini senantiasa diperkaya baik dari segi materi yang dikutip dari berbagai literatur maupun fakta-fakta temuan riset dengan harapan mampu memberikan pengayaan pengetahuan pembaca tentang matakuliah Manajemen Pembangunan khususnya manajemen pembangunan kepariwisataan di daerah. Khalayak sasaran dari buku ajar ini adalah mahasiswa peserta matakuliah dan para pihak yang *concern* tentang manajemen pembangunan daerah khususnya pembnagunan kepariwisataan. *Buku ajar ini dipergunakan* di lingkup jurusan Administrasi Negara Fisip Unila khususnya, yang semata mata untuk pengayaan pengetahuan mahasiswa; diharapkan khasanah pengetahuan mahasiswa semakin meningkat dan dengan demikian prestasi akademik mahasiswa akan meningkat pula.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan buku ajar ini. Secara khusus ucapan terimakasih patut kami sampaikan kepada yang Terhormat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, cq Direktur Riset Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Rektor Universitas Lampung, Ketua LPPM Unila, Ketua LP3M Universitas Lampung beserta jajaran, Dekan Fisip Unila, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Ketua jurusan Administrasi Negara Fisip, rekan-rekan dosen Fisip Unila, para nara sumber, mahasiswaku dan semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya buku ajar ini.

Akhir kata, semoga buku ajar ini ini dapat bermanfaat bagi dunia *saintifik* maupun pembangunan.

Bandar Lampung, Agustus 2019

Salam hormat

Dra. Dian Kagungan, M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Kompetensi Dasar	1
Indikator.....	1
Tujuan Pembelajaran	1
B. Penyajian	2
1.1 Konsep Kebijakan Pembangunan Kepariwisata	3
1.2 <i>Tourism Law and Hospitality Law</i>	6
1.3 Pariwisata Kabupaten Pesawaran Sebagai Obyek Studi, Sistem Dan Dampak Sosial Budaya.....	11
1.4 Wisatawan dan Pariwisata	12
1.5 Dampak Sosial-Budaya Pariwisata.....	16
1.6 Dampak Sosial Ekonomi	17
1.7 Dampak Sosial Budaya.....	17
1.8 Gambaran Umum Isi Buku	20
Pustaka Rujukan	20

BAB 2

TINJAUAN KEBIJAKAN

A.	Kompetensi Dasar	21
	Indikator	21
	Tujuan Pembelajaran	21
B.	Penyajian	22
2.1	Tinjauan Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Riparnas)	22
2.1.1	Visi dan Misi Pengembangan Kepariwisata Nasional	22
2.1.2	Tujuan Pembangunan Kepariwisata Nasional	23
2.1.3	Arah Pengembangan Kepariwisata Nasional	23
2.2	Tinjauan Kebijakan Umum Kepariwisata Nasional	25
3.2.1.	Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional	25
3.2.2.	Kebijakan Pemasaran	27
3.2.2.1.	Kebijakan Pengembangan Produk	27
3.2.2.2.	Kebijakan Promosi	28
3.2.2.3.	Kebijakan Penetapan Harga	29
3.2.3.	Kebijakan Kelembagaan	29
3.2.4.	Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30
3.2.5.	Kebijakan Investasi	30
3.2.6.	Kebijakan Pengelolaan Lingkungan	31
2.3.	Tinjauan Kebijakan Pariwisata Propinsi Lampung	31
3.3.1.	Misi Pengembangan Pariwisata Lampung	32
3.3.2.	Sasaran Umum Pariwisata Propinsi Lampung	32
3.3.3.	Strategi Pariwisata Propinsi Lampung	33
3.3.4.	Kebijakan Pariwisata Propinsi Lampung	33
3.4.	Tinjauan Posisi Kabupaten Pesawaran Dalam RIPP Propinsi Lampung	34
3.5.	Tinjauan Kebijakan Pariwisata Kabupaten Pesawaran	34

Rangkuman	37
Latihan Soal	38
Pustaka Rujukan.....	39
Glossary.....	39

BAB 3

KERANGKA DASAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

A. Kompetensi Dasar	40
Indikator	40
Tujuan Pembelajaran	40
B. Penyajian	41
3.1 Model Pengembangan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat	42
3.2. Konsep pemberdayaan masyarakat.....	46
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	46
3.3. Proses Pemberdayaan Masyarakat	47
3.4. Pola pemberdayaan masyarakat.....	49
3.5. Isue-Isue Strategis Dalam Pengembangan Pariwisata Lampung.....	51
a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan pariwisata antar pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>)	51
b. Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung yang ramah lingkungan.....	52
c. Pariwisata sebagai alat mencapai pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung	52
d. Aspek sosial ekonomi dari pengembangan pariwisata ProvinsiLampung.....	53
e. Pembentukan jati diri masyarakat Lampung.....	53
f. Peningkatan kualitas produk pariwisata	53
Rangkuman	53
Latihan Soal	54
Pustaka Rujukan.....	55
Glossary	55

BAB 4

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Kompetensi Dasar	56
Indikator.....	56
Tujuan Pembelajaran.....	56
B. Penyajian.....	56
1. Pendahuluan	56
2. Definisi Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	63
C. Rangkuman.....	63
D. Latihan Soal.....	64
E. Pustaka Rujukan	64

BAB 5

KONSEP PENGEMBANGAN PARIWISATA LAMPUNG

A. Kompetensi Dasar	65
Indikator.....	65
Tujuan Pembelajaran	65
B. Penyajian	66
5.1 Konsep Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung.....	66
1. Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	66
2. Konsep Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....	66
3. Konsep Keterkaitan Antar Sektor Dalam Pengembangan Pariwisata	66
4. Konsep Keterkaitan Pariwisata, Perdagangan dan Investasi	66
5. Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan.....	66
6. Konsep Keterkaitan Koridor Jalur Wisata.....	66
5.2 Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Propinsi Lampung	66
5.3 Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung.....	66
a. Pengembangan Perwilayahan.....	66
b. Pengembangan Produk wisata	66

c. Pengembangan Pasar dan Pemasaran	66
d. Pengembangan Sumberdaya Manusia.....	66
e. Pengembangan Kelembagaan.....	66
5.4 Strategi Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung.....	66
Konsep pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung	
1. Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan.....	66
2. Konsep Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....	67
3. Konsep Keterkaitan Antar Sektor Dalam Pengembangan Pariwisata	68
4. Konsep Keterkaitan Pariwisata, Perdagangan dan Investasi	68
5. Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan.....	69
6. Konsep Keterkaitan Koridor Jalur Wisata.....	70
5.7 Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Propinsi Lampung	71
5.8 Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung.....	72
a. Pengembangan Perwilayahan.....	72
b. Pengembangan Produk Wisata	73
c. Pengembangan Pasar dan Pemasaran	74
d. Pengembangan Sumberdaya Manusia.....	75
e. Pengembangan Kelembagaan.....	76
5.9 Strategi Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung	76
Rangkuman	79
Latihan Soal	80
Pustaka Rujukan.....	80
Glossary	80

BAB 6

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROPINSI LAMPUNG

A. Kompetensi Dasar	81
Indikator	81
Tujuan Pembelajaran	81
B. Penyajian	82
6.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung	82
1. Visi dan Misi Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung Tahun 2012-2031	82
6.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata	82
6.3 Strategi Pengentasan Kemiskinan Desa Pesisir Melalui Optimasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal	83
Rangkuman	84
Latihan Soal	84
Pustaka Rujukan	85
Glossary	85

BAB 7

KEBIJAKAN TATAKELOLA PARIWISATA KABUPATEN PESAWARAN

A. Kompetensi Dasar	86
Indikator	86
Tujuan Pembelajaran	86
B. Penyajian	87
Latihan Soal	96
Pustaka Rujukan	96
Glossary	96

BAB 8	
PAYUNG HUKUM BERKAITAN KEBIJAKAN	
PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA SATU DESA	
SATU DESA WISATA DI KABUPATEN PESAWARAN.....	97

BAB 9	
PENGEMBANGAN DAERAH PENYANGGA WISATA	
9.1 Daerah Penyangga Wisata	100
a. Community Based Tourism.....	103
b. Strategi Pengembangan Pariwisata	105
c. Penentu Keberhasilan Pengembangan Daerah	
PenyanggaWisaata.....	114
Rangkuman	123
Latihan Soal	124
Pustaka rujukan.....	124
Glossary	125

BAB 10	
MANAJEMEN PEMBANGUNAN KABUPATEN PESAWARAN	
(INNOVATIVE GOVERNMENT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	
KABUPATEN PESAWARAN)	
A. Penyajian	126
10.1 <i>Innovative Government</i>	128
10.2 Strategi Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah	128
10.3 Studi Pendahuluan yang Telah Dilakukan dan Hasil	
yang telah Dicapai	129
10.4 Studi Awal Tentang Kabupaten Pesawaran Sebagai	
Daerah Otonom Baru dan Hasil yang Telah Dicapai.....	130
B. Pustaka Rujukan.....	131

BAB 11	
STRATEGI PENATAKELOLAAN PARIWISATA KABUPATEN PESAWARAN MENUJU INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL	
a. Daya tarik (attraction).....	132
b. Accessible	133
c. Amenittis.....	134
d. Ancillary (lembaga pengelolaan)	134
BAB 12	
PENUTUP	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138
TENTANG PENULIS	141
CURRICULUM VITAE PENULIS	142
INDEKS.....	155
GLOSSARIUM.....	156

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Objek Wisata Kecamatan Teluk Pandan.....	93
2. Jumlah Pengunjung Objek Wisata Kecamatan Teluk Pandan.....	94
3. Zona Kawasan Wisata Unggulan.....	97

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Kompetensi Dasar

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu memahami dasar manajemen pembangunan khususnya Manajemen Pembangunan bidang kepariwisataan

Indikator

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian/konsep tentang Manajemen Pembangunan Kepariwisata, *Tourism Law and Hospitality Law*, Arah dan Tujuan Pembangunan Kepariwisata Nasional, Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Riparnas), Kebijakan Pariwisata Kabupaten Pesawaran (Teluk Pandan) Sebagai Obyek Studi, Sistem dan Dampak Sosial Budaya Pariwisata, Wisatawan dan Pariwisata, Sistem Pariwisata, Dampak Sosial Ekonomi, serta Pentingnya Teknologi Informasi dalam pengembangan pariwisata

Tujuan Pembelajaran

Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada mahasiswa tentang dasar teoritik Manajemen pembangunan khususnya bidang kepariwisataan

B. Penyajian

Pendahuluan

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Hal ini terbukti dari besarnya animo wisatawan khususnya wisatawan manca negara untuk berkunjung ke Provinsi Lampung. Dalam lima tahun terakhir, kunjungan wisatawan mancanegara mengalami pertumbuhan sekitar tujuh kali lipat. Hal ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,17%. Angka tersebut meningkat lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar 5,16%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung ini membuat Provinsi Lampung menduduki peringkat keempat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi se-Sumatera. (<http://www.lampost.co/berita-kontribusi-pariwisata-terhadap-perekonomian-lampung.html> diakses pada 18 Januari 2019).

Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Lampung antara lain dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Pesawaran. Dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menegaskan bahwa Visi pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran adalah menjadi destinasi wisata unggulan dan berdaya saing tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi pariwisata yang besar untuk dikembangkan di Kabupaten Pesawaran antara lain mulai dari pantai, pegunungan, air terjun, pulau, serta perkebunan yang menarik untuk dikunjungi sebagai tujuan wisata. Selain itu,

Model pariwisata berbasis komunitas (*Community based tourism*) merupakan model aplikasi dari *community development*, Model ini menekankan bagaimana masyarakat lokal terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata mulai dari tahap awal pembangunan sampai dengan pengoperasian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Terdapat beberapa prinsip dari *Community Based Tourism*, yaitu : 1.mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam memulai setiap aspek pariwisata 2. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek pariwisata 3. Mengembangkan kebanggaan komunitas 4.mengembangkan kualitas hidup komunitas 5. Menjamin keberlanjutan lingkungan 6.Mempertahankan keunikan kharakter dan budaya lokal 7.Mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota kumunitas

1.1 Konsep Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Pedoman pembuatan dan implementasi kebijakan.

Dalam kehidupan di negara moderen saat ini,kegiatan pembangunan termasuk pembangunan kepariwisataan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah kebijakan yang baik pula.Kebijakan yang baik dapat diilustrasikan seperti seorang dIrigen yang mengatur permainan sebuah orkestra yang terdiri dari banyak pemainmusik dengan jenis alat musik yang berbeda-beda jenis,suara,dan wakyu memainkannya,sehingga menghasilkan sebuah lagu yang sangat indah.Dengan demikian setiap insan pariwisata,dan terlebih lagi para birokrat,baik dilingkunan Pemerintah maupun Pemrintahan daerah, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang baik dalam kepariwisataan.

Ditinjau dari aspek kebutuhan praktis,pembahasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan seringkali tidak terlalu diprhatikan.Orang yang mendengar istilah”kebijakan pembangunan kepariwisataan”pada umumnya secara otomatis akan memfokuskan perhatiannya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam penggolongan kepariwisataan.Namun demikian,beberapa teori terkait dengan konsep dimaksud perlu diungkapkan dalam tulisan ini karena membantu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan kepariwisataan.

Ketika kita berbicara mengenai masalah kebijakan pembangunan kepariwisataan, maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian istilah "kebijakan" dan "pembangunan". Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, istilah "kebijakan" didefinisikan sebagai:

"(1) kependaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tt pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan."

Sementara itu dalam Kamus Merriam-webster, istilah "policy" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "kebijakan", diartikan sebagai aturan atau ide secara resmi diakui sebagai pedoman untuk menentukan pelaksanaan aktivitas: "*an officially accepted set of rules or ideas about what should be done*". Dengan demikian istilah "policy" atau "kebijakan" (khususnya definisi nomor 2) pada prinsipnya adalah parameter yang dijadikan dasar atau pedoman untuk melaksanakan sebuah aktivitas. Perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah bahwa tidak dijelaskan secara tegas apakah "kebijakan" juga meliputi perturan perundang-undangan. Hal tersebut berbeda dengan istilah "policy" yang lebih jelas pengertiannya.

Definisi sederhana lainnya mengenai istilah tersebut adalah arah tindakan atau cara bertindak dipilih dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kondisi faktual, yang menentukan pengambilan keputusan dimasa kini dan masa depan: "*A definite course or method of action selected from among alternatives and in the light of given conditions to guide and determine present and future decisions*". Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, menurut Edgell dan Swanson (2013), pemahaman mengenai kebijakan dibidang kepariwisataan akan menjadi lebih mudah jika dimulai dari definisi Thomas Dye mengenai "kebijakan publik", yaitu tindakan apapun melakukan atau tidak melakukan yang dipilih oleh pemerintah: "*whatever government choose to do or not to do*".

Sementara itu, istilah “pembangunan” diartikan sebagai suatu proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa (Sasmojo, 2004 : 1), tentunya ke arah yang lebih baik. Jika kemudian dikaitkan dengan kedua istilah tersebut dan istilah “kebijakan publik”, maka “kebijakan pembangunan” akan memiliki pengertian sebagai *parameter yang secara resmi diakui yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman oleh Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi terwujudnya proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa ke arah yang lebih baik.*

Dalam bidang kepariwisataan, dikenal pula istilah dalam bahasa Inggris yaitu “*tourism policy*”. Menurut Goeldner dan Ritchie (2009:414), istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

“Tourism policy can be defined as a set of regulations, rules, guidelines, directives, and development/promotion objectives and strategies that provide a framework within which the collective and individual decisions directly affecting long-term tourism development and the daily activities within a destination are taken”.

Pendapat lain mengenai istilah ini diungkapkan pula oleh Paul S. Biederman (2008) didalam buku yang berjudul *Travel and Tourism: An Industry Primer*, yang menambahkan aspek sosial didalam kebijakan kepariwisataan:

“A tourism policy defines the direction or course of action that a particular country, region, locality, or an individual destination plans to take when developing or promoting tourism. The key principle for any tourism policy is that it should ensure that the nation (region or locality) would benefit to the maximum extent possible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of tourism policy is to improve the progress of the nation (region or locality) and the lives of its citizens.”

Kedua definisi tersebut diatas memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan *tourism policy* atau yang penulis terjemahkan sebagai “kebijakan dibidang kepariwisataan” adalah berbagai macam aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata yang menjadi pedoman bagi pengambilan

keputusan dalam jangka pendek dan panjang. Kebijakan ini harus memberikan jaminan bahwa tujuan utamanya adalah membuat masyarakat yang bersangkutan yang tinggal didestinasikan pariwisata memperoleh keuntungan optimal dari kontribusi kepariwisataan dibidang sosial dan ekonomi dalam bentuk kemajuan dan kualitas hidup. Jika dikaitkan dengan konsep pembangunan, maka berarti aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata tersebut harus mengarah kepada perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa.

Edgell dan Swanson (2013) berpendapat bahwa pada intinya kebijakan dibidang kepariwisataan adalah setiap tindakan pemerintah baik dibidang legislatif, administratif, maupun yudisial yang berpengaruh terhadap kepariwisataan. Termasuk didalamnya adalah aktivitas pemasaran, perencanaan dan keberlanjutan. Menurut mereka bentuk kebijakan tersebut adalah berbagai pedoman(aturan), prinsip dan prosedur, yang disusun secara etis dan sifatnya fokus terhadap suatu persoalan serta mewakili harapan suatu masyarakat (atau bangsa) dalam hubungannya dengan aspek perencanaan, pembangunan, produk, jasa, pemasaran dan aspek keberlanjutannya.

1.2 *Tourism Law and Hospitality Law*

Masyarakat awam mungkin bingung ketika kemudian istilah kebijakan dibidang kepariwisataan dihubungkan dengan hukum kepariwisataan, atau yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *tourism law* dan *hospitality law*. Istilah *tourism law* itu sendiri merujuk pada segala macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aktivitas perjalanan seseorang, termasuk dibidang angkutan udara, sistem lisensi, warisan budaya, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, persaingan usahadan sebagainya.

Sementara itu, *hospitality law* didefinisikan sebagai segala macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri yang terlibat dalam penyediaan makanan, fasilitas akomodasi, perjalanan dan hiburan (*entertainment*) bagi wisatawan. Dengan demikian, kedua istilah tersebut sebenarnya

dapat dikatakan memiliki pengertian yang hampir sama. Dalam hubungan dengan istilah kebijakan dibidang kepariwisataan, walaupun bukan merupakan persoalan yang signifikan, perlu dijelaskan sedikit mengenai perbedaan diantara keduanya. Hukum kepariwisataan sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan dibidang kepariwisataan (ESCAP, 2001).

Walaupun demikian, sebagian besar substansi kebijakan dibidang kepariwisataan dapat merupakan aturan hukum, sebagai mana fakta yang terjadi di AS: *“Robert James, founder of one of the largest hotel contract management companies in the United States once estimated that 60 to 70 percent of the decisions he made on a daily basis involved some type of legal dimension.”*

Oleh karena itu, masalah hukum menjadi elemen sangat penting dalam pembahasan mengenai kebijakan dibidang kepariwisataan. Salah satunya yang sangat umum terjadi dalam pemikiran para birokrat di Indonesia yang mengelola kepariwisataan adalah bahwa pembangunan kepariwisataan dianggap sama dengan “pemasaran pariwisata” dalam arti kegiatan pemasaran produk yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Paradigma tersebut menyertakan fungsi institusi pemerintahan dibidang kepariwisataan (*government institution*) dengan sebuah perusahaan jasa pariwisata (*tourism company*).

“Sound tourism policy goes well beyond the marketing and promotion objectives to consider and evaluate tourism’s comprehensive effect on the host community...policy should serve not properly applied, is a vehicle for a government to direct and stimulate the tourism industry, as for example through tax legislation and sponsoring tourism research...One conclusion to be drawn from this analysis is tourism is more than just marketing and tourism policy should reflect that.”

Sebagaimana diketahui, kepariwisataan tidak hanya berkaitan dengan fenomena orang yang melakukan perjalanan. Kepariwisata juga berdampak terhadap masalah-masalah seperti pencapaian tujuan sosial dan budaya, kebijakan luar negeri, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup dan perencanaan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan. Disamping itu

kepariwisataan bergantung kepada produk-produk dari sektor lain. Sebagai contoh, di banyak negara, produk ekspor utama dibidang pertanian, termasuk daun tembakau, hewan ternak hidup dan produk hasil hutan, merupakan bahan-bahan pendukung kepariwisataan:

"Tourism aset of dynamic and growing industries involves not just people traveling, but also planning and protecting the destinations and attractions to wich people travel...Tourism policy should aim to improve quality-of-life Of tehe local citizenry and any given destination. Good tourism policy will assist in that prcess...Tourismhas strong links to cultural and social pursuits,foreign policy initiatives,economic development,environmental goals,and sutainnabel painning...Tourism is also wide ranging in the sense that it demans products from other sectors of the economy. For eample,many economis "top argicultular exports inlcude leaf tobacco, live animals products,cotton,and foresty produts,that supply demand troughout the world. These products are also assistance goods esed by tourism."

Satu hal yang menarik yang perlu dipahami adalah bahwa kebijakan dan perencanaan kepariwisataan yang baik hanya dapat diwujudkan melalui aktivitas peelitian yang solid. Peneliti kepariwisataan dapat menjadi media diskusi hingga tuntas, pendekatan-pendekatan yang bersifat inovatif dan kreatif yang berbeda dari pendekatan konvensional para pembuat kebijakan dan pakar kepariwisataan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kebijakan dibidang kepariwisataan seharusnya bersifat fleksibel dan memiliki daya tahan yang kuat dalam rangka mendorong perkembangan produk wisata dan menghadapi ketidak setabilan situasi ditinggakat global:

"Tourism policymakers'to fashion polices and plans the future will depend upon solid research to understand better and accepet new concepts as they appear. Such research, conducted in a chaotic world, may hammer out innovation and creative approaches taht dffer traditional guideniles for policy once held by tourism managers and scholars. Thepolicies must be flexible and resilient enough to foster the development of new policy that is firmly in place can be rendered

useless whenever tragic events or new global disturbances erupt as has been the case in recent years.”

Agar kepariwisataan dapat berjalan berkelanjutan dimasa depan, sangat diperlukan keberadaan perencanaan dan kebijakan kepariwisataan yang efektif sejak saat ini. Para pembuat kebijakan, perencanaan dan pemangku kepentingan lainnya harus mampu mengidentifikasi kecenderungan yang berkembang dalam kepariwisataan dan secara terintegrasi melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlakukan untuk mewujudkan pertumbuhan yang setabil dan produk wisata yang berkualitas, yang menguntungkan bak wisatawan maupun penduduk setempat.

Untuk dapat membuat kebijakan yang tidak merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang, diperlakukan pemahaman mengenai dampak positif dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan kepariwisataan. Bila dampak negatif dimaksud dapat diketahui, diperbaiki dan dikelola secara memadai, kemudian dampak positifnya dibangun maka dapat ditunjukkan bukti bahwa kepariwisataan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan masyarakat. Kebijakan dibidang kepariwisataan harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak lagi bersifat konvensional, yaitu hanya dalam kaitannya dengan produk wisata (yaitu daya tarik wisata, aksesibilitas dan amenities). Isu ini harus dianggap meliputi segala aspek dibidang kebijakan publik yang terkait dengan kepariwisataan.

Sebagai contoh, pengelolaan sumber daya air pada umumnya menjadi bagian dari kepentingan wisatawan maupun penduduk lokal. Namun demikian, taman wisata tirta (*water park*), lapangan golf yang luas, dan infrastruktur kepariwisataan lainnya dapat mengkonsumsi sumber daya air dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu instansi lingkungan birokrasi yang mengelola sumber daya tersebut akan mempertimbangkan kepentingan kedua pihak terkait. Kebijakan yang sifatnya terintegrasi tersebut menjadi faktor penentu kepariwisataan yang berprinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Jika hal tersebut gagal diwujudkan, maka akan terjadi berbagai persoalan yang tidak menghasilkan pembangunan kepariwisataan berkualitas tinggi:

“understanding both positive and negative impacts will lead to practical sustainable tourism development. When the negative impacts on the environment are recognized, corrected, and managed well and the positive attributes are built up, the results can be presented to stakeholders and tourism can become an important driving force in community development... Included in this policy process should be a listing of the quality, quantity, and geographic distribution of the tourism superstructure and special events, such as festival... Policy issues should be extended beyond those traditionally thought of tourism, to be inclusive of all public programs concerned with tourism, not just what is typically perceived as tourism products. For instance, water management issues usually concern local businesses and residents. However, water parks, large golf resorts, and other tourism infrastructure can consume vast quantities of water. Therefore, waterworks departments will want to consider both the tourism industry and the local residents when developing policy. This will be crucial for tourism’s long-term success in a community... Therefore, it is important to have an integrated policy. Without a comprehensive tourism policy, tourism’s economic, political and legal implications often have unguided results, which may not lead to high-quality tourism development.”

Dengan demikian ditinjau dari aspek kebutuhan praktis dalam rangka membuat kebijakan dilingkungan birokrasi, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal penting yang seharusnya menjadi perhatian serius para birokrat baik di tingkat daerah maupun ditingkat pemerintahan daerah.

Pertama, kepariwisataan tidak sekedar merupakan masalah sederhana yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran. Kepariwisataan berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang sifatnya strategis, sehingga diperlukan suatu kebijakan dengan pendekatan yang bersifat holistik dan dilaksanakan secara konsisten.

Kedua, sebagai besar kebijakan di bidang kepariwisataan menyangkut masalah penyusunan dan penegakan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu pemahaman mengenai hukum

dan implementasi hukum seharusnya menjadi salah satu prioritas perhatian birokrasi dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang berbasis prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, keberhasilan kepariwisataan dimasa depan sangat bergantung pada kualitas kebijakandi bidang kepariwisataan pada hari ini.

1.3 Pariwisata Sebagai Obyek Studi, Sistem Dan Dampak Sosial

Budaya

Sebagai aktivitas yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, pariwisata banyak menarik minat akademisi dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkajinya. Jovicic (1997, dalam Richardson dan Fluker, 2004) mengusulkan agar kajian pariwisata dikembangkan sebagai disiplin tersendiri, yang disebut *Tourismology*. Hal ini didasarkan alasan bahwa pariwisata sebagai fenomena kompleks tidak dapat dipahami secara komprehensif dengan menggunakan berbagai perspektif disiplin ilmu yang ada sekarang. Pengembangan *Tourismology* akan memberi peluang lebih baik untuk mengkaji berbagai masalah kepariwisataan sebagai suatu composite phenomena. Leiper (1995) mendukung pengembangan pariwisata sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri dengan menyebut *tourismologi* sebagai *tourism discipline*.

Menggunakan pendekatan epistemologi, ontologi, dan aksiologi, pariwisata sama seperti cabang ilmu lain, sehingga dapat disebut sebagai ilmu tersendiri. Banyak kajian yang dilakukan pariwisata, secara empiris dan teoretis. Pariwisata adalah institusi sosial yang penting dalam kehidupan modern, yang dapat dipelajari. Pariwisata mempunyai sejarah dan *literature*, mempunyai struktur internal dengan prinsip oprasinya, dan sangat sensitif terhadap pengaruh eksternal baik kejadian alam maupun budaya, semua dapat dianalisis.

Atas pengkajian terhadap aspek kepariwisataan, kemudian pariwisata semakin berkembang dari berbagai disiplin ilmu yang sudah “mapan”, cabang yang menekuni pariwisata seperti Geografi Pariwisata, Psikologi Pariwisata, Ekonomi Pariwisata, Sosiologi Pariwisata, Antropolgi pariwisata, dan lainnya.

1.4 Wisatawan dan Pariwisata

Pariwisata berkembang karena ada gerakan manusia dalam mencari suatu yang belum diketahui, menjelajah wilayah baru, mencari perubahan suasana, atau untuk mendapat perjalanan baru (Robinson, 1976; Murphy, 1985). Pariwisata telah dimulai sejak dimulainya peradaban manusia, ditandai adanya pergerakan manusia yang melakukan ziarah dan perjalanan agama serta lainnya. Sebagai fenomena modern, tonggak bersejarah dalam pariwisata dapat ditelusuri dari perjalanan Marcopolo (tahun 1254-1324) yang menjelajah Eropa, sampai Tiongkok, kemudian kembali ke Venesia, selanjutnya disusul perjalanan Pangeran Henry (1394-1460), Cristopher Columbus (tahun 1451-1506), dan Vas Co da Gama (akhir abad XV). Namun, sebagai kegiatan ekonomi, pariwisata baru berkembang pada awal abad 19, dan sebagai industri internasional, pariwisata dimulai tahun 1869 (Crick, 1989, Graburn dan Jafari, 1991).

Dewasa ini pariwisata telah menjadi salah satu industri andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara. Pariwisata cukup menjanjikan sebagai primadona “ekspor”, karena bebrapa ciri positifnya. Dalam suasana terjadi kelesuan perdagangan komunitas, pariwisata tetap mampu menunjukan *trend* yang meningkat terus. Data perkembangan pariwisata didunia menunjukkan bahwa pada saat terjadi krisis minyak tahun 1970-an, maupun pada saat terjadinya resesi dunia awal tahun 1980-an, pariwisata tetap maju, baik dilihat dari jumlah wisatawan internasional maupun penerimaan devisa dari sektor pariwisata. Dalam periode 1984-1992, penerimaan berbagai negara dari industri tanpa asap ini mengalami pelonjakkan cukup tajam, sebagaimana dilihat dari data statistik negara-negara OECD (*Organitaiton for Economic Co-operation and Development*). (1994; Pitana, 1999).

Bagi Indonesia dapat ditelusuri kembali kepada dasawarsa awal abad ke-20 (tepatnya pada tahun 1910,yang ditandai dengan dibentuknya VTV (*Vereeneging Toeristen Verkeer*), Badan Pariwisata Belanda, berkedudukan diBatavia. Badan pemerintah ini sekaligus bertindak sebagai *tour operator dan travel agent*, yang secara gencar mempromosikan Indonesia (khususnya Jawa, kemudian Bali). Tahun 1926 berdiri di Jakarta sebuah cabang dari LISLIND (*Lissonne*

Lindeman) yang tahun 1928 berubah menjadi NITOUR (*Nederlandsche Indische Touristen Bureau*), sebagai anak perusahaan dari perusahaan pelayaran Belanda (KPM). KPM secara rutin melayani pelayaran yang menghubungkan Batavia, Surabaya, Bali dan Makassar, dengan mengangkut wisatawan (Spillane, 1989; Vickers, 1989).

Setelah Indonesia merdeka, tahun 1946, pemerintah membentuk HONET (*Hotel National and Tourism*), badan yang bertugas menghidupkan kembali pariwisata, khususnya menangani perusahaan Belanda. Tahun 1955 Natour dan YTI (Yayasan Tourisme Indonesia). Dengan usaha keras, badan ini berhasil mengangkat pariwisata Indonesia, sehingga sempat terjadi “demam pariwisata” beberapa tahun lamanya. Kongres 1 YTI, 12-14 Januari 1957 (disebut Munas Tourisme I) melahirkan Dewan Tourisme Indonesia (DTI). Istilah *pariwisata* lahir terakhir, pada waktu Munas Tourisme II di Tretes, Jatim, 12-14 Juni 1958, dimana *pariwisata* diartikan sebagai *international tourism*, untuk *domestic tourism* dipopulerkan dengan istilah *dharma wisata*.

Indonesia sangat menaruh harapan pada pariwisata sebagai “komoditas ekspor” yang diharapkan mampu menggantikan peran migas. Harapan ini cukup beralasan, karena Indonesia memiliki potensi. Meskipun pariwisata telah lama menjadi, perhatian baik dari segi ekonomi, politik, administrasi kenegaraan, maupun sosiologi, samapai saat ini belum ada kesepakatan secara akademis mengenai apa itu wisatawan dan pariwisata.

Kata “wisata” (*tour*) secara harfiah dalam kamus berarti; *perjalanan dimana si pelaku kembali ketempat awalnya; perjalanan sirkuler yang dilakukan untuk tujuan bisnis, bersenang-senang, atau pendidikan, pada berbagai tempat dikunjungi dan biasanya menggunakan jadwal perjalanan terencana.* (Murphy, 1958: 4-5).

Orang yang melakukan perjalanan wisata disebut wisatawan/*tourist*. Balasan wisatawan juga bervariasi, mulai dari yang umum sampai dengan yang sangat teknis spesifik. *United Nation Conference on Travel and Tourism* di Roma (1963) memberi batasan lebih umum, tetapi menggunakan istilah *visitor* (pengunjung), yaitu:

“Setiap orang yang mengunjungi negara yang bukan merupakan tempat tinggalnya, untuk berbagai tujuan, tetapi bukan untuk mencari pekerjaan atau penghidupan dari negara yang dikunjungi”. Batasan ini juga digunakan oleh IUOTO (*International Union of Official Travel Organization*) sejak tahun 1968. Batasan ini sebenarnya hanya berlaku untuk wisatawan internasional, tetapi secara analogis bisa juga diberlakukan untuk wisatawan domestik, dengan membagi negara atas daerah (provinsi). Selanjutnya visitor dibedakan atas dua, yakni: **1.** Wisatawan (*tourist*) mereka yang mengunjungi suatu daerah lebih dari 24 jam, **2.** Pelancong/pengunjung (*excursionist*), yaitu mereka yang tinggal ditujuan wisata kurang dari 24 jam.

Batasan tentang wisatawan juga diberikan Leiper (1995; 11) mengatakan:

“Tourist can be defined in behavioural terms as persons who travel away from their normal residential region for a temporary period of at least one night, to the extent that their behavior involves as search for leisure experiences from interactions with features or characteristics of places they choose to visit”.

Dari definisi wisatawan, maka berkembang definisi parawisata, yang sangat bervariasi antar ahli. Macintosh (1980; 28) menyebut bahwa parawisata adalah:

“The sum of phenomena and relationships arising from the interaction of tourists, businesses, hostgovernment, and communities, in the process of attracting and hosting these tourists and other visitors”.

Jafari (1977; 28) mengutarakan secara akademis, studi tentang pariwisata adalah:

“studi tentang manusia yang berwisata dengan berbagai implikasinya. Studi tentang pariwisata adalah:

“The study of man away from his usual habitat, of the industry which responds to his needs, and the impacts that both he and the industry have on the host’s socio cultural, economic and physical environment”.

Definisi diberikan Weaver dan Opperman (2000:3), mengemukakan batasan:

“Tourism is the sun total of the phenomena and relationship arising from the interaction among tourist, bussines suppliers, host goverments, host communities, origin goverments, universitas community colleges nongovermental organizations, in the process of attracting, transporting, hosting, amd managing these tourists and other visitors”.

Menurut Murphy (1985), pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wiasata, perjalanan, industri, dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalanan tidak permanen. Hal ini mirip dengan batasan yang diberikan Fennel (1994: 4).

“Tourism is defined as the interrelated system that includes tourists and the associated services that are provided and utilized (facilities, attractions, transportation, and accomodation) to aid in their movement”.

Batasan termaksud begitu luas, sehingga pengertian pariwisata seakan tidak bisa “dibatasi”, karena menyangkut hampir semua aspek kehidupan. Begitu luasnya sampai ada yang mengatakan bahwa segala sesuatunya adalah pariwisata, *tourism is everything and everything is tourism* (Ian Munt, 1994: 104). Dalam definisi yang *tautologies*, dijelaskan bahwa:

“Tourism becomes absolutely everything associabel with acts of tourists, or to put into its proper tautological form, ‘tourism is tourism’ or ‘tourism is what tourists do’. (Franklin, 2003:28).

Pemberian batasan tentang pariwisata, sebagaimana juga dengan berbagai subjek lain, sering tidak dapat menghasilkan suatu batasan memuaskan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam *The Economic*, yang dikutip pada awal tulisan ini. Melihat batasan luas dan beragam. **Richardons** danFluker (2004) membedakan batasan pariwisata menjadi dua yaitu: **1.** Batasan konseptual digunakan untuk memahami pariwisata secara konseptual dan pemahaman akademi, **2.** Batasan teknis, digunakan untuk kepentingan pengumpulan statistik. Batasan teknis diberikan oleh *The World Orgasation* (WTO), bahwa:

“Tourism comprises the activities of persons, travelling to and staying in place outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purpose”. (1995, dikutip dari Richardson dan Fluker 2004:7).

Meskipun ada variasi batasan mengenai pariwisata, ada beberapa komponen pokok yang secara umum disepakati di dalam memberi batasan mengenai pariwisata (khususnya pariwisata Internasional):

1. *Traveller*. Orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih lokalitas.
2. *Visitor*. Orang yang melakukan perjalanan, ke daerah yang bukan merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan, dan tujuan perjalanannya bukan untuk terlibat dalam kegiatan mencari nafkah, pendapatan atau kehidupan ditempat tujuan.
3. *Tourist*. Bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak 1 malam (24 jam) di daerah yang dikunjungi. (WTO, 1995).

Semua definisi pariwisata yang dikemukakan, meskipun berbeda dalam penekanan, selalu mengandung ciri pokok yaitu:

1. Adanya unsur *travel* (perjalanan): pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya.
2. Adanya unsur “Tinggal Sementara” ditempat yang bukan merupakan tempat tinggal yang biasanya.
3. Tujuan utama dari pergerakan manusia tersebut bukan untuk mencari kehidupan/pekerjaan di tempat yang dituju. (Richardson dan Fluker, 2004:5).

1.5 Dampak Sosial-Budaya Pariwisata

Meskipun pariwisata juga menyeluruh berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti, politik, keamanan, dan sebagainya, dampak pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata yang banyak mendapat ulasan adalah dampak terhadap

1. Sosial ekonomi
2. Sosial budaya
3. Lingkungan

1.6 Dampak Sosial Ekonomi

Pada umumnya pariwisata menimbulkan dampak sosial ekonomi terhadap :

1. Penerimaan devisa
2. Pendapatan masyarakat
3. Kesempatan kerja
4. Harga
5. Distribusi manfaat/keuntungan.
6. Kepemilikan dan kontrol
7. Pembangunan pada umumnya
8. Pendapatan pemerintah

1.8 Dampak Sosial Budaya

Pada umumnya Pariwisata menimbulkan dampak terhadap:

1. Keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya.
2. Hubungan interpersonal antara anggota masyarakat,
3. Dasar-dasar organisasi kelembagaan lokal.
4. Migrasi dari dan ke arah pariwisata.
5. Ritme kehidupan lokal masyarakat.
6. Pola pembagian kerja.
7. Stratifikasi dan mobilitas sosial.
8. Distribusi pengaruh dan kekuasaan.
9. Meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial.
10. Bidang kesenian dan adat istiadat (**Cohen**, 1984).

Enam dampak sosial budaya terhadap:

1. Struktur demografi.
2. Bentuk dan tipe mata pencaharian.
3. Transformasi nilai
4. Gaya hidup tradisional.
5. Pola konsumsi. pariwisata.
6. Pembangunan masyarakat yang merupakan manfaat social-budaya pariwisata. (**Figuerola dalam** Pearce, 1989:218).

Perubahan sosial-budaya pariwisata menimbulkan dampak:

1. Aspek demografis (jumlah penduduk, umur, perubahan piramida kependudukan).
2. Mata pencaharian (perubahan pekerjaan, distribusi pekerjaan).

3. Aspek budaya (tradisi, keagamaan, bahasa).
4. Transformasi norma (nilai, moral, peranan seks).
5. Modifikasi pola konsumsi (infrastruktur, komoditas).
6. Lingkungan (polusi, kemacetan lalu lintas). (Pizam dan Milman, 1984).

Faktor yang ikut menentukan dampak sosial budaya

1. Jumlah wisatawan, baik absolut maupun relatif terhadap jumlah penduduk lokal
2. Objek dominan yang menjadi sajian wisata dan kebutuhan wisatawan terkait dengan sajian tersebut.
3. Sifat atraksi wisata yang disajikan, apakah alam, situs arkeolog, budaya masyarakat dan lain-lain.
4. Struktur dan fungsi dari organisasi kepariwisataan di Daerah Tujuan Wisata (DTW).
5. Perbedaan tingkat ekonomi dan perbedaan kebudayaan antara wisatawan dengan masyarakat lokal.
6. Perbedaan kebudayaan atau wisatawan dengan masyarakat lokal.
7. Tingkat otonomi (Politik, geografis, dan sumberdaya) dari Daerah Tujuan Wisata (DTW).
8. Laju/kecepatan pertumbuhan pariwisata.
9. Tingkat perkembangan pariwisata (apakah awal, atau sudah jenuh).
10. Tingkat pembangunan ekonomi Daerah Tujuan Wisata (DTW).
11. Struktur lokal masyarakat lokal.
12. Tipe resort yang dikembangkan (*open* atau *enclave resorts*).
13. Peran pariwisata dalam ekonomi Daerah Tujuan Wisata (DTW). (Pitana, 1999).

17 faktor yang memengaruhi dampak sosial-budaya pariwisata:

1. Jumlah wisatawan.
2. Tipe wisatawan.
3. Tahap perkembangan pariwisata.
4. Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antara negara asal wisatawan dengan negara penerima.
5. Perbedaan norma budaya antara negara asal wisatawan dengan negara penerima.
6. Ukuran fisik wilayah DTW, yang memengaruhi kepadatan wisatawan.
7. Jumlah penduduk luar daerah (migran) yang melayani kebutuhan pariwisata.
8. Besar kecilnya pembelian barang-barang properti oleh wisatawan.
9. Tingkat penguasaan atau kepemilikan properti dan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal.
10. Perilaku lembaga pemerintah terhadap pariwisata.
11. Kepercayaan masyarakat lokal dan kekuatan kepercayaan tersebut.
12. Keterbukaan terhadap berbagai kekuatan yang memengaruhi perubahan teknologi sosial, dan budaya.
13. Kebijakan dalam penyebaran wisatawan.
14. Pemasaran dan citra yang dibentuk lewat pemasaran terhadap Daerah Tujuan Wisata (DTW).
15. Homogenitas masyarakat penerima.
16. Aksesibilitas Daerah Tujuan Wisata (DTW).
17. Kekuatan awal dari tradisi berkesenian, cerita rakyat, legenda, dan sifat tradisi tersebut.

Selanjutnya adalah tabel dampak lokal budaya pariwisata menurut beberapa penulis.

1.9 Gambaran Umum Isi Buku

Uraian buku ini berfokus pada Kebijakan Tatakelola Pariwisata Kabupaten Pesawaran *Strategi Penatakelolaan Pariwisata Kabupaten Pesawaran Menuju Industri Pariwisata Mandiri Berbasis Kearifan Lokal* **“ONE VILLAGE ONE DESTINATION”** SATU DESA SATU DESTINASI WISATA

Untuk membahas perspektif tersebut, isi buku ini terdiri dari dua belas bab (selain pendahuluan), yaitu *bab ke dua* tentang *Tinjauan Kebijakan*, *bab ke tiga* berisi Kerangka Dasar Kebijakan Pembangunan Kepariwisata di Propinsi Lampung dan beberapa isu strategis yang menyertai pembangunan kepariwisataan di Lampung. Juga di lengkapi teori mendasar tentang kebijakan pemberdayaan, dan mengelaborasi beberapa studi pendahuluan yang digunakan sebagai basis dalam memahami perspektif kebijakan pembangunan kepariwisataan.

<i>Bab ke empat,</i>	<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi,</i>
<i>Bab ke lima,</i>	<i>Konsep Pengembangan Pariwisata Lampung,</i>
<i>Bab enam,</i>	<i>Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung</i>
<i>Bab ke tujuh,</i>	<i>Kebijakan Tatakelola Pariwisata Kabupaten Pesawaran</i>
<i>Bab ke delapan,</i>	<i>Payung Hukum berkenaan dengan Kebijakan Tatakelola Pariwisata Kabupaten Pesawaran One Village One Destination</i>
<i>Bab kesembilan,</i>	<i>Pengembangan Daerah Penyangga Pariwisata</i>
<i>Bab kesepuluh,</i>	<i>Manajemen Pembangunan Kabupaten Pesawaran</i>
<i>Bab kesebelas,</i>	<i>Strategi Penatakelolaan Pariwisata Kabupaten Pesawaran Menuju Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal</i>
<i>Bab keduabelas,</i>	<i>Penutup</i>

Daftar Pustaka

- Antariksa,Basuki. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan*.
Malang:IntransPublishing
- Aprillia,Theresia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung
; Alfabeta
- Sedarmayanti,2014 *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan &
Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*

BAB 2

TINJAUAN KEBIJAKAN

A. Kompetensi Dasar

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang Kebijakan rencana induk pengembangan pariwisata nasional, arah dan tujuan kepariwisataan nasional

Indikator

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian/konsep tentang Manajemen Pembangunan Kepariwisata, *Tourism Law and Hospitality Law*, Arah dan Tujuan Pembangunan Kepariwisata Nasional, Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Riparnas), Kebijakan Pariwisata Kabupaten Pesawaran (Teluk Pandan) Sebagai Obyek Studi, Sistem Dan Dampak Sosial Budaya Pariwisata, Wisatawan dan Pariwisata, Sistem Pariwisata, Dampak Sosial Ekonomi, serta Pentingnya Teknologi Informasi dalam pengembangan pariwisata

Tujuan Pembelajaran

Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada mahasiswa dasar-dasar teoritik kebijakan rencana induk pengembangan pariwisata nasional

B. Penyajian

2.1. Tinjauan Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Riparnas)

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pesawaran, yaitu visi-misi dan arah pengembangan kepariwisataan nasional yang dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Visi dan Misi Pengembangan Kepariwisata Nasional

Visi pengembangan kepariwisataan nasional merupakan penjabaran dari visi pembangunan nasional, visi tersebut merupakan penjabaran situasi kepariwisataan Indonesia yang diinginkan di masa yang akan datang. Visi pengembangan kepariwisataan nasional tersebut adalah “ Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat”

Untuk mencapai kondisi masa yang akan datang yang diinginkan diperlukan komitmen-komitmen yang dituangkan dalam misi pengembangan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

2.1.2. Tujuan Pembangunan Kepariwisata Nasional

Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah :

- a. rneningkétkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata.
- b. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indbnesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
- c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
- d. mengembangkan Kclembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembanguna 1 Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

2.1.3. Arah Pengembangan Kepariwisataan Nasional

Arah pengembangan kepariwisataan nasional merupakan sekumpulan kebijakan yang menjadi dasar penyusunan program-program menuju tercapainya misi kepariwisataan nasional Indonesia melalui perwuludan dari komitmen-komitmen atau misi kepariwisataan nasional secara konsekuen dan terarah.

Arah pembangunan kepariwisataan nasional menganut Prinsip :

- a. Pembangunan Pariwisata Nasional berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.
- b. Pembangunan Pariwisata Nasional orietasi pada upaya peningkatan pertumbuhan. peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan. serta pelestarian lingkungan;
- c. Tata kelola yang baik.
- d. Keterpaduan secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku.
- e. Mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Selanjutnya kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran Secara nasional akan banyak dipengaruhi perencanaan pariwisata untuk Pulau Sumatera. Visi pengembangan pariwisata di wilayah Sumatera adalah:

- a. Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi dalam rangka pememtaan pengembangan antar sektor maupun regional wilayah Sumatera.
- b. Menjadikan sektor pariwisata sebagai pendorong dan pelopor pembangunan berwawasan lingkungan di wilayah Sumatera.
- c. Membangun citra wilayah Sumatera dengan mengangkat budaya Islam-Melayu dan wisata lingkungan dengan latar belakang Bukit Damn

Sumatera dan pulau-pulnu kecil di Laut Cina Selatan menjadi salah satu mesin penggerak perekonomian di Kawasan Barat Indonesia. Secara geografi, letak kawasan ini sangat strategis karena berada pada jalur pelayaran Internasional dan berutang: dengan Negara Singapura dan Malaysia. Pemerintah telah mengupayakan kebebasan berinvestasi dimana para pengusaha diberi kebebasan untuk mengembangkan lokasi dan kegiatan pariwisata sampai ke pelosok.

Dalam pengembangannya perlu diperhatikan upaya-upaya perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat yang belum siap melalui upaya pengembangan pariwisata lingkungan, seperti wisata agro (pertanian, perkebunan, dan hutan), wisata ekologi (*ecotourism*), dan wisata bahari. selain pengembangan pariwisata konvensional. Untuk mencapai visi pengembangan pariwisata Pulau Sumatera. maka ditetapkan misi pengembangan pariwisata Pulau Sumatera. yaitu:

- a. Meningkatkan kompiementariras aktivitas perekonomian pada umumnya dan sektor pariwisata pada khususnya dengan nemanfaatkan kedekatan wilayah dengan Naga 'a-negara tetangga terutama yang tergabung dalam IMTGT dari SIJORI.
- b. Memperkuat posisi daerah-daerah bagian Selatan wilayah Sumatera dengan. memanfaatkan kedekatan dan kecamatan dengan Pulau Jawa.
- c. Dalam jangka pendek perlu pengendalian bagi produk wisata yang sudah berkembang dan mengantisipasi kejenuhan. Daerah yang belum berkembang perlu di akselerasi untuk diversifikasi produk dalam rangka mengakomodasi

karakteristik permintaan wisatawan mancanegara dan nusantara.

- d. Mengusahakan pengembangan produk wisata yang bersahabat dengan lingkungan dan bukan menjadi perusak sebagaimana umumnya terjadi pada sektor lain.
- e. Mengembangkan keterkaitan Industri pariwisata antaradaerah wilayah Sumatera, terutama dengan mengembangkan jalur wisata antar daerah.

2.2. TINJAUAN KEBIYAKAN UMUM KEPARIWISATAAN NASIONAL

Kebijakan umum kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
- b. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- c. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
- d. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

3.2.1. Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional

Sistem perwilayahan yang dihasilkan oleh RIPPNAS ini tidak sekedar merupakan pembagian habis wilayah nasional menjadi beberapa wilayah subnasional namun lebih diutamakan pada adanya suatu hubungan antar wilayah yang bersifat komplementer. Karena itu wilayah-wilayah yang diidentifikasi tidak bersifat mutlak terpisah satu dengan lainnya, tapi memperlihatkan adanya tumpang tindih diberbagai tempat yang merupakan unsur-unsur pangkat antar wilayah. Masalah perwilayahan tersebut merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan jumlah kunjungan secara nasional karena Indonesia menjadi negara tujuan wisata majemuk (multi destinations).

- b. Secara keseluruhan sistem perwilayahan tersebut dapat saling menunjang dan mendukung. Kelesuan di wilayah tertentu dapat diimbangi dengan peningkatan di wilayah lain karena satu sama lain dapat berdiri sendiri.
- c. Pasar wisata Indonesia yang sangat bervariasi tidak bergantung hanya pada satu jenis produk. tetapi lebih banyak produk yang bervariasi dapat diciptakan.
- d. Makin jelasnya 'apa' dipromosikan 'ke mana', mengingat segmen pasar Indonesia yang bervariasi dan memerlukan jenis-jenis produk yang berbeda pula.

Kebijakan Pengembangan Pariwisata dibagi menjadi Destnasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional (KSPN).

Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) ditentukan dengan kriteria:

- a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi yang di dalamnya terdapat kawasan/kawasan pengembangan pariwisata nasional,yang diantaranya merupakan KSPN;
- b. Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan intemasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
- c. Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
- e. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Sedangkan KSPN KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan dengan kriteria:

- a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;

- b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
- d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan keurbakalaan;
- h. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. Memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. Memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

3.2.2. Kebijakan Pemasaran

Kebijakan pemasaran terdiri dari kebijakan pengembangan produk, promosi, penetapan harga, dan sistem distribusi.

3.2.2.1. Kebijakan Pengembangan Produk

Pengembangan produk dilakukan dengan menganut prinsip yang sejalan dengan kebijakan umum. Secara lebih spesifik prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Mempertimbangkan karakteristik permintaan atau kecenderungan pasar dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai bidang.
- b. Menggarisbawahi kepedulian masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan atau kepuasan wisatawan untuk meningkatkan daya saing.
- d. Mengembangkan produk yang syarat dengan muatan pengetahuan.

- e. Mengangkat jati diri bangsa Indonesia dengan pengembangan produk yang berkualitas.
- f. Mewujudkan kolaborasi sinergis.
- g. Dekat dengan lingkungan fisik dan sosial budaya serta bersusila.
- h. Bertumpu pada hubungan setara antara tamu dengan tuan rumah.

Pada dasarnya pengembangan produk ada empat strategi, yaitu:

- a. Intensifikasi pada lokasi-lokasi yang telah / sedang berkembang dengan pengelolaan dan pengendalian pengembangan yang tertib.
- b. Ekstensifikasi, yaitu pengembangan di lokasi-lokasi potensial lain.
- c. Diversifikasi dengan penciptaan produk-produk tematik yang spesifik (wisata ekologi, wisata kota, dan lain-lain).
- d. Konsolidasi, yaitu pemantapan melalui peningkatan pemanfaatan komponen pariwisata melalui pemenuhan komponen yang diperlukan untuk melengkapi apa yang sudah pernah dibangun.

3.2.2.2. Kebijakan Promosi

- a. Pemasaran untuk wisatawan domestik harus mendapat perhatian lebih dan ditujukan untuk mengalirkan segmen pasar potensial.
- b. Perlunya deregulasi tentang berbagai kebilakan yang mengikat tarif.
- c. Promosi wisata hendaknya dilakukan di bawah satu atap. Pengenalan destinasi baru di luar Jawa dan Bali dilakukan melalui pendekatan "*tourism mix*".
- d. Arah kebijakan pemasaran pariwisata Indonesia untuk pasar 'wisman' adalah memantapkan citra pariwisata Indonesia sebagai daerah tujuan wisata internasional.
- e. Dalam Jangka pendek, memosisikan Indonesia sebagai daerah tujuan wisata, selanjutnya dalam jangka menengah dan panjang mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata.

- f. Memperbesar pasar wisata yang ada dan menumbuhkan segmen wisatawan dengan pengeluaran yang besar.
- g. Meningkatkan rasa keterkaitan 'wisman' dengan dunia pariwisata Indonesia.

3.2.2.3. Kebijakan Penetapan Harga

Kebijakan penetapan harga hendaknya tidak hanya difokuskan kepada penekanan harga komponen-komponen yang dapat mengurangi kualitas, tapi juga pada perencanaan produk dan sistem distribusi:

- a. Penetapan harga yang mempertimbangkan 'value of money' setinggi-tingginya.
- b. Menghindari komponen-komponen yang menyebabkan lingginya harga suatu produk.

3.2.3.4. Kebijakan Sistem Distribusi

Dalam pendistribusian produk wisata hendaknya dimungkinkan adanya dua jalur, yaitu sistem langsung antara produsen dan konsumen, khususnya bagi wisatawan Individual yang tidak menggunakan jasa biro perjalanan dan sistem distribusi melalui 'grosir' (wholesaler) dan 'pengecer'. Sementara ini sistem tersebut belum berjalan dengan baik dan timbul kerancuan karena kurangnya grosir' domestik dan adanya praktek semua menjadi 'pengecer'. Atas dasar kondisi tersebut maka diperlukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan dan sistem pemesanan langsung.
- b. Pengembangan sistem 'grosir' dalam arti sebenarnya.
- c. Pengembangan outlet untuk produk yang lengkap.

3.2.3. Kebijakan Kelembagaan

Kebijakan kelembagaan terdiri dari:

- a. Pengembangan fungsi Direktorat Jenderal Pariwisata sebagai 'sutradara' pembangunan kepariwisataan.
- b. Pergeseran bentuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
- c. Perwujudan otonomi daerah.

- d. Implementasi misi pembangunan nasional dalam pembangunan kepariwisataan.
- e. Pemantapan dan sosialisasi ideologi pembangunan kepariwisataan.
- f. Pelembagaan orientasi kepada kepentingan customers.
- g. pengembangan dan Pelembagaan tolak ukur kinerja sektor pariwisata.

3.2.4. Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Arahan kebijakan Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dapat digunakan sebagai dasar pengembangan pmgram-program yang berkaitan dengan pengembangan SDM di bidang pariwisata, diantaranya:

- a. Perubahan paradigma pendidikan kepariwisataan.
- b. Pemberdayaan dan pengembangan institusi pendidikan kepariwisataan.
- c. Pengembangan sistem pembinaan oleh PTN/ PTS unggulan.
- d. Penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan para profesional.
- e. Pengembangan bidang-bidang khusus untuk mendukung pasar utama.
- f. Pemanfaatan bantuan luar negeri untuk pendidikan kepariwisataan.
- g. Pelembagaan pendidikan bagi sektor-sektor publik.
- h. Pelembagaan pendidikan umum.
- i. pengembangan muatan lokal kepariwisataan ke dalam pendidikan dasar dan menengah.
- j. Mobillsasi LSM sebagai garda depan untuk program penyuluhan

3.2.5. Kebijakan Investasi

Beberapa kebijaksanaan umum investasi dalam rangka pengembangan investasi pariwisata di masa datang. yaitu:

- a. Peningkatan eiisiensi alokasi pembiayaan pemerintah.
- b. Peningkatan peran pembiayaan swasta.

- c. Kelembagaan yang ditujukan pada efektivitas pengembangan tujuan wisata.
- d. konsistensi kerja sama antar sektor yang lebih terfokus

3.2.6. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Prinsi pembangunan yang berkelanjutan dalam kegiatan pariwisata diharapkan tidak hanya dilakukan oleh industri pariwisata yang terkait langsung. misalnya hotel, restoran, tetapi juga badan-badan pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat, dan tentunya wisatawan itu sendiri. Karena itu diperlukan penetapan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Aspek lingkungan fisik maupun sosial budaya harus dipertimbangkan sejak awal perencanaan pengembangan.
- b. Pemantauan rona lingkungan secara periodik.
- c. Pengembangan kriteria ramah lingkungan.
- d. Pengembangan pendidikan cinta lingkungan melalui pariwisata.
- e. Peningkatan kualitas lingkungan bawahan pariwisata.
- f. Pelembagaan konsep daya dukung dan biaya lingkungan.
- g. Penetapan zona khusus dengan resiko lingkungan tinggi.

2.3. TINJAUAN KEBERKEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung (2005 -2025) terdapat sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung 20 tahun ke depan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Lampung maju dan sejahtera diantaranya yang berhubungan langsung dengan pariwisata adalah bahwa pariwisata berkembang pesat dan berperan signifikan dalam perekonomian Provinsi Lampung.

Sedangkan dalam Rencana Induk Pengerrtangan Pariwisata Provinsi Lampung 2011-2031, arah pengembangan Pariwisata Lampung, adalah "Mewujudkan Lampung sebagai daerah berbudaya dan tujuan wisata yang unggul, berdaya saing". Untuk pencapaian visi tersebut maka telah dirumuskan misi, sasaran, strategi, dan kebijakan bidang pariwisata sebagai berikut :

3.3.1. Misi Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung

- a. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah untuk mengisi dan mewarnai pembangunan daerah.
- b. Meningkatkan sumberdaya manusia yang beriman, bertakwa dan menguasai IPTEK.
- c. Meningkatkan kegiatan promosi, pemasaran pariwisata yang didukung sarana dan prasarana promosi yang handal.
- d. Mengembangkan produk/obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang unggul dan berdaya saing. mampu menarik minat dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan.
- e. Meningkatkan keterpaduan, keslnergian dan keharmonisan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antar sektor, antar pemangku kepentingan pusat dan daerah.
- f. Mewujudkan kelembagaan dan pelayanan masyarakat dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
- g. Perwujudan Citra Lampung yang positif melalui Tri Citra yaitu Aman, Tertib dan Bersih, sehingga mampu berperan sebagai magnet yang kuat dalam menarik minat investor dan wisatawan melalui promosi, investasi, k'ebudayaan dan pariwisata.
- h. Menggali dan mengembangkan budaya daerah untuk mengisi dan mewarnai pembangunan.
- i. Peningkatan kehandalan pariwisata Lampung yang bertumpu kekayaan alam, nilai budaya, agama, dan lingkungan hidup dalam menunjang ekonomi sebagai wahana pemberdayaan ekonomi rakyat.

3.3.2. Sasaran Umum Pariwisata Provinsi Lampung

- a. Meningkatkan jumlah kunjungan, kualitas dan lama tinggal wisatawan yang berkunjung.
- b. Meningkatkan Jumlah investasi Daerah Lampung baik PMA maupun PMDN.
- c. Meningkatkan peran masyarakat dan budaya dalam menunjang dan mendorong pembangunan daerah, khususnya bidang pariwisata.

3.3.3. Strategi Pariwisata Provinsi Lampung

- a. Meningkatkan kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri melalui pendekatan analisa pasar dan kerjasama antar DTW, MPU dan destinasi pariwisata Internasional.
- b. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam rangka menciptakan produk pariwisata yang siap jual dan kuat, mampu bersaing dalam rangka menarik minat dan daya tarik wisata.
- c. Menetapkan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah dengan menetapkan kawasan pengembangan pariwisata untuk mendukung obyek dan daya tarik wisata Lampung.
- d. Mendorong minat investor untuk: menanamkan investasinya di daerah Lampung.
- e. Meningkatkan peran Serta masyarakat dan seni budaya daerah Lampung untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah dan Pariwisata khususnya.

3.3.4. Kebijakan Pariwisata Provinsi Lampung

- a. Promosi dan pemasaran diperluas serta dipertajam melalui pendekatan pasar.
- b. Memantapkan dan mengarahkan pembangunan pariwisata pada Provinsi Lampung sebagai tujuan wisata dan peluang andalan daerah dengan membina dan mengembangkan obyek wisata unggulan dan penunjang untuk keragaman atraksi dan daya tarik wisata.
- c. Meningkatkan kerjasama pariwisata baik tingkat sub regional, regional, nasional dan internasional.
- d. Mengembangkan budaya kemandirian dan jaringan kerja masyarakat dalam mendayagunakan sumberdaya lingkungan alam, sosial budaya setempat untuk meningkatkan kesejahteraan harkat dan martabat masyarakat.
- e. peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam mengembangkan kepariwisataan daerah meiaiui berbagai pendidikan dan pelatihan.

3.4. TINJAUAN POSISI KABUPATEN PESAWARAN DALAM RIPP PROVINSI LAMPUNG

Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran termasuk dalam Koridor 1 (Koridor Barat] yang merupakan satu kesatuan dengan Kawasan Wisata Unggulan [KWU) Kota Bandar Lampung dan KWU Teluk Kiluan, serta menjadi jalur KWU Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Tanjung Setia Krui dan sekitarnya. Posisi Strategis Kabupaten Pesawaran yang berada dalam satu jalur dengan destinasi wisata yang sudah sangat terkenal dan sudah banyak wisatawan yang berkunjung.

Secara geografis kawasan ini terletak di bagian tengah Provinsi Lampung, dan memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata alam, bahari, dan budaya. Kemudian Kabupaten Pesawaran dalam RIPP Provinsi Lampung tersebut termasuk ke dalam tingkat prioritas pengembangan sedang. Kabupaten Pesawaran merupakan Destinasi penyangga bagi Kota Bandar Lampung, hampir semua daya tarik wisata yang dikunjungi oleh wisatawan di Bandar Lampung menjadikan obyek wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran sebagai destinasi tujuan wisata.

3.4. TINJAUAN KEBIJAKAN PARIWISATA KABUPATEN PESAWARAN

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran tahun 2011 -2031 menetapkan kawasan pariwisata di Kabupaten Pesawaran meliputi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Selanjutnya di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran nomor 04 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran tahun 2011-2031, kebijakan sektor pariwisata sudah dimunculkan. Pada pasal 39 Kawasan peruntukan pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan peruntukan pariwisata alam berupa Wisata Pantai Cuku Upas, Pantai Sekar Wana, THR Ringgung, Pantai Mutun, Pan mi Kelapa Rapet. Air Terjun Kembar, Air Terjun Ciupang, Air Terjun Gunung Minggu, Air Terjun Abah Uban, Tahura Wan

Abdul Rahman, Pulau Umang-umang. Pulau Tangkil, Pulau Sesorot, Pulau Hawang Lunik, Pulau Tegal, Pulau Mamam, Pulau Pahawang. Pancal Pancur Permai, Pulau chundi. Pulau Balak, Lunik Resort. Al ' Terjun Gunung Tanjung, dengan total luasan kurang lebih 716 (tujuh ratus enam belas) hektar.

- b. Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan terdiri atas wisata budaya Desa Bagelen dan Museum Transmigrasi di Kecamatan Gedong Tataan, dan Pengembangan Wisata Rumah Adat Desa Budaya yang terdapat Kecamatan Way lima, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Punduh Pedada, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Tcgineneng dan Kecamatan Gedong Tataan
- c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan dikembangkan di seluruh kecamatan.

Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata meliputi : pengembangan dan peningkatan aksesibilitas pendukung pada wisata alam dan wisata budaya. pengembangan pemasaran pariwisata, Pengembangan Pendukung pariwisata. peningkatan peran serta masyarakat pada daerah potensi wisata; dan penyusunan rencana pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA).

Dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2021 Pembangunan Sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran, saat ini baru pada taraf pengembangan gagasan. bersifat politis dan sporadic. Artinya, potensi yang ada pada belum dilihat sebagai suatu kesatuan wilayah daerah yang bisa dijadikan unggulan. Oleh karena itu pengembangan kawasan pariwisata perlu segera diprogramkan penanganannya secara terpadu untuk mengantisipasi tata ruang berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran tahun 2011-2031 agar lebih bersifat operasional. Untuk mendorong percepatan telah ditetapkan 4 (empat) Peraturan Bupati tentang Kawasan Perdesaan Pengembangan Pariwisata, diantaranya adalah:

- a. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Pantai, Kuliner dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pesawaran yang meliputi Kecamatan Teluk Pandan dan Padang Cermin.
- b. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Kerajinan Tapis di Kabupaten Pesawaran yang meliputi Kecamatan Negeri Katon.
- c. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Wisata Berbasis Pulau dan Ekosistem Terumbu Karang di Kabupaten Pesawaran yang meliputi Kecamatan Marga Punduh dan Punduh Pidada.
- d. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Wisata Berbasis Air Terjun di Kabupaten Pesawaran yang meliputi Kecamatan Way Ratai dan Padang Cermin.
- e. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Kerajinan Tapis Tangan di Kabupaten Pesawaran Kecamatan Way Ratai dan Padang Cermin

Selanjutnya, untuk lebih mengoptimalkan penataan potensi kawasan seperti telah diungkapkan di atas, maka diperlukan adanya kebijakan lebih lanjut. Hal ini berkaitan dengan upaya pemenuhan keinginan dan kebutuhan wisatawan/ pengunjung. Untuk memberikan kepuasan dan pengalaman berwisata yang berkualitas bagi wisatawan, diperlukan kebijakan untuk melengkapi nilai daya tarik wisata dengan amenities dan aksesibilitas berupa investasi baru sehingga dapat menjadi kawasan wisata, yang diminati oleh wisatawan nusantara maupun manca negara, melalui kebijakan sebagai berikut:

- a. Arah investasi meliputi:
 1. Penyediaan prasarana di dalam kawasan.
 2. Peningkatan akses menuju kawasan.
 3. Pelestarian dan revitalisasi obyek-obyek budaya dan bersejarah.

4. Pengembangan fasilitas dasar dan fasilitas spesifik pariwisata.
- b. Arah kebijakan pengelolaan terdiri atas:
1. Penyiapan peta potensi.
 2. Promosi potensi pariwisata.
 3. Pengembangan budaya tradisional dan kreasi baru yang tetap berpijak pada budaya tradisional.
 4. Pemantauan perkembangan kegiatan pariwisata.

Rangkuman

Sistem perwilayahan yang dihasilkan oleh RIPPNAS ini tidak sekedar merupakan pembagian habis wilayah nasional menjadi beberapa wilayah subnasional namun lebih diutamakan pada adanya suatu hubungan antar wilayah yang bersifat komplementer. Karena itu wilayah-wilayah yang diidentifikasi tidak bersifat mutlak terpisah satu dengan lainnya, tapi memperlihatkan adanya tumpang tindih diberbagai tempat yang merupakan unsur-unsur pangkat antar wilayah. Masalah perwilayahan tersebut merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan secara nasional karena Indonesia menjadi negara tujuan wisata majemuk (multi destinations).
2. Secara keseluruhan sistem perwilayahan tersebut dapat saling menunjang dan mendukung. Kelesuan di wilayah tertentu dapat diimbangi dengan peningkatan di wilayah lain karena satu sama lain dapat berdiri sendiri.
3. Pasar wisata Indonesia yang sangat bervariasi tidak bergantung hanya pada satu jenis produk. tetapi lebih banyak produk yang bervariasi dapat diciptakan.
4. Makin jelasnya 'apa' dipromosikan 'ke mana', mengingat segmen pasar Indonesia yang bervariasi dan memerlukan jenis-jenis produk yang berbeda pula.

Kebijakan Pengembangan Pariwisata dibagi menjadi Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Nasional (KSPN).

Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) ditentukan dengan kriteria:

5. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi yang di dalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata nasional, yang diantaranya merupakan KSPN;
6. Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
7. Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
8. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
9. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Latihan Soal

1. Jelaskan visi dan misi pengembangan pariwisata di Propinsi Lampung
2. Sebutkan dan jelaskan beberapa strategi pengembangan pariwisata Lampung?
3. Jelaskan posisi Kabupaten Pesawaran dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Lampung!

Pustaka Rujukan

- Antariksa,Basuki. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan*. Malang:IntransPublishing
- Aprillia,Theresia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung ; Alfabeta
- Kagungan,Dian. 2019. *Manejemen Pembangunan Daerah*. Bandar Lampung. Aura Publisng
- Sedarmayanti,2014 *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri*. Gramedia.Jakarta

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Lampung!

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2021

Glossary

- Management *ecotourism* = pengelolaan wisata ekologi
- Rippda = Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Daerah

BAB 3

KERANGKA DASAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

A. Kompetensi Dasar

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang kerangka dasar kebijakan pembangunan kepariwisataan, model pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat

a. Tujuan Pembelajaran

Indikator

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian/konsep tentang Manajemen Pembangunan Kepariwisata, *Tourism Law and Hospitality Law*, Arah dan Tujuan Pembangunan Kepariwisata Nasional, Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Riparnas), Kebijakan Pariwisata Kabupaten Pesawaran (Teluk Pandan) Sebagai Obyek Studi, Sistem Dan Dampak Sosial Budaya Pariwisata, Wisatawan dan Pariwisata, Sistem Pariwisata, Dampak Sosial Ekonomi, , serta Pentingnya Teknologi Informasi dalam pengembangan pariwisata

Tujuan Pembelajaran

Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada mahasiswa dasar-dasar teoritik kebijakan rencana induk pengembangan pariwisata nasional, model-model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat

B. Penyajian

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, dan cara bertindak (KKBI, 1987). Istilah kebijakan dikaitkan dengan keputusan atau kewenangan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggungjawab melayani kepentingan umum.

Terdapat beberapa model formulasi kebijakan publik, yaitu : **1)** Model formulasi kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, model ini sering disebut sebagai “*the top down approach*”. Model ini cenderung menekankan perhatian pada aspek manajerial, namun tetap tidak melepaskan diri dari fenomena politik yang terjadi dalam setiap implementasi program. **2)** Model formulasi kebijakan George Edward II, yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. **3)** Model formulasi kebijakan M.S.Grindell, yang berpendapat bahwa kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, oleh banyak pihak disebut sebagai salah satu model implementasi, karena pandangannya dapat dijadikan alat untuk meneropong bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan. Rencana penelitian ini mengadopsi model formulasi kebijakan dari M.S Grindell.

Secara konseptual, penataan atau pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka mencapai tujuan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk berbuat sesuatu. Pemberdayaan dalam arti *enabling* yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* masyarakat guna melakukan sesuatu demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Dahuri dalam Sulistyono (2013) wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau

dari garis pantai (*coast line*), maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas (*boundaries*) yaitu batas yang sejajar garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus garis pantai (*cross shore*).

3.1 Model Pengembangan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat

Model Pengembangan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat atau *Community Based Tourism* (CBT) adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (*local way of life*). CBT sangat berbeda dengan pariwisata massa (*mass tourism*). Menurut Pinel sebagaimana dikutip dalam Muallisin dalam Hadiwijoyo (2012: 71) CBT merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal.

CBT bukanlah bisnis wisata yang bertujuan untuk memaksimalkan profit atau keuntungan bagi investor, CBT lebih terkait dengan dampak pariwisata terhadap masyarakat setempat dan sumber daya lingkungan (*environmental resources*), selain itu CBT lahir dari strategi pengembangan masyarakat dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat rural atau lokal.

Menurut Isnaini Muallisin, 2007 dalam Hadiwijoyo (2012:72) konsep CBT mempunyai prinsip-prinsip yang adapat digunakan sebagai *tool of community development* bagi masyarakat lokal, yakni :

- 1) Mengakui, mendukung dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat
- 2) Melibatkan anggota masyarakat sejak awal pada setiap aspek
- 3) Mempromosikan kebanggaan masyarakat
- 4) Meningkatkan kualitas hidup
- 5) Menjamin sustanbilitas lingkungan

- 6) Memelihara karakter dan budaya lokal yang unik
- 7) Membantu mengembangkan *cross - cultural learning*
- 8) Menghormati perbedaan - perbedaan kultural dan kehormatan manusia
- 9) Mendistribusikan keuntungan secara adil di antara anggota masyarakat
- 10) Menyumbang prosentase yang ditentukan bagi *income* proyek masyarakat.

Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat untuk pertama kalinya di populerkan oleh Murphy 1985 , dalam Hadiwijoyo (2012:87) produk pariwisata secara lokal diartikulasikan dan dikonsumsi, produk wisata dan konsumennya harus *visible* bagi penduduk lokal yang seringkali sangat sadar terhadap dampak turisme. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal, sebagai bagian dari produk turisme, selain itu dari pihak industri juga harus melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Sebab, masyarakat lokal-lah yang harus menanggung dampak kumulatif dari perkembangan wisata dan mereka butuh untuk memiliki input yang lebih besar, bagaimana masyarakat dikemas dan dijual sebagai produk pariwisata.

Model pendekatan masyarakat (*Community approach*) menjadi standar baku bagi proses pengembangan pariwisata di daerah pinggiran, dimana melibatkan masyarakat didalamnya adalah faktor yang sangat penting bagi kesuksesan produk wisata. D'amore dalam Hadiwijoyo (2012: 88) memberikan *guidelines model* bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yakni :

- 1) Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang dilakukan penduduk lokal
- 2) Mempromosikan dan mendorong penduduk lokal
- 3) Pelibatan penduduk lokal dalam industri
- 4) Investasi modal lokal atau wirausaha sangat dibutuhkan
- 5) Partisipasi penduduk dalam even - even dan kegiatan yang luas
- 6) Produk wisata untuk menggambarkan identitas lokal
- 7) Mengatasi problem-problem yang muncul sebelum pengembangan yang lebih jauh.

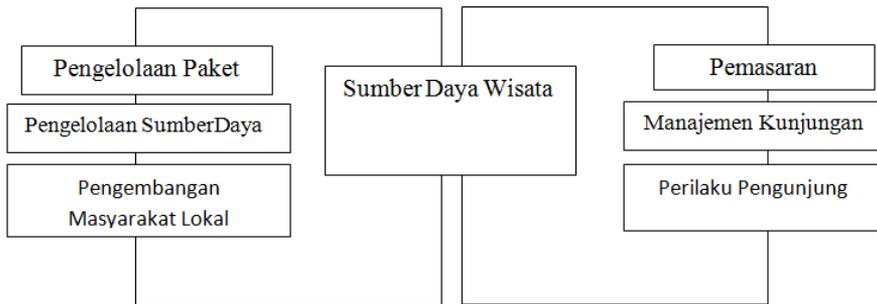
Poin-poin diatas merupakan ringkasan dari *community approach*. Masyarakat lokal harus dilibatkan, sehingga mereka tidak hanya dapat menikmati keuntungan pariwisata dan selanjutnya mendukung pengembangan pariwisata yang mana masyarakat dapat memberikan pelajaran dan menjelaskan secara lebih rinci mengenai sejarah dan keunikan yang dimiliki. Tahun 1990-an, seiring dengan pengembangan interest dalam mengembangkan produk pariwisata yang berkesinambungan, kebutuhan untuk menggunakan bentuk partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang sangat urgen. Bentuk partisipasi masyarakat menjadi esensial bagi pencapaian pariwisata yang berkelanjutan dan bagi realisasi pariwisata yang berkualitas. Supaya pelaksanaan CBT dapat berhasil dengan baik, terdapat elemen – elemen yang perlu diperhatikan, yaitu :

- 1) Sumber daya alam dan budaya
- 2) Organisasi – organisasi masyarakat
- 3) Manajemen
- 4) Pembelajaran (*learning*).

Pembelajaran disini bertujuan untuk membantu proses belajar antara tuan rumah (*host community*) dan tamu (*guest*), mendidik dan membangun pengertian antara cara hidup dan budaya yang beragam, meningkatkan kesadaran terhadap konservasi budaya dan sumberdaya diantara turis dan masyarakat luas (REST, 1997 dalam Isnaini Muallissin, 2007). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi publik berperan sebagai alat untuk memelihara integritas dan otentisitas dan juga kemampuan kompetitif produk wisata Gunn, 1994 dalam Hadiwijoyo (2012: 88).

Model CBT masyarakat bukan lagi sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek yang terlibat aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Model pengembangan ini sangat sesuai untuk karakter atau jenis obyek dan daya tarik wisata yang bertumpu pada sumber daya wisata yang berhubungan langsung dengan masyarakat lokal, seperti yang dikembangkan dalam wisata pedesaan.

Bagan 2.2 Model Pelibatan Masyarakat



Sumber : Puspar UGM, 1999 dalam Hadiwijoyo (2012 : 89)

Walaupun model pengembangan pariwisata perdesaan yang dipakai adalah model pelibatan masyarakat lokal, namun dalam mengembangkan model tersebut terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek pasar, aspek produk, dan aspek kesinambungan dan kelestarian sumber daya wisata (Puspar UGM, 1999).

- 1) Pengembangan produk pariwisata perdesaan perlu mempertimbangkan karakter pasar yang ada. Dari sisi pasar wisatawan, ada dua karakteristik pasar yang terlibat dalam kegiatan wisata perdesaan, yaitu :
 - a) kelompok pasar wisatawan dengan keterlibatan aktif – tidak intensif / ringan, yaitu kelompok wisatawan yang melihat keikutsertaan dalam kegiatan wisata perdesaan lebih merupakan keinginan untuk mencoba aktifitas baru dan sebagai bagian dari pengalaman total yang ingin dirasakan wisatawan .
 - b) kelompok pasar wisatawan dengan keterlibatan aktif dan intensif, yaitu kelompok wisatawan yang menganggap perjalanan wisata dan keikutsertaan dalam kegiatan wisata perdesaan merupakan tujuan / motivasi utama serta terlibat secara aktif dan intensif pada kegiatan wisata yang diikutinya.

- 2) Pengembangan produk pariwisata perdesaan perlu mempertimbangkan aspek pencarian keunikan dan kualitas sebagai motivasi utama wisatawan dalam melakukan perjalanan. Manajemen pengembangan pariwisata perdesaan perlu menekankan pada tuntutan dan karakter motivasi wisatawan, yaitu :
- a) keunikan, terkandung dalam aspek ini adalah pencarian terhadap hal - hal baru , atau atraksi lama dengan lokasi / tantangan baru
 - b) kualitas, terkandung dalam aspek ini adalah pencarian terhadap atraksi / kegiatan yang mencerminkan partisipasi aktif wisatawan baik secara fisik, mental maupun emosional.
- 3) Pengembangan produk pariwisata perdesaan perlu mempertimbangkan kesinambungan dan kelestarian sumber daya wisata yang dikembangkan baik sumber daya wisata alam maupun budaya.

Mengingat pengembangan pariwisata secara keseluruhan bertumpu pada sumber daya wisata alam dan budaya, dan keduanya merupakan aspek yang bersentuhan langsung dengan wisatawan, maka pertimbangan terhadap aspek sumber daya wisata maupun budaya merupakan faktor penting dalam pengembangan desa wisata yang berbasis masyarakat.

3.2. Konsep pemberdayaan masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Rappaport dalam Hadiwijoyo (2012:27) pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak - haknya menurut UU.

Harry Hikmat dalam Hadiwijoyo (2012:27) menyatakan bahwa konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Mc Ardle dalam Hadiwijoyo (2012:27) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang - orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan

tersebut. Orang - orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan, serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Berdasarkan definisi - definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam meningkatkan kemampuan, kemandirian, partisipasi, dan taraf hidup masyarakat.

3.3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Hadiwijoyo (2012:28) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang berjalan terus menerus dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat serta meningkatkan taraf hidupnya, dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama :

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan serta potensi yang dimilikinya
- 2) Menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil kajian
- 3) Mengimplementasikan rencana tersebut
- 4) Secara terus menerus memantau dan mengkaji proses dan hasil kegiatannya (*monitoring* dan evaluasi).

Pemberdayaan masyarakat sering kali dilakukan melalui pendekatan kelompok, dimana anggota kelompok bekerjasama dan berbagi. Untuk mengembangkan kelompok terdapat kegiatan-kegiatan khusus yang berjalan diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan - kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. *United Nation* dalam Hadiwijoyo (2012: 29) mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1) *Getting to know the local community*

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

2) *Gathering knowledge about local community*

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual, dan *custom*, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

3) *Identifying the local leaders*

Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/ tokoh - tokoh masyarakat setempat.

4) *Stimulating the community to realize that it has problem*

Didalam masyarakat yang terikat adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka mempunyai masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

5) *Helping people to discuss their problem*

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

6) *Helping people to identify their most pressing problem*

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

7) *Fostering self confidence*

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

8) *Deciding on a program action*

Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

9) *Recognizing of strength and resources*

Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan – kekuatan dan sumbet – sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

10) *Helping people to continue to work on solving their problem*

Pemberayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, karena itu masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinu.

11) *Increasing peoples ability for self-help*

Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri, untuk itu perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

3.4. Pola pemberdayaan masyarakat

Ross dalam Hadiwijoyo (2012: 34) mengemukakan tiga pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan :

a) *Pola pendekatan Single function*

Adalah program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan yang berasal dari luar masyarakat. Umumnya pola pendekatan ini kurang mendapat respon dari masyarakat, karena program ini sangat asing bagi mereka sehingga sebagai inovasi yang baik sulit diadopsi. Pola ini menjadikan masyarakat tergantung dengan mereka, sehingga prakarsa masyarakat tidak berkembang.

b) Pola pendekatan *the multiple approach*

Adalah pola dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini juga mampu memberdayakan masyarakat lebih optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar.

c) Pola pendekatan *the inner resources approach*

Adalah pola pendekatan yang menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat untuk *concern* akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki.

Terkait dengan pola pemberdayaan tersebut, maka pemberdayaan yang akan dilakukan memerlukan langkah-langkah yang riil dalam penanganannya. Langkah-langkah yang diambil dalam mewujudkan tujuan adalah melalui :

a. Membentuk iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.

Dua hal yang mendasar dalam membentuk iklim bagi masyarakat adalah dengan :

- 1) Menyadarkan masyarakat dan memberikan dorongan/motivasi untuk berkembang. Proses menyadarkan masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk mengenal wilayahnya melalui survey dan analisis. Proses ini disebut dengan *participatory survey and analysis*.
- 2) Memotivasi masyarakat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk menggambarkan dan merencanakan wilayah, yang disebut dengan *participatory design and planning*. Pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat secara psikologis akan memberikan rasa keberpihakan kepada masyarakat.

b. Memperkuat potensi yang ada

Memperkuat dilakukan dengan mengorganisasi masyarakat dalam kelompok- kelompok atau komunitas pembangunan, yang selanjutnya dikembangkan dengan memberikan masukan- masukan/ input serta membuka berbagai peluang- peluang berkembang sehingga masyarakat semakin berdaya.

c. Proses perlindungan (pendampingan)

Secara aplikatif, perlindungan dan pendampingan terhadap kelompok masyarakat bawah dan menengah dilakukan melalui dua hal yaitu :

1) Penguatan akses/ *accessibility empowerment*

Pada pemberdayaan kelompok masyarakat, pendampingan dilakukan melalui menciptakan akses dari kelompok informal kepada kelompok formal, kelompok yang diberdayakan dengan kelompok pemberdaya. Kebutuhan akan akses ini sangat menentukan share dan partisipasi antar *stakeholder* dalam proses pemberdayaan.

2) Penguatan teknis/ *technical empowerment*

Dilakukan sebagai bagian dari kegiatan *advocacy* sehingga dapat diwujudkan peningkatan kapasitas kelompok yang diberdayakan. Keterlibatan secara aktif dari masing- masing *stakeholder* diwujudkan dalam bentuk share nyata seperti program, pendanaan, dan kebijaksanaan (*policy*)

Isue-Isue Strategis Dalam Pengembangan Pariwisata Lampung

Tujuan pembangunan dan pengembangan pariwisata Provinsi Lampung adalah sebagai daerah tujuan wisata terdepan di Indonesia yang menjadi lokomotif pembangunan dan memberikan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Beberapa **isue strategis** pembangunan dan pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung adalah :

a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan pariwisata antar pemangku kepentingan (*stakeholder*)

Peran provinsi mengkoordinasikan pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung pasca Undang-Undang

Pemerintahan Daerah sangat dibutuhkan sebagai koordinator pembangunan lintas wilayah dan lintas sektoral. Koordinasi harus dilakukan di tingkat pemerintahan maupun antara pemerintah-swasta-akademisi-masyarakat umum yang terkait pembangunan dan pengembangan pariwisata

Penyeragaman bentuk operasional pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang bisa diadopsi di seluruh wilayah Propinsi Lampung cenderung dinilai akan menguntungkan banyak pihak. Pengembangan dan pengelolaan pariwisata Provinsi Lampung yang terkoordinir dengan baik dinilai akan menjadi lingkungan yang kondusif bagi iklim investasi pariwisata. Agar tercapai suatu koordinasi yang baik perlu diperhatikan aspek hukum yang dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.

b. Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung yang ramah lingkungan

Kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan terlihat dari munculnya secara konsisten isu pelestarian lingkungan baik dalam isu strategis pembangunan Provinsi Lampung, isu pengembangan pariwisata Provinsi Lampung maupun yang dirumuskan dalam forum-forum diskusi. Pengembangan produk pariwisata dengan demikian harus menggunakan pendekatan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) yang meletakkan pilar-pilar ekologi, sosial budaya dan sosial ekonomi dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata

c. Pariwisata sebagai alat mencapai pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung

Ketimpangan pembangunan juga terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung terutama untuk daerah-daerah yang relatif belum maju menyuarakan kepentingan pemerataan pembangunan di daerah masing-masing. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam hal ini akan menghambat pembangunan dan pengembangan pariwisata secara keseluruhan. Olehkarena itu diperlukan jalinan kerjasama yang sinergis antar daerah di Provinsi Lampung

d. Aspek sosial ekonomi dari pengembangan pariwisata Provinsi Lampung

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas hidup

masyarakat melalui pengembangan pariwisata merupakan suatu isu strategis. Sumberdaya manusia yang dilibatkan dalam pengembangan pariwisata harus memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, pariwisata harus dapat memberikan manfaat sosial, tidak hanya manfaat ekonomi.

e. Pembentukan jati diri masyarakat Lampung

Pariwisata harus bisa menjadi alat pelestarian dan pembentukan identitas masyarakat Lampung. Pemanfaatan unsur-unsur budaya dan tradisi untuk pariwisata seharusnya tidak dilihat sebagai komoditas ekonomi semata

f. Peningkatan kualitas produk pariwisata

Isu peningkatan kualitas produk pariwisata sebenarnya secara implisit merupakan gabungan dari isu-isu strategis lain karena keberhasilan produk pariwisata ditentukan oleh beragam aspek. Selain daya tarik yang bernilai tinggi dan keunikan, suatu produk wisata harus didukung pengelolaan dan iklim pengembangan yang baik. Daya tarik yang dinilai menjadi kekuatan Lampung adalah daya tarik lingkungan alam.

C. Rangkuman

Terdapat beberapa model formulasi kebijakan publik, yaitu : **1)** Model formulasi kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, model ini sering disebut sebagai “*the top down approach*”. Model ini cenderung menekankan perhatian pada aspek manajerial, namun tetap tidak melepaskan diri dari fenomena politik yang terjadi dalam setiap implementasi program. **2)** Model formulasi kebijakan George Edward II, yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. **3)** Model formulasi kebijakan M.S.Grindell, yang berpendapat bahwa

kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, oleh banyak pihak disebut sebagai salah satu model implementasi, karena pandangannya dapat dijadikan alat untuk meneropong bagaimana suatu kebijakan diimplementasikan. Rencana penelitian ini mengadopsi model formulasi kebijakan dari M.S Grindell.

Secara konseptual, penataan atau pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka mencapai tujuan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk berbuat sesuatu. Pemberdayaan dalam arti *enabling* yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity*, dan *capability* masyarakat guna melakukan sesuatu demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Dahuri dalam Sulistyono (2013) wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coast line*), maka wilayah pesisir mempunyai dua macam batas (*boundaries*) yaitu batas yang sejajar garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak

D. Latihan Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan CBT (*Community Based Tourism*)?
2. Beri penjelasan tentang beberapa Isue-Isue Strategis Dalam Pengembangan Pariwisata Lampung!
3. Sebutkan dan jelaskan dasar-dasar teoritik Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional !

E.Pustaka Rujukan

- Antariksa,Basuki. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan*. Malang:IntransPublishing
- Aprillia,Theresia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung; Alfabeta
- Kagungan,Dian. 2019. *Manejemen Pembangunan Daerah*. Bandar Lampung. Aura Publisng
- Sedarmayanti,2014 *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri*. Gramedia.Jakarta

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Lampung!

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2021

Glossary

- cross shore* = garis lurus pantai
- Community approach* = Model pendekatan masyarakat
- Boundaries* = batas yang sejajar garis pantai(*long shore*)
- cross shore* =batas yang tegak lurus garis pantai
- Community Based Tourism (CBT)* = pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan.
- mass tourism* = ariwisata massa

BAB 4

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Kompetensi Dasar

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu memahami teknologi dan informasi dalam pembangunan

Indikator

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian/konsep tentang pembangunan, perencanaan pembangunan, manajemen pembangunan, indikator pembangunan, peran serta masyarakat dalam pembangunan, keseimbangan antar wilayah dalam pembangunan, teknologi informasi dalam pembangunan, pengembangan bisnis daerah

Tujuan Pembelajaran

Memberikan pemahaman dan penjelasan kepada mahasiswa tentang dasar teoritik

Perencanaan dan manajemen pembangunan serta teknologi dan informasi dalam pembangunan

B. Penyajian

1. Pendahuluan

Dalam RPJPN, Indonesia memiliki visi yang sangat baik, yakni menjadi negara maju, mandiri, adil, dan makmur. Terwujudnya visi tersebut akan menyamakan kita dengan Negara-negara maju lainnya di dunia.

Namun, kita menghadapi berbagai kendala untuk merealisasikannya, seperti masalah kompetensi SDM, budaya organisasi (sinergitas, efisiensi, efektivitas, produktivitas) peran serta masyarakat, serta “teknologi komunikasi dan informasi”

Pada bagian ini akan dibahas peran TIK dalam menyelesaikan berbagai persoalan manajemen dan mewujudkan visi “Pembangunan”. Meskipun pemerintah kabupaten/kota dapat menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan dan mewujudkan visi dengan cara yang biasa, Namun akan memakan banyak waktu, biaya, energi, Perlu upaya yang lebih mudah, murah, efisien dan efektif, yakni dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pemerintah kabupaten/kota umumnya sudah memiliki TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), namun di beberapa kabupaten/kota umumnya baru sebatas sarana informasi, promosi, layanan publik, penganggaran, dan tender. Tik belum difungsikan secara optimal sebagai sarana database pembangunan, sarana komunikasi, koordinasi, sinergitas antar-OPD, sarana kerja sama pemerintah - swasta - masyarakat, sarana pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, sarana pembelajaran dan pertumbuhan organisasi, sarana pengawasan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, dan sebagainya

A. Database Pembangunan

Dalam proses pembangunan, khususnya dalam kegiatan perencanaan dibutuhkan berbagai data dan informasi, seperti data kondisi fisik dasar (topografi, kemiringan lereng, jenis tanah, geologi, hidrologi, curah hujan dan sebagainya), penggunaan lahan, tata bangunan, kondisi sosial kependudukan, budaya, ekonomi, infrastruktur, utilitas, kelembagaan, peran serta masyarakat, pembiayaan pembangunan, dan sebagainya. Data tersebut dapat berupa data numerik atau data spesial (peta). Data tersebut diperlukan sebagai bahan analisis untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau rencana pembangunan.

Data dan analisis tersebut umumnya diperlukan oleh setiap OPD. Oleh karena itu, data tersebut sebaiknya tidak disimpan oleh OPD tertentu atau individu tertentu karena dapat menyulitkan pihak lain yang membutuhkannya. Bisa jadi karena tidak tahu, satu OPD menganggarkan pencarian data lapangan yang sebenarnya data tersebut sudah ada di OPD yang lain. Hal yang sama bisa terjadi dengan kegiatan analisis dan penyusunan rencana. Sistem database yang kurang baik dapat menyebabkan duplikasi kegiatan. Hal tersebut dapat menyebabkan pemborosan anggaran dan pembangunan menjadi tidak efisien dan efektif.

Persoalan tersebut tidak akan terjadi, jika pemerintah kabupaten atau kota memiliki sistem database berbasis TIK. Data yang diperoleh dan dianalisis oleh satu OPD, kemudian diunggah kedalam sistem database berbasis web untuk digunakan bersama. Disamping lebih hemat waktu, energi dan biaya, penyimpanan data dan hasil analisis dalam database akan memudahkan proses perbaikan data secara berkelanjutan. Data yang disimpan dalam komputer individu hanya bisa dimanfaatkan oleh individu yang bersangkutan. Tapi data yang disimpan di database dapat dimanfaatkan oleh seluruh OPD. Materi database tidak terbatas hanya pada data dan analisis, tetapi juga dapat memuat materi hasil penelitian, hasil penyusunan rencana, hasil pelaksanaan rencana, laporan hasil monitoring/pengawasan, serta data dan informasi aspirasi masyarakat, dsb.

B. Sarana Komunikasi, Koordinasi, dan Sinergitas antar – OPD

Komunikasi dan koordinasi antar-OPD biasanya dilakukan melalui forum-forum rapat. Persoalannya adalah jumlah pegawai yang berkompeten untuk mengikuti rapat di beberapa kabupaten/kota biasanya terbatas. Disisi lain, agenda rapat cukup banyak sehingga peserta rapat menjadi terbatas dan hasil rapat menjadi kurang optimal. Disamping itu, agenda rapat yang terlalu banyak akan menyita banyak waktu dan tenaga.

Masalah tersebut dapat diatasi dengan fasilitas E-Meeting atau E-Discussion. Disamping hemat waktu dan biaya, diskusi menggunakan TIK juga akan lebih efektif. Diskusi dapat pula

dilakukan dengan pendekatan campuran, yakni pendekatan rapat tatap muka dan E-Meeting. Beberapa rapat cura pendapat/ diskusi dapat dilakukan dengan E-Meeting. Sedangkan rapat khusus untuk pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara tatap muka.

Diskusi dengan menggunakan TIK akan lebih hemat waktu karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Komunikasi menggunakan TIK juga akan mengatasi masalah tumpang tindih data, analisis, rencana dan berbagai kegiatan lainnya

C. Sarana Komunikasi dan Kerjasama Pemerintah-Swasta-Masyarakat

Keberhasilan pembangunan kabupaten/kota sangat bergantung pada partisipasi masyarakat/ swasta. Rencana pembangunan yang ditetapkan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh partisipasi masyarakat/swasta. Oleh karena itu, diperlukan media yang cukup mudah, murah, terbuka, dan efektif untuk membangun komunikasi dan kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat.

Pemerintah kabupaten/kota dapat menggunakan TIK untuk mengembangkan komunikasi dan kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota dapat menyampaikan rencana pembangunan serta peluang-peluang kerjasama pemerintah-swasta-masyarakat melalui TIK. Masyarakat/perguruan tinggi/swasta yang berminat, selanjutnya dapat mengajukan proposal melalui TIK.

D. Sarana Pelayanan Publik

TIK dapat digunakan sebagai sarana pelayanan publik dalam bentuk layanan administrasi, barang, dan jasa. Layanan administratif adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen dokumen ini antara lain berupa kartu tanda penduduk (KTP), akte pernikahan, akte kelahiran, akte kematian, buku pemilik

kendaraan bermotor (BPKB), Surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), izin mendirikan bangunan (INB), paspor, sertifikat kepemilikan/penguasa tanah dan sebagainya.

Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.

E. Sarana Pembelajaran dan Pertumbuhan Organisasi

Salah satu kendala dalam manajemen pembangunan di beberapa kabupaten/kota adalah kompetensi SDM dan budaya organisasi. Kendala ini diatasi dengan penggunaan TIK. Persoalan kompetensi dapat diatasi dengan memanfaatkan program-program komputer, seperti untuk menganalisis fisik dasar, kesesuaian lahan, daya dukung lahan, daya tampung ruang, analisis penggunaan lahan, tata bangunan, analisis transportasi, perumahan, infrastruktur, analisis kependudukan, sosial, ekonomi, kesejahteraan, masyarakat, analisis masalah lingkungan, pembiayaan pembangunan, kelembagaan, analisis pengambilan keputusan, dan sebagainya.

TIK juga dapat dimanfaatkan untuk membantu peningkatan kompetensi SDM, yakni dengan mengembangkan fasilitas e-learning, berbagai pengalaman antarseksi/bidang/OPD, bahkan antarkabupaten/kota dan negara. Peningkatan kompetensi juga dapat dilakukan dengan mengembangkan dan menerapkan Standar Operating Procedure (SOP), intruksi kerja atau manual kerja secara elektronik yang dilengkapi format-format kerja berbasis TIK yang mudah digunakan bagi siapa saja. Teknologi informasi dan komunikasi dapat pula berperan dalam membangun organisasi kabupaten/kota yang maju dan unggul. TIK dapat didesain/dikembangkan untuk mengotomasi sistem kerja, mengubah cara-cara kerja yang manual, dan tatap muka dengan fasilitas elektronik dan virtual.

F. Sarana Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Budaya gotong-royong dahulu menjadi ciri masyarakat kita, sekarang ciri tersebut hampir memudar. Dalam kenyataannya, pembangunan kita membutuhkan budaya gotong-royong. Oleh karena itu, budaya tersebut perlu dikembangkan kembali. TIK dapat memfasilitasi terbangunnya kembali budaya gotong-royong tersebut, yakni melalui pembinaan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Kunci pembangunan berbasis partisipasi masyarakat adalah kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Pemerintah perlu menyampaikan dengan terbuka rencana pembangunan kabupaten/kota kepada masyarakat, termasuk anggaran dan sumber pembiayaan. Rencana tersebut perlu disampaikan dengan jelas, detail, dan mudah dipahami masyarakat. Misalnya dengan didukung peta *webGis*, yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan di sekitar tempat tinggalnya. Aturan-aturan dalam rencana tersebut perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jika masyarakat kurang mengerti, pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan layanan Tanya/jawab secara *online*.

Melalui fasilitas online, pemerintah kabupaten/kota juga dapat menyediakan *e-community development* untuk pembinaan partisipasi masyarakat, mengembangkan berbagai skema pemberdayaan masyarakat, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Melalui TIK, pemerintah kabupaten/kota dapat lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, misalnya dengan menyampaikan berita-berita terbaru tentang pembangunan, menyelenggarakan berbagai bantuan/hibah dan lomba pembangunan berbasis masyarakat di setiap desa/kelurahan. Pemerintah kabupaten/kota juga dapat mensosialisasikan kegiatan lomba tersebut melalui TIK, menampilkan profil peserta dan juara lomba, proses penjurian, pemberian penghargaan, dan sebagainya.

G. Sarana Pengawasan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Tik dapat digunakan sebagai sarana pengawasan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dengan cara setiap OPD menggunggah rencana kegiatan disertai dengan laporan pelaksanaannya ke dalam sistem database. Dengan demikian, tim pengawas akan lebih mudah dan cepat dalam mengevaluasi hasil pelaksana rencana. Proses pengawasan di lapangan juga dapat ditunjang oleh fasilitas CCTV dan laporan dari masyarakat.

Dengan demikian sistem database berbasis TIK, kegiatan pembangunan akan menjadi lebih transparan dan akuntabel bagi semua stakeholder, Kekurangselarasan antara rencana dan realisasinya akan segera dapat ditemukan dan diperbaiki, Dengan demikian, proses pembangunan kabupaten/kota dapat berjalan dengan perbikan yang berkelanjutan.

H. Sarana Promosi Kabupaten/Kota

Tik dapat berperan dalam meningkatkan promosi kabupaten/kota ke seluruh dunia. Pemerintah kabupaten/kota perlu meningkatkan promosi produk unggulan kabupaten kota, seperti produk wisata, hasil pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industry, jasa, dan sebagainya. Produk-produk tersebut perlu dipasarkan keluar daerah, khusus nya ke luar negeri untuk diekspor agar roda ekonomi kabupaten/kota terus berputar, masyarakat dapat lebih sejahtera dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus meningkat. Peningkatan ekspor merupakan cirri dari peningkatan daya saing yang menjadi prasyarat terwujudnya visi Indonesia maju, mandiri, adil, dan makmur.

I. Sarana dalam Manajemen Aset

Pemerintah kabupaten/kota memiliki berbagai asset berupa barang, lahan, bangunan, kendaraan, software, dan sebagainya. Aset tersebut umumnya cukup banyak dan tersebar di berbagai tempat. Perlu data yang akurat tentang asset tersebut meliputi jenis, jumlah/luas, tahun pengadaan, kondisi saat ini, nilai, status pengelolaan, potensi pengembangan, dan sebagainya.

Penggunaan TIK dalam manajemen asset dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

2. Definisi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut (TIK), Merupakan instrument penting dalam mengoptimalkan proses Pembangunan, di daerah ataupun di sebuah Negara, Karena, Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peranan di dalam pengelolaan manajemen, yang ditunjukkan melalui peningkatan mutu pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan memberikan peningkatan jaminan keamanan, Semua ini harus didasari dengan melakukan sebuah pengembangan sistem informasi dan Komunikasi.

C. Rangkuman Pentingnya Menerapkan “Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah “

Pembangunan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Daerah, Sangat penting, Karena dengan pembangunan TIK tersebut, Akses masyarakat daerah dalam memperoleh informasi akan lebih mudah untuk diperoleh, Akses informasi yang dimaksud dalam hal ini adalah : Kesadaran akan pentingnya pendidikan, Informasi khusus mengenai bagaimana meningkatkan kualitas mutu pertanian dan perkebunan di daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan adanya sosialisasi mengenai program pengenalan alat teknologi pada masyarakat daerah (yang umumnya untuk mempermudah masyarakat daerah dalam melakukan pekerjaannya serta memberi informasi terkait cara mendapatkan modal bagi masyarakat daerah dengan mengandalkan keahlian yang mereka miliki. Dengan contoh-contoh tersebut dapat memberikan gambaran, bahwasanya pemerintah daerah perlu menerapkan pemerataan Pembangunan Teknologi ataupun Informasi komunikasi di daerah-daerah”, yang khususnya di daerah terpencil yang bahkan belum pernah, atau belum adanya upaya pembangunan di daerah tersebut, Maka penerapan tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk dari peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.

D.Latihan Soal

Jelaskan pentingnya menerapkan pembangunan TI dan Komunikasi di daerah!

E.Pustaka Rujukan

- Syaodih,Ernandy. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*. Bandung : Pt Refika Aditama
- Siagian,Sondang. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Syafarudin,2008. *Meluruskan Tujuan Pemekaran Daerah*. Artikel, Radar Lampung 4 November 2008
- Suyono,Haryono. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Mengantar Masyarakat Mandiri*. Grasindo. Jakarta
- Usman,Sanyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.Pustaka Pelajar. Yogyakarta

BAB 5

KONSEP PENGEMBANGAN PARIWISATA LAMPUNG

A. Kompetensi dasar :

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa memahami tentang konsep-konsep dasar pengembangan pariwisata Lampung

Indikator

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian/konsep tentang Manajemen Pembangunan Kepariwisata, *Tourism Law and Hospitality Law*, Arah dan Tujuan Pembangunan Kepariwisata Nasional, Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Riparnas), Kebijakan Pariwisata Kabupaten Pesawaran (Teluk Pandan) Sebagai Obyek Studi, Sistem Dan Dampak Sosial Budaya Pariwisata, Wisatawan dan Pariwisata, Sistem Pariwisata, Dampak Sosial Ekonomi, , serta Pentingnya Teknologi Informasi dalam pengembangan pariwisata

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan tentang Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Konsep Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah, Konsep Keterkaitan Antar Sektor Dalam Pengembangan Pariwisata, Konsep Keterkaitan Pariwisata, Perdagangan dan Investasi, Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan,

Konsep Keterkaitan Koridor Jalur Wisata serta Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Propinsi Lampung

B. Penyajian

5.1 Konsep Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung

1. Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
2. Konsep Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
3. Konsep Keterkaitan Antar Sektor Dalam Pengembangan Pariwisata
4. Konsep Keterkaitan Pariwisata, Perdagangan dan Investasi
5. Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan
6. Konsep Keterkaitan Koridor Jalur Wisata

5.2 Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Propinsi Lampung

5.3 Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Pariwisata

Propinsi Lampung

- a. Pengembangan Perwilayahan
- b. Pengembangan Produk wisata
- c. Pengembangan Pasar dan Pemasaran
- d. Pengembangan Sumberdaya Manusia
- e. Pengembangan Kelembagaan

5.4 Strategi Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung

Konsep Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung

1. Konsep Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung tahun 2012-2031, Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Propinsi Lampung berprinsip pada:

- a. Terjaminnya keberlanjutan sumberdaya wisata dan sumberdaya pendukung pembangunan pariwisata Lampung untuk kesejahteraan masyarakat
- b. Terintegrasinya pembangunan kepariwisataan Lampung dengan lingkungan alam, budaya dan manusia serta menjamin

perubahan yang terjadi akibat pembangunan pariwisata dapat di terima oleh lingkungan

- c. Terpadunya perencanaan dan pengembangan pariwisata Lampung yang disusun pemerintah dan otoritas yang berwenang dengan seluruh stakeholders pariwisata Lampung

2. Konsep Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Sebagaimana tertuang dalam **Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031**, pada dasarnya pariwisata merupakan sektor yang relatif dapat dikembangkan di mana saja dengan menciptakan daya tarik dan pengembangan aksesibilitas serta melakukan kegiatan promosi sefektif kepada segmen pasar wisatawan yang menjadi sasaran. Pengembangannya ini tentu saja harus mengacu pada rambu-rambu pembangunan dan norma-norma budaya. Atas dasar ini, maka pembangunan dan pengembangan pariwisata Lampung yang berprinsip pada pengurangan ketimpangan wilayah akan :

- d. Memprioritaskan pengembangan pariwisata di daerah-daerah yang relatif belum begitu berkembang dan atau daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi Lampung serta tidak memprioritaskan pengembangan daerah yang sudah maju dan padat.
- e. Memprioritaskan dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang, khususnya prasarana jalan di Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Propinsi dan atau kawasan wisata yang belum berkembang namun berpotensi untuk menjadi Kawasan Wisata Unggulan

Semua sektor dan pihak terkait termasuk para pengambil keputusan harus mendukung dan memberikan komitmen yang terus menerus dalam pemerataan pembangunan di Provinsi Lampung, dengan konsep ini pariwisata menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan wilayah Lampung.

3. Konsep Keterkaitan Antar Sektor Dalam Pengembangan Pariwisata

Pengembangan wilayah melihat sektor-sektor sebagai suatu sistem yang saling berkaitan. Sektor ekonomi yang utama di suatu wilayah perlu dikembangkan dalam kerangka saling melengkapi dan mendukung dengan sektor lain. Pariwisata sangat multi sektoral dan tidak dapat maju dan berkembang dengan sendirinya tanpa dukungan dari sektor lain. Di lain lain pihak, sektor lain dapat memanfaatkan pariwisata untuk bersinergi secara positif sehingga saling mendukung dan menguntungkan.

Dengan kreativitas dan inovasi perencanaan, pariwisata dapat dikembangkan seiring dengan sektor lainnya tanpa harus memunculkan konflik. Untuk itu pembangunan dan pengembangan pariwisata Provinsi Lampung harus:

- a. Diselaraskan dengan sektor ekonomi dasar yang berkembang atau berpotensi di daerah yang bersangkutan
- b. Secara kreatif menggali potensi, baik yang tangible maupun yang intangible dari potensi sumberdaya sektor-sektor di wilayah
- c. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan sektor lain dalam berbagai tahapan perencanaan, implementasi, dan pengawasan pembangunan serta dengan jelas menguraikan siapa melakukan apa diantara sektor-sektor yang ada dalam pemerintahan, industri pariwisata, masyarakat dan stakeholders pariwisata lainnya.

(Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031)

4. Konsep Keterkaitan Pariwisata, Perdagangan dan Investasi

Sebagaimana tertuang dalam **Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031**, mengintegrasikan kegiatan pariwisata, perdagangan dan investasi dalam suatu wadah bersama merupakan hal strategis, yaitu kegiatan yang satu dapat mempengaruhi dan mendukung kegiatan yang lain. Kegiatan pariwisata mengakibatkan pergerakan orang ke suatu tempat untuk berwisata, dan kemudian mengkonsumsi berbagai barang dan jasa.

Lebih lanjut kegiatan tersebut dapat memunculkan dorongan untuk melakukan perdagangan dan berinvestasi

Dengan dasar pemikiran di atas, maka pariwisata dapat diangkat dan dikembangkan untuk menunjang perdagangan untuk kemudian menarik investor yang sudah mengenal daerah yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan suasana dan iklim yang kondusif sehingga wisatawan atau pengunjung yang datang mendapatkan kesan dan citra baik tentang daerah Lampung. Perdagangan yang kemudian bergulir dari kunjungan tersebut juga perlu didukung oleh kemudahan dan kejelasan prosedur serta berbagai insentif lainnya sehingga dapat berjalan lancar. Dalam hal ini investasi yang diharapkan dapat terjadi jika semua pihak turut mendukung dan memberi kemudahan.

Dengan demikian pembangunan dan pengembangan pariwisata Lampung harus:

- (1) Diarahkan untuk mendorong kegiatan perdagangan dan investasi melalui penciptaan suasana yang kondusif dengan kejelasan dan kemudahan prosedur dengan tanpa mengabaikan aturan dan norma yang tertera pada konsep-konsep lainnya
- (2) Terintegrasi dalam suatu kegiatan promosi dengan perdagangan dan investasi
- (3) Mendorong berkembangnya industri kecil dan menengah yang dikelola masyarakat lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata setempat

5. Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Provinsi Lampung difokuskan pada kawasan wisata dengan skala Provinsi/Nasional/Internasional yang diunggulkan. Kawasan wisata unggulan (KWU) Provinsi Lampung merupakan kawasan wisata dengan skala Provinsi/Nasional/Internasional yang memiliki peran strategis karena sumberdaya wisata yang dimiliki, letak yang strategis (mudah dijangkau) dan diminati wisatawan (sesuai trend wisata) ataupun karena permasalahan yang dimilikinya yang terkait dengan issue strategis pengembangan wilayah Lampung.

Kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi Lampung dapat terdiri dari beberapa daya tarik wisata dan berada dalam lebih dari satu daerah administrasi. Lokasi atau intensitas kunjungan wisatawan di kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi menyebabkan kawasan wisata unggulan dapat berfungsi sebagai "show window" Lampung atau juga menyebarkan wisatawan ke daerah-daerah lain di wilayah Propinsi Lampung.

Kawasan wisata dengan skala Kabupaten/Kota atau skala lokal dapat menjadi kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat lokal. Pengembangan kawasan wisata skala ini diharapkan dapat mendukung kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi Lampung. Keragaman daya tarik wisata di setiap kawasan unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung secara bersama-sama dapat memperkuat daya saing produk wisata Lampung. Konsep-konsep pengembangan tersebut menjadi kerangka dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan Provinsi Lampung.

(Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031)

6. Konsep Keterkaitan Koridor Jalur Wisata

Sebagaimana tertuang dalam **Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031**, kawasan wisata unggulan (KWU) yang telah ditentukan dalam Rencana Pengembangan Pariwisata skala Provinsi, selain menjadi *entry point* juga diharapkan sebagai pemicu penyelenggaraan pariwisata bagi daerah-daerah atau kawasan lain yang berada dalam satu koridor pengembangan dengan **kawasan wisata unggulan (KWU)** sebagai **kawasan strategis pariwisata (KSP)**. Koridor/jalur Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung di bagi menjadi 3 (tiga) koridor, yaitu koridor 1 (jalur Barat), koridor 2 (jalur Timur), dan koridor 3 (jalur Selatan)

Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Krui dan Tanjung Setia diharapkan dapat menjadi pemicu motivasi percepatan pembangunan kepariwisataan

bagi destinasi wisata di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus serta kabupaten-kabupaten yang berada dalam satu koridor, seperti Kabupaten Pesawaran, Pringsewu dan Kabupaten Lampung Utara.

Kawasan wisata unggulan (KWU) Kota Bandar Lampung dan Teluk Kiluan dapat berfungsi bagi pengembangan destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus dan **Pesawaran**. Pengembangan kawasan wisata unggulan Kota Bandar Lampung dan Teluk Kiluan akan memberikan dorongan positif terhadap pengembangan wilayah di sekitarnya dan tidak hanya sebatas pada pengembangan di sektor pariwisata. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pariwisata merupakan aktifitas multisektoral dan multidimensi yang memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) maupun keterkaitan ke depan (*upward linkages*) yang luas

5.7 Pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Propinsi Lampung

Menurut **Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031**) Daya tarik wisata yang dimiliki Provinsi Lampung sangat beragam jenisnya. Wisata alam, budaya, maupun buatan tersebar di wilayah Lampung dengan keunikan lokal yang khas yang memperkuat daya saing produk wisata Lampung. Keragaman daya tarik wisata menjadi tema utama dalam menentukan pengelompokan daya tarik wisata untuk membentuk kawasan wisata unggulan propinsi Lampung. Hal ini juga terkait dengan sejarah alam dan budaya Lampung yang terangkum dalam sejarah Gunung Krakatau, termasuk hutan, sungai, laut dengan budaya yang berpengaruh yaitu budaya pegunungan, budaya pesisir, dan pengaruh budaya kolonial.

Kawasan wisata unggulan Propinsi Lampung yang terbentuk memiliki cakupan wilayah yang berbeda luasnya dengan batas imajiner Kabupaten/kota yang berada dalam cakupannya. Setiap kawasan wisata unggulan memiliki sumberdaya wisata utama/kegiatan yang telah berkembang atau sumberdaya wisata alain atau kegiatan wisata lain yang diusulkan untuk dikembangkan

serta potensi pasar wisatawan eksisting yang akan menjadi sasaran pasar, baik dilihat dari asal wisatawan, maupun karakteristik wisatawanannya. Sumberdaya wisata utama suatu kawasan wisata unggulan (KWU) nantinya akan menjadi tema produk wisata utama yang diunggulkan dari kawasan wisata unggulan tersebut.

(Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031)

5.8 Kebijakan, Strategi dan Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung

Kebijakan pengembangan pariwisata Propinsi Lampung sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung tahun 2012-2031 adalah :

a. Pengembangan Perwilayahan

Pertimbangan dalam kebijakan pengembangan perwilayahan pariwisata Propinsi Lampung adalah :

1. masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah di Propinsi Lampung
2. masih terpusatnya pengembangan pariwisata Lampung di beberapa kawasan tertentu saja, padahal potensi daya tarik wisata yang dimiliki daerah lain pun berpeluang dan potensial untuk dikembangkan
3. masih terdapat potensi dan atau permasalahan wilayah yang dapat dipecahkan melalui pengembangan pariwisata yang terencana dan terintegrasi misalnya permasalahan lingkungan yang terjadi di suatu wilayah dapat diatasi dengan pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
4. konsep pengembangan pariwisata yang tidak mengenal batas administratif; bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang tidak mengenal batas ruang dan wilayah; pergerakan wisatawan tidak bisa dibatasi hanya pada suatu daerah tertentu
5. kondisi aksesibilitas intra dan antar wilayah yang mempengaruhi tingkat perkembangan daya tarik wisata

Lampung, termasuk dalam hal pengelompokan obyek dan daya tarik wisata yang memperkuat daya saing suatu kawasan wisata

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kebijakan pengembangannya adalah:

- (i) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung difokuskan pada pengembangan kawasan wisata unggulan propinsi untuk memperkuat daya saing pariwisata Lampung
- (ii) Pengembangan kawasan wisata unggulan (KWU) propinsi didasarkan pada data tarik wisata unggulan yang membentuk suatu tema atau konsep yang berbeda antar kawasan dalam kerangka saling melengkapi dan memperkuat daya tarik yang ditawarkan, dengan tidak memnadang batas administratif daerah
- (iii) Pengembangan kawasan wisata unggulan (KWU) propinsi dan penyediaan sarana prasarana penunjang pariwisata diprioritaskan di daerah yang termasuk ke dalam kawasan wisata unggulan propinsi
- (iv) Pusat pengembangan pariwisata di setiap kawasan wisata unggulan provinsi berfungsi sebagai pusat kegiatan wisata dan penyedia fasilitas, serta sebagai pusat penyebaran pengembangan kegiatan wisata ke wilayah lain yang masih termasuk dalam satu kawasan wisata

b. Pengembangan Produk wisata

Dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengembangan produk pariwisata provinsi Lampung adalah :

1. Potensi, permasalahan dan isu strategis pengembangan produk wisata Lampung ditinjau dari keragaman, sebaran dan perbedaan daya tarik maupun pengelolaan dan peningkatan kualitas produk wisata Lampung
2. Kecenderungan permintaan pariwisata/pasar wisatawan regional, nasional dan internasional yang sangat dinamis
3. Kebutuhan pengembangan basis ekonomi wilayah yang potensial untuk dikembangkan melalui pariwisata

4. Potensi untuk membuka peluang bisnis dan investasi tidak hanya bagi pengusaha skala besar tetapi juga skala kecil dan menengah termasuk masyarakat lokal Lampung

Atas dasar pertimbangan di atas, maka kebijakan pengembangan produk wisata di kawasan unggulan propinsi Lampung (KWU) Lampung adalah:

- (i) Produk wisata Lampung dikembangkan dalam kerangka memberikan manfaat bagi lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Lampung secara berkelanjutan dan bertanggungjawab
- (ii) Produk wisata unggulan yang dikembangkan adalah produk wisata yang unik, tradisi khas Lampung dan mencerminkan jati diri masyarakat Lampung yang berakar pada alam dan budaya Lampung
- (iii) Produk wisata unggulan dikembangkan untuk menciptakan keragaman daya tarik wisata Lampung sehingga berdaya saing dan memperkuat daya tarik provinsi khususnya dalam tingkat nasional
- (iv) Pengembangan produk wisata unggulan harus mendukung upaya konservasi/preservasi dan bahkan rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung spesifik setiap daerah
- (v) Pengembangan produk wisata unggulan diarahkan pada produk wisata berkualitas yang memenuhi standar nasional dan internasional melalui pengawasan berkelanjutan

c. Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Beberapa pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata Provinsi Lampung adalah:

1. kondisi produk wisata Lampung yang beragam dan citra yang ingin di bangun di mata masyarakat dan wisatawan, baik nasional maupun internasional
2. kondisi dan karakteristik wisatawan eksisting dan potensial serta segmentasi pasar wisatawan Lampung

3. karakteristik sasaran pasar wisatawan yang dituju Provinsi Lampung dan ditargetkan di kawasan wisata unggulan (KWU) propinsi
 4. kemajuan sistem dan teknologi informasi kepariwisataan maupun teknologi lainnya yang sangat pesat
- Atas dasar pertimbangan di atas maka kebijakan pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata di KWU (kawasan wisata unggulan) propinsi Lampung adalah:

1. mengembangkan segmen pasar wisatawan *eksisting* Lampung sambil menumbuhkembangkan pasar wisatawan potensial lainnya
2. mengembangkan segmen pasar wisatawan *eksisting* Lampung berdasarkan karakteristik KWU maupun produk wisata utama yang ditawarkan
3. mengembangkan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik pasar wisatawan yang menjadi sasaran di tiap kawasan wisata unggulan propinsi
4. mengembangkan pendekatan pemasaran pariwisata terpadu, dengan tema yang jelas, terorganisir, efisien dan efektif

d. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Pertimbangan dalam penentuan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata propinsi Lampung adalah:

1. berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi Lampung, terkait dengan sumberdaya manusia, khususnya kualitas SDM yang belum merata
2. kondisi dan kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata propinsi Lampung saat ini
3. kesadaran akan pentingnya kualitas SDM dan pentingnya investasi di bidang Sumber Daya Manusia pariwisata

Atas dasar pertimbangan di atas, maka kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata di KWU propinsi Lampung adalah:

1. peningkatan kuantitas dan kualitas SDM terutama di KWU propinsi Lampung baik profesional maupun tenaga terampil
2. peningkatan kualitas pelayanan pariwisata khususnya SDM yang berhadapan langsung dengan wisatawan
3. pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata di daerahnya
4. peningkatan pemahaman, pengetahuan, kesadaran seluruh pelaku pariwisata termasuk masyarakat terhadap pariwisata

e. Pengembangan Kelembagaan

Dasar pertimbangan dalam pengembangan kelembagaan kepariwisataan propinsi Lampung adalah : (i) efisiensi kelembagaan pariwisata (ii) peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga serta (iii) peningkatan kemitraan antara institusi/lembaga. Atas dasar pertimbangan maka kebijakan pengembangan di kawasan wisata unggulan propinsi Lampung:

1. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan antarwilayah/kabupaten di propinsi Lampung antara provinsi Lampung dengan propinsi lain melalui lembaga terkait pariwisata dan budaya termasuk komitmen dari para pengambil keputusan yang terkait dengan pariwisata
2. Pengembangan kelembagaan, sistem dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif
3. Pengembangan kelembagaan dalam hal perpajakan dan retribusi
4. Pengembangan kelembagaan dalam pemasaran dan promosi

5.9 Strategi Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung

Keragaman kondisi alam dan budaya di Provinsi Lampung memiliki implikasi tersendiri dalam pengembangan pariwisata provinsi. Sebagai sebuah produk pariwisata, keragaman tersebut menawarkan potensi bagi wisatawan untuk mendapatkan pengalaman wisata yang berharga.

Nilai tambah dari keragaman produk berpotensi untuk meraih pasar wisatawan yang lebih luas dan beragam. Bila dikembangkan

dengan benar keragaman produk juga berpotensi untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan. Keberhasilan produk dalam menggerakkan pariwisata akan menghasilkan berbagai dampak dan efek positif yang diharapkan menjawab berbagai isu strategis pembangunan pariwisata Provinsi Lampung.

Dalam pengembangan pariwisata tingkat Provinsi, harus diarahkan secara kolektif untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung. Adapun strategi pengembangan pariwisata Provinsi Lampung berprinsip pada:

a. Aktifitas pariwisata yang terintegrasi

Pariwisata bukan merupakan suatu kegiatan tunggal atau kegiatan yang berdiri sendiri, namun kegiatan yang saling terkait dan bersifat timbal balik antar alam, budaya dan rekayasa manusia. Pariwisata merupakan aktifitas perjalanan sehingga diperlukan tempat persinggahan sebelum menuju tujuan utamanya

b. Pengembangan Berbasis Masyarakat

Keberadaan obyek wisata tidak terlepas dari masyarakat yang berada dalam kawasan tersebut, mereka hidup di dan dengan alamnya dengan membentuk suatu budaya. Ketika berbicara tentang pengembangan dengan mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat lokal, artinya tidak terlepas dari pertimbangan unsur kearifan lokal (*local wisdom*)

c. Pola Pembangunan Regional

Pembangunan pariwisata tidak terlepas dari pembangunan wilayah. Hal ini disebabkan pengembangan pariwisata sangat mahal karena memiliki keterkaitan dengan banyak sektor seperti transportasi, pertanian dan lain-lain. Dengan demikian pengembangan pariwisata harus selaras dengan pola pembangunan regional.

d. Jaringan atau keterhubungan (*Networking*)

Wisatawan dalam aktifitas wisatanya tentunya ingin memperoleh banyak manfaat, sehingga membutuhkan banyak obyek wisata untuk mencapai kepuasan maksimal. Wisatawan

cenderung lebih menyukai berwisata ke tempat-tempat yang sudah menyediakan sekumpulan paket aktifitas wisata.

e. Pendanaan kolaboratif

Pariwisata itu mahal, dalam arti membutuhkan pendanaan yang kolaboratif baik secara langsung (dalam konteks bisnis wisata) maupun tidak langsung (sebagai sektor pendukung pariwisata)

f. Pemasaran yang terencana dan terintegrasi

Pemasaran yang terencana dan terintegrasi mutlak diperlukan, karena pemasaran wisata membutuhkan biaya yang cukup mahal. Untuk mengantisipasinya, maka kegiatan pemasaran harus tepat materi, tepat media dan tepat sasaran. Dalam konteks terintegrasi maksudnya terkait dengan aktifitas bidang lainnya seperti sentra perdagangan, perekonomian, pertanian dalam arti luas, pelestarian budaya dan lain-lain.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut diatas, maka arahan pengembangan kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi Lampung meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu :

- a. kawasan wisata (obyek daya tarik wisata yang meliputi kegiatan:
 - (i) perencanaan berupaya menyusun *master plan* dan *site plan*
 - (ii) penataan obyek utama wisata, prasarana, dan sarana serta fasilitas wisata
- b. pengelolaan manajemen yang meliputi :
 - (i) peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan wisata yang dilakukan dengan swakelola atau kerjasama dengan pihak ketiga (*investor*)
 - (ii) peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam hal mengelola obyek wisata (aspek teknis) serta kebijakan dan administrasi (aspek manajerial dan kebijakan)

- c. komponen penunjang (terkait instansi lain dan sektor lain penunjang pariwisata) yang meliputi aspek-aspek perencanaan dan penataan kawasan wisata, penyediaan sarana prasarana yang berkaitan dengan utilitas serta amenitas berwisata dan ranah kebijakan oleh institusi pemegang kekuasaan serta kewenangan

(Sumber : Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031)

C. Rangkuman

Sebagaimana tertuang dalam **Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031**, pada dasarnya pariwisata merupakan sektor yang relatif dapat dikembangkan di mana saja dengan menciptakan daya tarik dan pengembangan aksesibilitas serta melakukan kegiatan promosi sefektif kepada segmen pasar wisatawan yang menjadi sasaran. Pengembangannya ini tentu saja harus mengacu pada rambu-rambu pembangunan dan norma-norma budaya. Atas dasar ini, maka pembangunan dan pengembangan pariwisata Lampung yang berprinsip pada pengurangan ketimpangan wilayah akan :

- a. Memprioritaskan pengembangan pariwisata di daerah-daerah yang relatif belum begitu berkembang dan atau daerah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi Lampung serta tidak memprioritaskan pengembangan daerah yang sudah maju dan padat.
- b. Memprioritaskan dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang, khususnya prasarana jalan di Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Propinsi dan atau kawasan wisata yang belum berkembang namun berpotensi untuk menjadi Kawasan Wisata Unggulan

D. Latihan Soal

1. Berikan analisis anda tentang arahan pengembangan kawasan wisata unggulan (KWU) Propinsi Lampung yang meliputi 3 (tiga) komponen utama!!!
2. Mengapapeningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dalam hal mengelola obyek wisata (aspek teknis) serta kebijakan dan administrasi (aspek manajerial dan kebijakan) sangatlah penting dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan?

E.Pustaka Rujukan

- Antariksa, Basuki. 2016. *Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan*. Malang:IntransPublishing
- Aprillia, Theresia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung ; Alfabeta
- Kagungan, Dian. 2017. *Kebijakan Penatakelolaan pariwisata Di Daerah Otonom Baru*
- Kagungan, Dian. 2019. *Manejemen Pembangunan Daerah*. Bandar Lampung. Aura Publisng
- Sedarmayanti, 2014 *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri*. Gramedia.Jakarta

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Lampung!

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2016-2021

Glossary

Jaringan atau keterhubungan = *Networking*
Kolaboratif = kerjasama

BAB 6

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PROPINSI LAMPUNG

A. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa memahami tentang visi misi tujuan dan sasaran pariwisata Propinsi Lampung

Indikator

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian/konsep tentang Manajemen Pembangunan Kepariwisataan, *Tourism Law and Hospitality Law*, Arah dan Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Riparnas), Kebijakan Pariwisata Kabupaten Pesawaran (Teluk Pandan) Sebagai Obyek Studi, Sistem Dan Dampak Sosial Budaya Pariwisata, Wisatawan dan Pariwisata, Sistem Pariwisata, Dampak Sosial Ekonomi, serta Pentingnya Teknologi Informasi dalam pengembangan pariwisata

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang visi misi tujuan dan sasaran pariwisata Propinsi Lampung

B.Penyajian

6.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung

1. *Visi dan Misi Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung Tahun 2012-2031*

Visi pengembangan pariwisata Lampung adalah :

Mewujudkan Lampung sebagai daerah berbudaya dan tujuan wisata yang unggul, berdaya saing.

Misi pengembangan pariwisata Lampung adalah :

- (1) melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah untuk mengisi dan mewarnai pembangunan daerah
- (2) meningkatkan sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) meningkatkan kegiatan promosi, pemasaran pariwisata, yang didukung sarana prasarana promosi yang handal
- (4) mengembangkan produk/obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang unggul dan berdaya saing, mampu menarik minat dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan
- (5) meningkatkan keterpaduan, kesinergian, dan keharmonisan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antar sektor, antar pemangku kepentingan pusat dan daerah
- (6) mewujudkan kelembagaan dan pelayanan masyarakat dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

6.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata

Tujuan pengembangan pariwisata Propinsi Lampung adalah:

1. mendayagunakan nilai budaya dan kekayaan budaya daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengenalan kesenian dan kekayaan budaya
2. meningkatkan kreatifitas budaya dan seni pertunjukkan sebagai dayadukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri

3. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah untuk mewarnai dan mendorong pembangunan pariwisata khususnya dan pembangunan daerah umumnya
4. meningkatkan kreatifitas budaya dan seni pertunjukan sebagai daya dukung lingkungan yang kondusif bagi pembentukan jati diri
5. meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang mampu memberikan pelayanan bermutu bagi wisatawan
6. meningkatkan sarana dan parasarana promosi serta kegiatan promosi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke daerah Lampung
7. meningkatkan kualitas produk dan obyek daya tarik wisata (ODTW) yang nyaman bagi wisatawan dan mampu meningkatkan lama tinggal dan kualitas pengeluaran wisatawan

Adapun sasaran pengembangan pariwisata Propinsi Lampung adalah :

1. terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengenalan kesenian dan kekayaan budaya
2. terciptanya peningkatan kreatifitas budaya dan seni pertunjukan untuk meningkatkan/pembentukan jati diri
3. terpeliharanya pelestarian dan pengembangan serta apresiasi seni, budaya masyarakat untuk menunjang pembangunan pariwisata dan mendorong pembangunan daerah

6.3 Strategi Pengentasan Kemiskinan Desa Pesisir melalui Optimasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekowisata berbasis Kearifan Lokal

a. Pentingnya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat

Pengetahuan bagi masyarakat menjadi sangat penting untuk dapat dilakukan secara terus menerus. Pengetahuan ini tidak hanya berupa pendidikan formal tetapi juga pendidikan non formal. Pendidikan formal dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat desa .

b. Meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang mayoritas memiliki tingkat perekonomian yang rendah, serta rendahnya akses informasi yang didapat oleh masyarakat setempat. Masyarakat masih memerlukan adanya pembangunan di bidang transportasi dan komunikasi. Rendahnya akses informasi mengakibatkan adanya kesenjangan olehkarena itu kemandirian masyarakat perlu dirangsang melalui program-program pemberdayaan termasuk pemberdayaan terhadap kaum perempuan/ibu yang membawa masyarakat pada suatu upaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan dengan orang lain.

C. Rangkuman

Kemandirian pada masyarakat secara tidak langsung akan membangun rasa kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa dan potensi sumberdaya alam yang dimilikinya, karena sesungguhnya ketergantungan yang akan terjadi adalah ketergantungan pada sumberdaya alam lokal yang harus dijaga dan dilindungi. Hal lain yang harus dilakukan adalah **mengatur investasi** setiap pendatang yang berusaha menguasai sumberdaya alam milik masyarakat

D.Latihan Soal

1. Tuliskan dengan singkat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Propinsi Lampung
2. Jelaskan pula beberapa strategi pengembangan pariwisata Lampung yang anda ketahui!

E.Pustaka Rujukan

Syaodih, Ernandy. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*. Bandung :PT. Refika Aditama

Siagian, Sondang. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara. Jakarta

Suyono, Haryono. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Mengantar Masyarakat Mandiri*. Grasindo. Jakarta

Usman, Sanyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Rippda Provinsi Lampung

Ripda Kabupaten Pesawaran

Glossary

pendekatan *Single function* = program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan yang berasal dari luar masyarakat

BAB 7

KEBIJAKAN TATAKELOLA PARIWISATA KABUPATEN PESAWARAN

A. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa memahami tentang kebijakan tatakelola pariwisata di Kabupaten Pesawaran sebagai Daerah otonom baru

Indikator

Diharapkan setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian/konsep tentang Manajemen Pembangunan Kepariwisata, *Tourism Law and Hospitality Law*, Arah dan Tujuan Pembangunan Kepariwisata Nasional, Kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (Riparnas), Kebijakan Pariwisata Kabupaten Pesawaran (Teluk Pandan) Sebagai Obyek Studi, Sistem Dan Dampak Sosial Budaya Pariwisata, Wisatawan dan Pariwisata, Sistem Pariwisata, Dampak Sosial Ekonomi, serta Pentingnya Teknologi Informasi dalam

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menjelaskan kebijakan penatakelolaan pariwisata di Kabupaten Pesawaran termasuk *innovative government* bidang pembangunan lainnya yang digagas pemerintah kabupaten Pesawaran

B. Penyajian

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah penyangga ibukota Propinsi Lampung yang diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran, semula Kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Secara keseluruhan luas Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 km², Kecamatan Padang Cermin adalah Kecamatan terluas di Kabupaten ini (317,63km²). Sebagian besar sumberdaya wisata di Kabupaten Pesawaran berkaitan dengan wisata tirta, baik yang merupakan wisata alam, maupun wisata buatan. Sumberdaya wisata tirta yang diintegrasikan dengan sosial kultural masyarakat akan memberikan sajian atraksi wisata yang menarik dari Kabupaten Pesawaran ini.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor penggerak pembangunan, olehkarena Kabupaten Pesawaran memiliki berbagai kawasan wisata unggulan baik berbasis alam maupun budaya. Data yang kami peroleh dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran, bahwa salah satu upaya konkrit Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Panduan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesawaran (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah/Ripda). Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) adalah dokumen perencanaan dalam pengembangan/pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran.

Berkenaan dengan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran, Pemerintah kabupaten Pesawaran mempersiapkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) Kabupaten Pesawaran memuat konsep rencana pengembangan *destinasi wisata industri, pemasaran dan sumber daya manusia kelembagaan Pariwisata Kabupaten Pesawaran selama 15 tahun ke depan*. Tujuan disusunnya Ripda Kabupaten Pesawaran adalah agar pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran dapat terarah, komprehensif dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Salah satu tahap dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) Kabupaten Pesawaran adalah dengan merumuskan kesepakatan dalam menentukan kebijakan dan strategi pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesawaran melalui *focuuus grup discussion*. Dengan demikian semua satuan kerja perangkat daerah, kepala Kecamatan, kepala Desa dan *stakeholder* terkait dengan pengembangan pariwisata dapat memberikan masukan dan sarannya dengan harapan agar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) Kabupaten Pesawaran benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Penatalaksanaan kawasan wisata Kabupaten Pesawaran jelas akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat khususnya, dan pembangunan pariwisata Lampung secara umum sekaligus menstimulan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Lampung tahun 2016 adalah 4 juta wisatawan lokal dan 95 ribu wisatawan mancanegara.

Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pariwisata menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Salah satunya penyusunan regulasi untuk kawasan wisata, antara lain zonasi kawasan wisata, jasa pariwisata, dan standar penggunaan lahan wisata. Data yang Tim peroleh dari narasumber Bupati Kabupaten Pesawaran, menyatakan bahwa banyak pelaku usaha yang belum memahami regulasi pengelolaan wisata, misalnya bibir pantai yang dimanfaatkan secara pribadi dan kegiatan reklamasi yang dapat mengganggu ekosistem laut. Pengembangan destinasi wisata tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran saja, tetapi harus melibatkan para *stakeholders* dan tidak terkecuali peran serta masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi antara lain *pembangunan akses yang melalui lahan milik pribadi*

Demikian pula halnya dengan kawasan wisata desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan, menurut Bupati, telah banyak akses yang diperbaiki seperti jalan yang memasuki kawasan wisata pantai Mutun, pantai Dewi Mandapa, dan kawasan Muncak, untuk wilayah

yang belum tersentuh itupun disebabkan karena kendala administratif semata. Sejumlah mitra/stakeholder turut membantu sarana prasarana pendukung wisata, salah satunya bantuan dari Bank Indonesia yang berupa 300 unit *life jacket* berdasarkan *Memory of Understanding (MoU)* dengan pihak Bnak Indonesia pada tanggal 24 Juli 2017 yang lalu. Selain dengan pihak Bank Indonesia, *Memory of Understanding* juga dilakukan dengan beberapa stakeholder dalam rangka pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pesawaran terutama kerjasama pembangunan dermaga yang sejak tahun 2017 ini akan ditata mulai dari kantung parkir serta alat transportasi.

Selanjutnya, Kepala Seksi Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, menyatakan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran belum memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) olehkarena itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan memaksimalkan sumber daya dari sektor pariwisata. Data yang kami peroleh selanjutnya bahwa kondisi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran tidak berbeda dengan tiga tahun yang lalu dengan kata lain tidak adanya retribusi pelayanan, sebab menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa memungut retribusi pariwisata jika memiliki atau mengelola obyek wisata. Oleh karena itu satuan kerja yakni Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran berusaha mencari terobosan dengan menyusun **regulasi** agar pariwisata dapat menyumbang PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Pesawaran, yang diwujudkan dalam Peraturan Bupati tentang pengelolaan pariwisata yang dalam tahap awal sarannya adalah Desa Batumenyan yakni dermaga Ketapang dan Pulau Pahawang (melakukan sinergitas dengan pihak desa untuk pengelolaan pariwisata melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang berupa kerjasama pengelolaan pariwisata)..

Potensi Pariwisata di Kabupaten Pesawaran

Dalam rangka pengembangan pariwisata dengan potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pesawaran, diantaranya wisata pantai, wisata alam, wisata pulau, Pemerintah Kabupaten Pesawaran tetap menggandeng pihak swasta dan stakeholder lainnya, hal mendasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam mewujudkan Bumi Wisata 2019 yaitu dengan penyediaan infrastruktur dasar berupa pembangunan jalan sebagai akses dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Pesawaran, men-jamin rasa aman dan nyaman kepada wisatawan, serta memberdayakan masyarakat lokal untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Tahun 2016 dan 2017 Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah mendapatkan program PNPM Mandiri Pariwisata dari kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dalam rangka pengembangan Desa Wisata, yaitu Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Padang Cermin pengembangan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten diantaranya Pemberdayaan Kelompok Usaha Sablon, Usaha Keripik, Usaha Terasi, pembelian dua buah kapalperahu untuk transportasi antar pulau, pembuatan gerai untuk penjualan makanan di tempat wisata, serta peningkatan sarana dan prasarana budaya untuk pentas seni di Tempat Hiburan Wisata.

Dalam rangka pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran juga melakukan pembinaan terhadap musisi dan pencarian bakat dalam bidang musik dan telah membentuk Pesawaran band. Prestasi bidang pariwisata yang diraih oleh Kabupaten Pesawaran diantaranya juara 1 Lomba Mekhanai Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011, Juara II Lomba Mulie Tingkat provinsi Lampung Tahun 2011, Juara III Lomba Tari Kreasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011, Juara I Lomba Nyanyi lagu POP Daerah Lampung Kategori pria Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012, Juara Muli Mekhanai kategori Persahabatan dalam Lomba Mulie Mekhanai Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012, Juara III pameran Pembangunan Lampung Fair Tahun 2012. Pemanfaatan dan pengembangan pariwisata di kabupaten Pesawaran beserta obyek-obyeknya dapat dilakukan sesuai dengan potensi yang ada, jenis-jenis wisata tersebut antaralain:

1. Wisata Bahari, berupa pantai dan laut
2. Wisata Tirta, berupa sungai dan air terjun
3. Wisata Agro, berupa perkebunan kelapa sawit, kopi, karet, budidaya kerang mutiara dan ikan kerapu
4. Wisata Gunung, berupa gunung dan pegunungan
5. Wisata Alam, berupa flora dan fauna di Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
6. Wisata minat khusus, berupa *snorkeling* (menyelam di permukaan air), *diving* (menyelam di bawah permukaan air) dan *mountain bike* (lomba balap sepeda gunung)
7. Wisata Budaya, berupa arsitektur bangunan/rumah adat, peninggalan sejarah dan adat, peninggalan sejarah dan adat istiadat Lampung.

Masih berkenaan dengan kebijakan pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama dengan *stakeholder*, akademisi, media massa, pelaku usaha serta pemangku kepentingan merumuskan beberapa kesepakatan pada forum *Focuss Group Discussion* (FGD) dalam upaya sinergitas pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesawaran yang dihadiri oleh Dinas Pariwisata Kab Pesawaran selaku pengggagas kegiatan, para kepala Desa pesisir kabupaten Pesawaran, Dewan Riset Propinsi Lampung, akademisi, media massa,serta unsur pimpinan daerah (Uspika) Kabupaten Pesawaran, yang berupa (i) Komitmen bekerjasama menumbuhkembangkan pariwisata di Kabupaten Pesawaran berupa program aksi nyata. (ii) mengembangkan pariwisata Kabupaten Pesawaran berbasis pelestarian alam, kelestarian lingkungan, kearifan lokal dengan prinsip Sapta Pesona, (iii) menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui desa wisata berkelanjutan (iv) mewujudkan pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat, (v) menjalin koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* serta kolaborasi dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesawaran.

Tujuan diadakannya FGD adalah memperoleh kesepahaman demi keberlangsungan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Selain itu upaya pengembangan pariwisata tidak cukup diregulasi dan perencanaan saja yang berupa RIPARDA (rencana induk pengembangan pariwisata) atau peraturan Gubernur saja, tetapi diperlukan “***sinergi terkonsep***” yang berupa ***kebijakan strategis daerah yang mendorong percepatan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pesawaran.***

Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Lampung antara lain dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Pesawaran. Dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menegaskan bahwa Visi pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran adalah menjadi destinasi wisata unggulan dan berdaya saing tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi pariwisata yang besar untuk dikembangkan di Kabupaten Pesawaran antara

lain mulai dari pantai, pegunungan, air terjun, pulau, serta perkebunan yang menarik untuk dikunjungi sebagai tujuan wisata. Selain itu, Kabupaten Pesawaran juga cukup strategis dalam konteks pengembangan kepariwisataan, terutama potensi alamnya, mengingat letak Kabupaten Pesawaran tidak jauh dari ibukota Provinsi Lampung dan mudah untuk dijangkau. Upaya tersebut diwujudkan dengan menjadikan Kecamatan Teluk Pandan sebagai salah satu wilayah destinasi wisata bahari di Kabupaten Pesawaran dengan objek wisata antara lain:

Tabel 1.1
Objek wisata Kecamatan Teluk Pandan

Blok	Objek Wisata	Lokasi
Blok Queen Arta	1. Pantai Queen Arta	Desa Suka Jaya Lempasing
Blok Pantai Mutun	2. Pantai Mutun Asri	
	3. Pantai Mutun Haruna Jaya	
	4. Pulau Tangkil	
Blok Ringgung	5. Pantai Sari Ringgung	Desa Sidodadi Desa Hurun
	6. Pulau Lahu	
	7. Pulau Tegal	
Blok Mahitam	8. Pantai Ketapang	Desa Gebang Desa Batu Menyan
	9. Pulau Mahitam	

Sumber : Forum Group Discussion Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pariwisata, 2018.

Berdasarkan data diatas, objek-objek wisata yang ada di Kecamatan Teluk Pandan merupakan wisata bahari. Pengembangan pariwisata di Kecamatan Teluk Pandan sudah cukup berkembang dengan adanya sarana yang tersedia seperti pondokan, *restaurant*, mushola, gazebo, toilet, *cottage*, dan wahana air. Selain itu, terdapat pula potensi yang menambah nilai lebih yaitu adanya *camping ground* di Pantai Mutun, pemancingan di keramba ikan Pantai Sari

Ringgung, penangkaran ikan hiu di Pantai Mutun Haruna Jaya, habitat burung elang sebagai wisata edukasi di Pulau Lahu, ekosistem terumbu karang di Pantai Mahitam, konservasi mangrove di Pantai Ketapang, serta potensi yang paling dibutuhkan yaitu aksesibilitas menuju lokasi objek wisata sudah baik yaitu jalan aspal. (Forum Group Discussion Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pariwisata, pada 27 September 2018). Akan tetapi, dampak berkembangnya objek wisata Kecamatan Teluk Pandan hingga mengakibatkan membludaknya jumlah kunjungan wisatawan yang menyebabkan kemacetan disepanjang jalan Kecamatan Teluk Pandan. Berikut jumlah pengunjung objek wisata Kecamatan Teluk Pandan.

Tabel 1.2
Jumlah Pengunjung Objek Wisata Kecamatan Teluk Pandan

No	Objek Wisata	2016	Selisih	2017	Selisih	2018
1.	Pantai Queen Arta	3.987	324	4.311	7.414	11.725
2.	Pantai Mutun (Ms Town Beach)	29.214	12.401	41.615	69.560	111.175
3.	Pantai Mutun Haruna Jaya	27.286	24.234	51.521	27.454	78.975
4.	Pulau Tangkil	12.560	1.324	13.884	24.004	37.888
5.	Pantai Sari Ringgung	10.005	20.116	21.121	37.521	58.642
6.	Pulau Lahu	115	99	214	404	618
7.	Pulau Tegal	920	90	1.010	977	1.987
8.	Pantai Ketapang	954	81	1.035	1557	2.592
9.	Pulau Mahitam	942	67	1.009	949	1.958
Jumlah		85.983	58.736	135.720	169.840	305.560

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, 2018

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata Kecamatan Teluk Pandan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mengingat aktivitas wisata di Kecamatan Teluk Pandan mengalami kunjungan wisatawan yang terus meningkat, itu tentu saja menyebabkan timbulnya beban bagi Kecamatan Teluk Pandan. Hal itu dapat membuat daya dukung yang bisa berkurang sebagai akibat aktivitas wisatawan, disamping itu mendatangkan penerimaan juga memberikan dampak pada lingkungan sekitar

Penelitian Kagungan (2018) menyatakan bahwa Pembangunan dan pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran telah dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau dengan menggunakan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) atau CBT. Pengembangan destinasi wisata tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran saja, tetapi harus melibatkan para *stakeholders* dan tidak terkecuali **penguatan peran** kelompok sadar wisata yang terbentuk secara swadaya atas inisiatif masyarakat, dengan harapan agar penatakelolaan tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesawaran. *Saran/rekomendasi yang penting sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah:* Pemerintah Kabupaten Pesawaran hendaknya segera mengalokasikan anggaran guna penyelesaian penyusunan Panduan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pesawaran (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah/Ripda). Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) adalah dokumen perencanaan dalam pengembangan/pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Ripda) Kabupaten Pesawaran memuat konsep rencana pengembangan *destinasi wisata industri, pemasaran dan sumber daya manusia kelembagaan pariwisata Kabupaten Pesawaran selama 15 tahun ke depan*. Tujuan disusunnya Ripda Kabupaten Pesawaran adalah agar pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran dapat terarah, komprehensif dan menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

C. Latihan Soal

1. Membentuk kelompok diskusi, silakan berikan analisis tentang pembangunan pariwisata Kabupaten Pesawaran apakah sudah melibatkan partisipasi masyarakat lokal (melibatkan kelompok sadar wisata (pokdarwis)?
2. Apakah pariwisata Kabupaten Pesawaran telah mampu memberikan kontribusi berupa PAD?

D. Pustaka Rujukan

- Syaodih, Ernandy. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*. Bandung :PT. Refika Aditama
- Siagian, Sondang. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Suyono, Haryono. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Mengantar Masyarakat Mandiri*. Jakarta: Grasindo
- Usman, Sanyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

Rencana induk pengemabangan pariwisata daerah Provinsi Lampung

Rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Pesawaran

Glossary

Innovantive Government= Peemerintah Daerah yang Berinovasi

Memory of Understanding (MoU) = perjanjian kerjasamayang dituangkan dalam draft perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

BAB 8

PAYUNG HUKUM BERKAITAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA SATU DESA SATU DESA WISATA DI KABUPATEN PESAWARAN

8.1 Payung Hukum yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan wilayah ekoSebagaimana tertuang dalam **Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2012-2031**, bahwa pengembangan kegiatan ekowisata alam yang mengarah ke pelestarian alam pantai, teridentifikasi sekitar 7 (tujuh) titik obyek wisata pantai yang berada pada zona kawasan wisata unggulan (KWU) Kabupaten Pesawaran yakni:

No	Nama Obyek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi
1	Sekar Wana	Alam	Lempasing
2	Pantai Ringgung	Alam/buatan	Lempasing
3	Kelara	Buatan/alam	Hanura
4	Mutun Asri	Buatan/alam	Lempasing
5	Pulau Tembikil	Alam	Lempasing
6	Queen Arta	Buatan/alam	Lempasing
7	Mutun MS	Buatan/alam	Lempasing

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Lampung, 2016
wisata desa pesisir Kecamatan Teluk Pandan

Selain itu Pemerintah Kabupaten Pesawaran menetapkan destinasi wisata “satu desa satu destinasi wisata” atau yang diistilahkan dengan “**one village one destination**” dengan berpedoman pada

1. Pasal 12 huruf a,b,c,d dan e Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, serta untuk melaksanakan program prioritas pembangunan pariwisata maka dipandang perlu menetapkan Destinasi Wisata Satu Desa Satu Desa Wisata di Kabupaten Pesawaran;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

BAB 9

PENGEMBANGAN DAERAH PENYANGGA WISATA

9.1 Daerah Penyangga Wisata

Pembangunan pariwisata di daerah tujuan wisata tidak akan dapat berjalan maksimal jika tidak didukung dengan keberadaan daerah penyangga wisata. Daerah penyangga merupakan daerah yang mengelilingi kawasan (Soemarwoto, 1985). Menurut Departemen Kehutanan dalam Maryono (2008), daerah penyangga merupakan satuan lahan dengan karakteristik umum sebagai berikut: (1) keadaan fisik satuan lahan memungkinkan untuk dilakukan budidaya; (2) lokasinya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai daerah penyangga; (3) tidak merugikan segi-segi ekologi atau lingkungan hidup apabila dikembangkan sebagai daerah penyangga. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, wilayah yang berbatasan dengan kawasan suaka alam ditetapkan sebagai daerah penyangga. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa daerah penyangga adalah suatu daerah yang mengelilingi daerah kawasan suaka alam. Daerah penyangga merupakan daerah yang layak untuk dilakukan pengembangan, sehingga mampu menjadi daerah yang menopang kawasan suaka alam.

Daerah penyangga terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, areal berhutan, kawasan lindung, koridor dan habitat satwa liar, desa hutan, kawasan pesisir dan laut, kawasan budidaya, areal pertanian dan perkebunan. Dalam penelitian ini, kawasan strategis pariwisata Kabupaten Pesawaran yaitu Kecamatan Teluk Pandan

yang merupakan kawasan pesisir laut dan laut membutuhkan daerah penyangga sebagai daerah yang menopang kegiatan kepariwisataan. Untuk mendukung kegiatan kepariwisataan daerah penyangga perlu dilakukan pengembangan.

Berdasarkan uraian tersebut, pengembangan daerah penyangga wisata memiliki tujuan yaitu:

- A. Aspek sosial mencakup, usaha-usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kesejahteraan individu, keluarga dan seluruh masyarakat di dalam wilayah tersebut. Salah satu contohnya yaitu dengan mengurangi pengguran dan menyediakan sarana dan prasarana kehidupan yang baik seperti pemukiman, fasilitas transportasi, kesehatan, air minum dan lainnya.
- B. Aspek ekonomi mencakup, usaha-usaha mempertahankan dan memacu perkembangan dan pertumbuhan kesinambungan dan perbaikan kondisi-kondisi ekonomis yang baik bagi kehidupan dan memungkinkan pertumbuhan yang lebih tinggi.
- C. Aspek wawasan lingkungan mencakup, pencegahan kerusakan dan pelestarian terhadap keseimbangan lingkungan. Aktivitas ekonomi apapun yang manusia lakukan dengan mengambil sesuatu dari atau memanfaatkan potensi alam akan mempengaruhi keberlangsungan alam itu sendiri.

Selain itu, pengembangan daerah penyangga wisatamenurut Masykur Riyadi dalam Bappenas (2000) dapat ditempuh dengan cara:

1. Peningkatan sumber daya manusia adanya peningkatan keahlian. Dalam hal ini, pengembangan daerah peyangga wisata akan mengalami perkembangan jika kualitas sumber daya manusia nya meningkat. Karena sumber daya manusia merupakan aset penting dalam pengembangan suatu daerah. Maka peningkatan sumber daya manusia akan sangat berdampak pada perkembangan daerah penyangga wisata.
2. Pengembangan kelembagaan dan aparatStruktur kelembagaan dan aparat pemerintah daerah selama ini mencerminkan sistem pemerintahan berjenjang. Semakin lengkapnya perangkat peraturan dan perundang-undangan mengenai

penataan ruang di setiap propinsi dan kabupaten/kota dapat menjadi acuan aparat daerah dalam untuk mengelola potensi yang ada didaerahnya. Dalam hal ini pengembangan kelembangaan dan aparat menjadi salah satu hal yang penting dalam pengembangan daerah. Tentunya pengembangan daerah penyangga wisata tidak luput dari peran kelembangaan dan aparat.

3. Pelayanan masyarakat yang efisien Keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan perlu diperbesar, sejalan dengan kewenangan daerah yang semakin besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya. Dalam hal ini pengembangan daerah penyangga wisata membutuhkan peran masyarakat agar dapat memberikan pelayanan yang baik.

MODEL PENGEMBANGAN DAERAH PENYANGGA WISATA (SECOND LINE TOURISM)

Dengan demikian daerah peyangga wisata merupakan daerah alternatif kegiatan kepariwisataan di kawasan pariwisata. Selanjutnya yang dimaksud ***pengembangan daerah penyangga wisata adalah mengembangkan daerah lain diluar destinasi utama sebagai alternatif kedua atau second line tourism dengan melakukan beberapa strategi yang mampu menjadi cara mengembangkankan kepariwisataan.*** Dalam penelitian ini *second line tourism* dari kawasan pariwisata Kecamatan Teluk Pandan adalah Kecamatan Way Ratai. Berdasarkan penjabaran diatas, adapun indikator keberhasilan pengembangan daerah penyangga wisata yaitu menurut Badan Perencanaan Daerah (Bappeda : 2017) meliputi:

1. Produktivitas, artinya pengembangan daerah penyangga wisata dapat diukur dari kemampuan mengembangkan wilayahnya, sehingga dapat dilihat bahwa pengembangan yang dilakukan cukup banyak menghasilkan yang dikembangkan.
2. Efisiensi, artinya pengembangan daerah penyangga wisata berkaitan dengan meningkatnya kemampuanteknologi/sistem pembangunan, sehingga akan menciptakan tepat guna dan tepat sasaran dalam pelaksanaan pengembangan.

3. Partisipasi masyarakat, artinya pengembangan daerah dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan suatu program di suatu wilayah, sehingga pelaksanaan pengembangan akan lebih mudah dilakukan dengan tingkat antusias masyarakatnya.

A. Community Based Tourism (CBT)

Menurut Hudson dan Timothy dalam Sunaryo (2013:139) pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* merupakan pelibatan masyarakat dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat melalui upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal. Serta kelompok lain yang memiliki antusias atau minat kepada kepariwisataan, dengan pengelolaan pariwisata yang memberi peluang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pariwisata berbasis masyarakat berkaitan dengan adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat sebagai pengelola dalam pembangunan kepariwisataan yang ada.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata terdiri dari atas dua maksud, yaitu dalam mekanisme pengambilan keputusan. dan partisipasi dalam menerima keuntungan.dari pengelolaan desa wisata. Oleh karena itu pada dasarnya terdapat tiga prinsip pokok dalam strategi perencanaan pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat atau *community based tourism*, yaitu:

1. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. Terdapat kepastian masyarakat lokal menerima manfaat.
3. Pemberihan edukasi tentang pariwisata kepada masyarakat lokal. (Sunaryo, 2013: 140).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa salah satu tujuan kegiatan kepariwisataan adalah melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam rangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku

kepentingan. Salah satu konsep yang menjelaskan peranan komunitas dalam pembangunan pariwisata adalah *community based tourism*, yaitu konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut andil dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunannya. Secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut Pinel (dalam Rorah, 2007) *community based tourism* merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal.

Janianton (2013) mendefinisikan *community based tourism* sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. Janianton melihat *community based tourism* bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu melainkan aspek pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan, sementara aspek ekonomi menjadi 'induced impact' dari aspek sosial, budaya dan lingkungan.

Secara prinsipal, *community based tourism* berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Agar pelaksanaan *community based tourism* dapat berhasil dengan baik, terdapat elemen elemen yang harus diperhatikan yaitu : 1. Sumber alam dan budaya. 2. Organisasi organisasi masyarakat. 3. Manajemen. 4. Pembelajaran.

Pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada masyarakat menjadi isu strategi pengembangan kepariwisataan saat ini. Menurut Suansri dalam Rahayu, Dewi, Fitriana (2016:7) strategi pembangunan pariwisata melalui *Community Based Tourism (CBT)* dapat dikenali dari prinsip-prinsipnya, yaitu:

1. Mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata;
2. Melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya;
3. Mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan;
5. Menjamin keberlanjutan lingkungan;
6. Melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal;
7. Mengembangkan pembelajaran lintas budaya;
8. Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia;
9. Mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara proporsional kepada anggota masyarakat;
10. Memberikan kontribusi dengan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat;

Dengan mengacu pada *prinsip community based tourism* mengembangkan 4 indikator yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu: (1). Adanya dana untuk pengembangan komunitas (karang taruna); (2) Terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata; (3) Timbulnya pendapatan masyarakat lokal di sektor pariwisata; (4) Pendistribusian keuntungan secara adil pada anggota.

B. Strategi Pengembangan Pariwisata

Stainer dan Miner sebagaimana diterjemahkan oleh Ticoalu dan Agus Dharma (1997: 2) mendefinisikan bahwa Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, strategi secara harfiah berarti “seni pada jenderal”. Secara khusus, strategi adalah “penempatan” misi perusahaan atau organisasi, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Strategi juga didefinisikan sebagai pusat dan inti yang khas dari manajemen strategik, strategi mengacu pada perumusan tugas-tugas, tujuan, dan sasaran organisasi; strategi kebijakan dan

program pokok untuk mencapainya; dan metode yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa strategi telah diimplementasikan untuk mencapai akhir tujuan akhir organisasi.

Menurut Webster's New World Dictionary dalam Udaya, dkk (2013: 6) Strategi adalah (1) ilmu merencanakan serta mengarahkan kegiatan-kegiatan militer dalam skala besar dan memanuver kekuatan-kekuatan ke dalam posisi yang paling menguntungkan sebelum bertempur dengan musuhnya; (2) sebuah keterampilan dalam mengelola atau merencanakan suatu strategi atau cara yang cerdas untuk mencapai suatu tujuan. Strategi disini diartikan sebagai trik atau skema untuk mencapai suatu maksud. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu upaya atau cara yang digunakan seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien serta menjadi rangkaian pengambilan keputusan dalam rangka menentukan program kerja jangka panjang ataupun jangka pendek yang berguna untuk menjelaskan bagaimana manajemen strategi pengembangan daerah penyangga wisata.

Berkaitan dengan strategi pembangunan sektor wisata wisata, maka disini dijelaskan pariwisata yaitu pariwisata menurut Spillane (1987: 20) adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan/keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi social, budaya, alam dan ilmu. Sama halnya dengan Pendit (2003: 25), mendefinisikan pariwisata sebagai suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Sedangkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagaimacam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pariwisata dinilai

sebagai suatu perjalanan yang dilaksanakan untuk sementara waktu, yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati perjalanan dan untuk kepentingan lainnya dan didukung oleh masyarakat, pemerintah serta swasta yang memberikan berbagai fasilitas kepariwisataan.

Menurut Suwanto (2004) pariwisata digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Berdasarkan Jumlah, di antaranya: (a) *individual tour*, yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh satu orang atau sepasang suami istri; (b) *family group tour*, yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain; (c) *group tour*, yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan bersama sama minimal 10 orang, dengan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kebutuhan seluruh anggotanya.
2. Berdasarkan Kepengaturannya, di antaranya: (a) *pre arranged tour*; (b) *package tour*; (c) *coach tour*; *special arranged tour*; dan (d) *optional tour*.
3. Berdasarkan Maksud dan Tujuan, di antaranya: (a) *holiday tour*; (b) *familiarization tour*; (c) *educational tour*; (d) *pileimage tour*; (e) *special mission tour*; (f) *special programe tour*; (g) *hunting tour*.
4. Berdasarkan Penyelenggaraannya, di antaranya: (a) *ekskursi*;
5. (b) *safari tour*; (c) *cruize tour*; (d) *youth tour*; (e) *wreck diving*.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dilihat bahwa pariwisata di suatu daerah akan berfungsi sebagaimana jenisnya jika pariwisata itu dilakukan pembangunan. Mengutip pendapat Katz dan Philip Roup, Sunaryo (2013: 29) memandang pembangunan sebagai proses perubahan pokok pada masyarakat dari suatu keadaan nasional tertentu menuju keadaan nasional lain yang dianggap lebih bernilai. Pembangunan juga diartikan sebagai proses perubahan dengan tanda-tanda dari suatu keadaan nasional tertentu yang dianggap kurang dikehendaki menuju sesuatu keadaan nasional tertentu yang dinilai lebih dikehendaki. Pembangunan jika

diaplikasikan pada sektor pariwisata, menjadi sebuah proses perubahan pokok yang dilakukan oleh manusia secara terencana pada suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dinilai kurang baik, yang diarahkan menuju ke suatu kondisi kepariwisataan tertentu yang dianggap lebih baik atau lebih diinginkan.

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Untuk merencanakan pembangunan pariwisata ada yang memiliki peran dan terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan. Pihak yang terlibat langsung tersebut adalah masyarakat, pemerintah, dan swasta.

Dalam penelitian ini pihak masyarakat/ komunitas yang akan menjadi salah satu sorotan dalam pembangunan pariwisata. Dalam pembangunan kepariwisataan maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hakikatnya harus diarahkan pada beberapa hal. Sunaryo (2013: 219) mengemukakan hal-hal sebagai berikut, yaitu: (1) meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan; (2) meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat; (4) meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat; (5) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata.

Menurut pakar pariwisata Alastair M. Morrison terdapat sepuluh penentu keberhasilan pariwisata yang disebutnya sebagai “10-A penentu Keberhasilan Destinasi Pariwisata”. Namun demikian ia pun mengemukakan bahwa “10-A” tersebut bukannya tidak mustahil untuk ditambah, mengingat kebutuhan daerah atau wilayah berbeda satu dengan lainnya, dan “10-A” tersebut hanyalah merupakan unsur utama. Dari sekian banyak unsur penunjang keberhasilan pariwisata, ada sepuluh yang dipandang sebagai kebutuhan atau syarat utama, yakni:

1. Kesadaran (*Awareness*). Unsur ini berkaitan dengan tingkat pengetahuan wisatawan tentang destinasi yang dipengaruhi oleh banyaknya serta jenis informasi yang mereka terima. Apakah tingkat pengetahuan tentang destinasi itu cukup tinggi di antara wisatawan yang potensial ?;
2. Daya pikat (*Attractiveness*). Beberapa daya pikat destinasi secara geografis yang menonjol merupakan hal yang penting dalam hal ini. Apakah destinasi yang bersangkutan menawarkan daya pikat yang beragam dan menonjol bagi wisatawan?;
3. Ketersediaan (*Availability*). Unsur ini ditentukan oleh kemudahan memperolehnya seperti booking atau pemesanannya, baik cara maupun jumlah jaringannya. Dapatkah booking atau pemesanannya dilakukan melalui jaringan distribusi yang beragam ?
4. Akses (*Access*). Unsur ini menyangkut kenyamanan untuk mencapai destinasi tersebut, begitu juga untuk bepergian di dalam destinasi itu. Apakah bepergian ke/dari serta di dalam destinasi itu nyaman dilakukan dengan semua jenis angkutan?;
5. Apresiasi (*Appreciation*). Tingkat penyambutan yang menyenangkan bagi wisatawan sebagai “tamu” yang dirasakan sebagai keramahan adalah yang dimaksud dalam apresiasi ini. Apakah Wisatawan merasa “disambut” dan mendapat layanan yang baik di dalam destinasi tersebut ?;
6. Jaminan (*Assurance*). Unsur ini berkaitan dengan keselamatan dan keamanan bagi pribadi wisatawan dan barang bawasanya selama di destinasi yang bersangkutan. Apakah destinasi itu bersih, terjamin keselamatannya (*safe*) dan keamanannya (*secure*) ?;
7. Aktivitas (*Activities*). Luasnya pilihan susunan daftar kegiatan yang tersedia bagi wisatawan merupakan hal yang menentukan daya pikat destinasi. Apakah destinasi menawarkan pilihan kegiatan yang cukup luas bagi wisatawan untuk ikut terlibat ?;
8. Penampilan (*Appearance*). Unsur penampilan ini terkait dengan kesan yang dirasakan wisatawan dari destinasi yang

bersangkutan baik pada saat tiba maupun sepanjang ia tinggal di destinasi itu. Apakah destinasi memberikan kesan pertama yang baik ? Apakah destinasi tersebut memberikan kesan baik dan bertahan lama kepada wisatawan ?;

9. Tindakan (*Action*). Keberadaan Rencana Jangka Panjang Pariwisata dalam hal pembinaan / pengembangan serta pemasarannya merupakan beberapa tindakan yang dibutuhkan. Apakah pengembangan kepariwisataan dan pemasarannya direncanakan dengan baik?;
10. Akuntabilitas (*Accountability*). Unsur ini menyangkut evaluasi kinerja DMO. Apakah DMO mencatat dan menilai efektivitas kerjanya?.

Dengan berpedoman pada 10-A di atas diharapkan destinasi dapat memberikan rasa puas pada wisatawan yang berkunjung. Pakar lainnya, Chiranjib Kumar telah menambahkan 2-A lagi sebagai pelengkap dari 10-A yang telah diuraikan oleh pakar pariwisata Alastair M. Morrison, yaitu:

1. Antisipasi (*Anticipation*), yang dinilai perlu dalam hal mengantisipasi pembangunan citra mengenai pelestarian sumberdaya serta keseimbangan pelaksanaannya oleh guest dan host;
2. Perluasan (*Amplification*) yang menyangkut dampak positif pada lingkungan terdekat minimal dalam radius 5 km di sekitarnya melalui siklus kehidupan dalam bentuk pelestarian (*conservation*), perbaikan (*improvement*), kedamaian (*peace*) dan kebahagiaan (*happiness*).

Wisatawan yang melakukan perjalanan daerah tujuan wisata memerlukan berbagai kebutuhan dan pelayanan mulai dari keberangkatan sampai kembali lagi ke tempat tinggalnya. Aktivitas pariwisata sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti yang kita lakukan setiap hari, wisatawan juga butuh makan dan minum, tempat menginap, serta alat transportasi yang membawanya pergi dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Berdasarkan hal tersebut maka dibutuhkan strategi pengembangan pariwisata agar dapat memberikan perjalanan yang baik bagi wisatawan. Dengan mengutip pendapat Carter dan Fabricius, Sunaryo (2013: 172), mengemukakan bahwa aspek-aspek pembangunan pariwisata mencakup:

1. Pengembangan atraksi dan daya tarik wisata

Atraksi merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. Ada banyak alasan mengapa orang berwisata ke suatu daerah. Beberapa yang paling umum adalah untuk melihat keseharian penduduk setempat, menikmati keindahan alam, menyaksikan budaya yang unik, atau mempelajari sejarah daerah tersebut. Intinya, wisatawan datang untuk menikmati hal-hal yang tidak dapat mereka temukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Atraksi disebut juga objek dan daya tarik wisata yang diminati oleh wisatawan. Suatu daerah atau tempat hanya dapat menjadi tujuan wisata kalau kondisinya sedemikian rupa, sehingga ada yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata. Apa yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan (*tourism resources*). Sehingga atraksi merupakan daya tarik yang akan melahirkan motivasi dan keinginan bagi wisatawan untuk mengunjungi destinasi wisata. Berbagai wujud dari atraksi wisata ini dapat berupa: arsitektur bangunan (seperti: candi, piramida, monumen, masjid, gereja dan sebagainya), karya seni budaya (seperti: museum, seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, kehidupan masyarakat, dan sebagainya), dan pengalaman tertentu maupun berbagai bentuk even pertunjukan.

2. Pengembangan amenitas wisata

Secara umum pengertian *amenities* adalah segala macam prasarana dan sarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti: penginapan (*accommodation*), rumah makan (*restaurant*); transportasi dan agen perjalanan. Berikut ini akan diuraikan secara lebih rinci mengenai prasarana dan sarana yang dimaksud seperti:

a) Usaha Penginapan (*accommodation*)

Akomodasi adalah tempat dimana wisatawan bermalam untuk sementara di suatu daerah wisata. Sarana akomodasi umumnya dilengkapi dengan sarana untuk makan dan minum. Sarana akomodasi yang membuat wisatawan betah adalah akomodasi yang bersih, dengan pelayanan yang baik, harga yang pantas sesuai dengan kenyamanan yang diberikan serta lokasi yang relatif mudah dijangkau. Jenis-jenis akomodasi berdasarkan bentuk bangunan, fasilitas, dan pelayanan yang disediakan seperti hotel, *guest house*, *homestay*, *losmen*, perkemahan, dan vila.

b) Usaha makanan dan minuman

Usaha makanan dan minuman di daerah tujuan wisata merupakan salah satu komponen pendukung penting. Usaha ini termasuk di antaranya restoran, warung atau cafe. Wisatawan akan kesulitan apabila tidak menemui fasilitas ini pada daerah yang mereka kunjungi. Sarana akomodasi umumnya menyediakan fasilitas tambahan dengan menyediakan makanan dan minuman untuk kemudahan para tamunya. Selain sebagai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, makanan adalah nilai tambah yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Banyak wisatawan tertarik untuk mencoba makanan lokal, bahkan ada yang datang ke daerah wisata hanya untuk mencicipi makanan khas tempat tersebut sehingga kesempatan untuk memperkenalkan makanan lokal terbuka lebar. Bagi wisatawan, mencicipi makanan lokal merupakan pengalaman menarik. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam mengelola usaha makanan dan minuman adalah jenis dan variasi hidangan yang disajikan, cara penyajian yang menarik, kebersihan makanan dan minuman yang disajikan, kualitas pelayanan serta lokasi usaha tersebut. Penyedia jasa harus memperhatikan apakah lokasi usahanya menjadi satu dengan sarana akomodasi, atau dekat dengan obyek wisata sehingga mudah dikunjungi.

Pada hakekatnya amenities merupakan fasilitas dasar seperti: utilitas, jalan raya, transportasi, akomodasi, pusat informasi

pariwisata dan pusat perbelanjaan yang kesemuanya perlu disediakan untuk membuat wisatawan yang berkunjung ke destinasi merasa nyaman dan senang. Lebih luas, amenities diartikan sebagai fasilitas pendukung demi kelancaran kegiatan kepariwisataan serta memberikan kenyamanan kepada wisatawan. Intinya dalam aspek amenities paling tidak terdiri dari: akomodasi, rumah makan, pusat informasi wisata, pusat/toko cinderamata, pusat kesehatan, pusat layanan perbankan, sarana komunikasi, pos keamanan, biro perjalanan wisata, ketersediaan air bersih, ketersediaan listrik, dan sebagainya.

3. Pengembangan aksesibilitas

Aksesibilitas dalam hal ini adalah segenap sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai suatu destinasi maupun tujuan wisata terkait. Aksesibilitas tidak hanya menyangkut kemudahan transportasi bagi wisatawan untuk mencapai sebuah tempat wisata atau destinasi tertentu, akan tetapi juga waktu yang dibutuhkan, tanda penunjuk arah menuju lokasi wisata dan perangkat terkait lainnya.

4. Pengembangan citra wisata

Pencitraan (*image building*) adalah kegiatan untuk membangun citra atau image dibenak pasar (wisatawan) melalui desain terpadu antara aspek: kualitas produk, komunikasi pemasaran, kebijakan harga, dan saluran pemasaran yang tepat dan konsisten dengan citra atau image yang ingin dibangun serta ekspresi yang tampak dari sebuah produk.

Oleh karena itu, untuk menciptakan suatu daerah pariwisata, harus tersedia *supply* dan *demand* yang mencukupi. Dengan adanya *supply* yang berkualitas dan menarik maka akan banyak wisatawan yang tertarik mengunjungi daerah tersebut. Wisatawan pulalah yang memberikan pemasukan atau keuntungan agar daerah tujuan wisata dapat terus berkembang.

C. Penentu Keberhasilan Pengembangan Daerah Penyangga Wisata

Pengembangan daerah penyangga wisata merupakan salah satu hal yang penting dan harus ada dalam wilayah strategis pariwisata. Dalam pelaksanaannya, pengembangan daerah penyangga wisata terdapat faktor-faktor penentu keberhasilan. Berikut terdapat faktor keberhasilan pengembangan daerah penyangga wisata yaitu :

1. Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Sumberdaya alam dalam pariwisata meliputi iklim, air dan kehidupan air, vegetatif, margasatwa, kondisi topografi, dan permukaan geologi (Clare A. Gunn, 2002:73).

2. Warisan Budaya

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa segmen pasar perjalanan telah banyak mencari destinasi dengan sumberdaya budaya (warisan budaya) yang melimpah. Kategori sumber daya ini mencakup situs prasejarah; tempat bersejarah; tempat etnis, pengetahuan, pendidikan; industri, pusat perdagangan, pusat profesional, tempat pertunjukan seni, museum, galeri; dan situs penting untuk hiburan, helaran, olahraga, dan agama. Tempat yang memiliki karakteristik budaya sangat penting untuk dikembangkan, seperti situs bersejarah, bangunan bersejarah, artefak, wisata ziarah, wilayah pengetahuan, konsentrasi etnik, kerajinan, pabrik dan proses industri, dan taman hiburan (Clare A. Gunn, 2002:62).

3. Pihak Swasta

Pariwisata merupakan hal yang dinamis, dibutuhkan pihak swasta untuk memvisualisasikan peluang untuk mengembangkan pariwisata dan cara kreatif mengelola perkembangan yang ada. Kemampuan untuk melihat peluang, mendapatkan lokasi-lokasi yang tepat, melibatkan perancang untuk membuat pengaturan fisik, mengumpulkan sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk operasi, dan mengelola tanaman fisik dan layanan yang penting untuk pengembangan pariwisata. Swasta merupakan faktor yang mempengaruhi

pengembangan pariwisata di banyak negara (Clare A. Gunn, 2002:66).

4. Biaya atau Keuangan

Biaya sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata. Kemudahan memperoleh dukungan finansial untuk pariwisata sangat bervariasi. Investor atau swasta merupakan pihak yang dapat diandalkan untuk memberikan dukungan finansial dalam pengembangan pariwisata. Dukungan finansial merupakan faktor penting bagi pengembangan pariwisata publik dan swasta (Clare A. Gunn, 2002:66).

5. Tenaga kerja/Pekerja

Ketersediaan sumberdaya manusia atau pekerja yang terlatih secara memadai di suatu daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan pariwisata. Keadaan pasar menuntut tingkat layanan yang lebih tinggi, orang-orang yang terlatih dan kompeten berada dalam kebutuhan yang lebih besar. Kapasitas sumberdaya manusia atau pekerja sangat berkaitan dengan pengembangan pariwisata (Clare A. Gunn, 2002:67).

6. Kompetisi

Kebebasan untuk bersaing adalah dalil dari sistem perusahaan bebas. Jika sebuah bisnis dapat mengembangkan dan menawarkan produk yang lebih baik, maka hal itu boleh dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar. Namun sebelum daerah memulai ekspansi pariwisata, harus melihat kompetisi (daerah lain mana yang dapat memberikan kesempatan yang sama dengan biaya lebih rendah dan dengan kasus yang lebih besar) (Clare A. Gunn, 2002:67).

7. Masyarakat

Faktor yang jauh lebih penting yang mempengaruhi pengembangan pariwisata daripada yang telah dipertimbangkan di masa lalu adalah sikap terhadap pariwisata oleh beberapa sektor masyarakat. Jika sektor bisnis lebih menyukai pertumbuhan pariwisata yang lebih besar, kelompok masyarakat lokal lainnya mungkin menentanginya karena meningkatkan persaingan sosial, fisik, dan ekonomi untuk

sumber daya dan dampak negatif lainnya. Kelompok politik, lingkungan, agama, etnis, dan kelompok lain di suatu daerah dapat membuat atau menghancurkan berfungsinya sistem pariwisata (Clare A. Gunn, 2002:67).

8. Kebijakan Pemerintah

Dari tingkat pusat sampai daerah, hukum dan undang-undang yang berlaku dapat mendorong atau menghambat pengembangan pariwisata. Bagaimana hukum dan peraturan dikelola dapat mempengaruhi tingkat perkembangan pariwisata. Kebijakan pengembangan infrastruktur oleh pemerintah mungkin menguntungkan satu daerah di wilayah lain. Kelancaran fungsi sistem pariwisata yang tidak menentu sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah (Clare A. Gunn, 2002:68).

9. Organisasi

Banyak daerah telah menyewa konsultan untuk mengidentifikasi peluang pariwisata, namun seringkali rencana pembangunan semacam itu belum terwujud karena kurangnya organisasi dan kepemimpinan. Pihak organisasi konsultan ini sangat berperan, karena pihak ini yang penentu dalam perencanaan dan pengembangan suatu daerah tujuan wisata. Perencanaan pariwisata apa pun di masa depan harus mempertimbangkan inti sistem fungsional pariwisata dan banyak faktor yang mempengaruhinya (Clare A. Gunn, 2002:68).

Selain faktor keberhasilan diatas terdapat penentu keberhasilan pengembangan daerah penyangga wisata dalam Jakti Putri dan Manaf (2013: 566) sebagai berikut:

1. Tokoh penggerak, merupakan orang-orang yang memiliki peran besar dalam menggerakkan masyarakat luas untuk ikut terlibat didalam usaha kepariwisataan. Tokoh penggerak ini memiliki kedekatan yang sangat tinggi dengan masyarakat setempat. Sehingga tokoh penggerak ini dapat dengan mudah memetakan potensi dan masalah yang ada.

2. Pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama, pelibatan dalam hal ini merupakan keikutsertaan masyarakat setempat dalam pengembangan kepariwisataan. Dalam hal ini masyarakat memiliki keahlian atau ketertarikan dibidang pariwisata sehingga mereka dapat ikut serta merencanakan, mngelola dan memperkerjakan diri mereka sendiri didalam kegiatan kepariwisataan.
3. Daya tarik, merupakan keunikan yang menyebabkan terjadinya aktivitas pariwisata. Keunikan masyarakat terutama dari adat dan istiadat budaya. Keunikan ini harus diciptakan oleh masyarakat sendiri.
4. Pendanaan, merupakan fasilitas dana mandiri sesuai dengan aktivitas pariwisata yang berkembang. Pendanaan ini pemberian dana memenuhi kebutuhan para pelaku wisata.
5. Kemitraan, merupakan hubungan yang terjalin baik dengan pemerintah maupun pihak swasta.

Oleh karena itu, penentu keberhasilan dalam penelitian ini terfokus pada lima faktor pengembangan daerah penyangga wisata yaitu tokoh penggerak, pelibatan amsyarakat, daya tarik, pendanaan, dan kemitraan.

Penetapan desa wisata berdasarkan kriteria dan persyaratan desa wisata, yang meliputi:

- (1) Penetapan desa wisata pada masing-masing Desa Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:

A. Kec Gedong Tataan

1. Kutoarjo
2. Gedung Tataan
3. Padang Ratu
4. Way Layap
5. Kebagusan
6. Taman Sari
7. Sungai Langka
8. Sukaraja
9. Bernung
10. Pampangan
11. Karang Anyar
12. Sukadadi
13. Kurungan Nyawa
14. Cipadang
15. Bagelen
16. Bogorejo
17. Negeri Sakti
18. Suka Banjar
19. Wiyono

B. Kec Negeri Katon

1. Kali Rejo
2. Purworejo
3. Tri Rahayu
4. Negeri Ulangan Jaya
5. Karang Rejo
6. Bangun Sari
7. Negara Saka
8. Rowo Rejo

9. Ponco Kresno
10. Lumbirejo
11. Tresno Maju
12. Kagungan Ratu
13. Sidomulyo
14. Halangan Ratu
15. Pejambon
16. Negeri Katon
17. Sinar Bandung
18. Tanjung Rejo
19. Pujo Rahayu

C. Kec Tegineneng

1. Rejo Agung
2. Margo Mulyo
3. Kota Agung
4. Kresno Widodo
5. Panca Bakti
6. Gunung Sugih Baru
7. Margo Rejo
8. Gerning
9. Trimulyo
10. Negara Ratu Wates
11. Gedung Gumanti
12. Sinarjati
13. Kejadian
14. Bumi Agung
15. Sriwedari
16. Batang Hari Ogan

D. Kec Way Lima

1. Cimanuk
2. Sidodadi
3. Pekondoh Gedung
4. Sindang Garut
5. Margodadi
6. Way Harong
7. Gedong Dalam
8. Banjar Negeri
9. Pekondoh
10. Sukamandi
11. Tanjung Agung
12. Padang Manis
13. Baturaja
14. Gunung Rejo
15. Paguyuban
16. Kota Dalam

E. Kec Padang Cermin

1. Tambangan
2. Padang Cermin
3. Trimulyo
4. Sanggi
5. Khepong Jaya
6. Paya
7. Hanau Berak
8. Gayau
9. Way Urang
10. Banjaran
11. Durian

F. Kec Punduh Pidada

1. Pulau Legundi
2. Suka Maju
3. Banding Agung
4. Pagar Jaya
5. Rubasa
6. Batu Raja
7. Sukajaya Pidada
8. Bangun Rejo
9. Bawang
10. Sukarame
11. Kota Jawa

G. Kec Kedondong

1. Kertasana
2. Pasar Baru
3. Teba Jawa
4. Way Kepayang
5. Gunung Sugih
6. Harapan Jaya
7. Pesawaran
8. Suka Maju
9. Sinar Harapan
10. Tempel Rejo
11. Babakan Loa
12. Kedondong

H. Kec Marga Punduh

1. Pekon Ampai
2. Kampung Baru
3. Kunyaian
4. Sukajaya Punduh
5. Tajur
6. Penyandingan
7. Pulau Pahawang

8. Umbul Limus
9. Maja
10. Kekatang

I. Kec Way Khilau

1. Tanjung Kerta
2. Gunung Sari
3. Kubu Batu
4. Suka Jaya
5. Mada Jaya
6. Kota Jawa
7. Bayas Jaya
8. Penengahan
9. Padang Cermin
10. Tanjung Rejo

J. Kec Teluk Pandan

1. Batu Menyan
2. Sukajaya Lempasing
3. Sidodadi
4. Hurun
5. Talang Mulya
6. Hanura
7. Munca
8. Cilimus
9. Tanjung Agung
10. Gebang

K. Kec Way Ratai

1. Ceringin Asri
2. Pesawaran Indah
3. Wates Way Ratai
4. Gunung Rejo
5. Poncorejo
6. Harapan Jaya
7. Bunut Seberang
8. Sumber Jaya
9. Mulyosari
10. Bunut

Rangkuman

Daerah peyangga wisata merupakan daerah alternatif kegiatan kepariwisataan di kawasan pariwisata. Selanjutnya yang dimaksud **pengembangan daerah penyangga wisata adalah mengembangkan daerah lain diluar destinasi utama sebagai alternatif kedua atau second line tourism dengan melakukan beberapa strategi yang mampu menjadi cara mengembangkan kepariwisataan.** Dalam penelitian ini second line tourism dari kawasan pariwisata Kecamatan Teluk Pandan adalah Kecamatan Way Ratai. Berdasarkan penjabaran diatas, adapun indikator keberhasilan pengembangan daerah penyangga wisata yaitu menurut Badan Perencanaan Daerah (Bappeda : 2017) meliputi:

4. Produktivitas, artinya pengembangan daerah penyangga wisata dapat diukur dari kemampuan mengembangkan wilayahnya, sehingga dapat dilihat bahwa pengembangan yang dilakukan cukup banyak menghasilkan yang dikembangkan.
5. Efisiensi, artinya pengembangan daerah penyangga wisata berkaitan dengan meningkatnya kemampuanteknologi/sistem pembangunan, sehingga akan menciptakan tepat guna dan tepat sasaran dalam pelaksanaan pengembangan.

6. Partisipasi masyarakat, artinya pengembangan daerah dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan suatu program di suatu wilayah, sehingga pelaksanaan pengembangan akan lebih mudah dilakukan dengan tingkat antusias masyarakatnya.

Desa penyangga dapat berubah menjadi desa wisata apabila perkembangan desa penyangga dapat memenuhi kriteria dan persyaratan desa wisata.

Status desa wisata dapat diubah dan dicabut apabila dalam perkembangannya tidak memenuhi kriteria dan persyaratan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 draft Peraturan Bupati Kabupaten Pesawaran tentang **DESTINASI WISATA“SATU DESA SATU DESA WISATA”DI KABUPATEN PESAWARAN**

Latihan Soal

Silakan membentuk kelompok diskusi : Berikan analisis anda tentang gagasan “*one village one destination*”

Pustaka Rujukan

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- James J, Spillane. 1987. *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Perpustakaan BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta
- Nyoman S, Pendit. 2003. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradya Paramita
- Soemarwoto, Otto. 1985. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Udaya, Jusuf, dkk. 2013. *Manajemen Strategik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Glossary

Second line tourism (pengembangan daerah penyangga wisata) adalah mengembangkan daerah lain diluar destinasi utama sebagai alternatif kedua atau dengan melakukan beberapa strategi yang mampu menjadi caramengembangkan kepariwisataan.

BAB 10

MANAJEMEN PEMBANGUNAN KABUPATEN PESAWARAN (INNOVATIVE GOVERNMENT PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PESAWARAN)

A. Penyajian

Good Governance (pemerintahan yang baik) menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Widodo (2000 : 24) adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Mardiasmo (2002: 24) *good governance* diartikan sebagai suatu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, pencegahan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan baik secara politik maupun administratif. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, *good governance* pada dasarnya diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara *good governance* bertanggungjawab, bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme serta berorientasi partisipasi publik.

United Nations Development Programme (UNDP) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Widodo (2001: 25-26) karakteristik *good governance* (pemerintahan yang baik) antara lain:

1. *Participation* (partisipasi)
2. *Rule of Law*, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama menyangkut hak asasi manusia.
3. *Transparancy* (keterbukaan)
4. *Responsiveness* lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani dengan baik setiap *stakeholders*
5. *Consensus orientation, good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan-kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal pembuatan kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity*, semua warganegara baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*, nilai efisiensi artinya penghematan, tidak boros. Sikap, perilaku dan perbuatan birokrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien (tidak boros); menurut Muhajir Darwin dalam Mardiasmo (2001 : 119) bahwa dalam penggunaan dana publik agar dilakukan secara hati-hati, dan memberikan hasil yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan publik.
8. *Accountability*, birokrat termasuk di dalamnya aparat pemerintahan desa, harus senantiasa dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang dibuat, terutama menyangkut kebijakan pengelolaan dana pembangunan desa kepada masyarakat. Akuntabilitas sesungguhnya berkaitan dengan bagaimana birokrat publik mewujudkan harapan-harapan publik. Untuk mewujudkannya, bukan saja tergantung pada kemampuan birokrat publik dalam *manage* harapan-harapan publik, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan publik dalam melakukan kontrol atas harapan-harapan yang telah didefinisikan, baik yang dilakukan oleh lembaga kontrol resmi maupun oleh masyarakat. Sehingga birokrat publik dapat dikatakan akuntabel jika dapat mewujudkan harapan-harapan publik.

9. *Strategic vision*, para pemimpin dan masyarakat harus senantiasa mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan sumber daya manusia di masa depan sejalan dengan perubahan dan tuntutan kemajuan zaman.

10.1 *Innovative Government*

Pemerintah Daerah yang memiliki **inovasi menonjol** di bidang **tatakelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah**. (Hutagalung, 2007)

10.2 **Strategi Inovasi Percepatan Pembangunan Daerah**

Menurut Hutagalung (2007), strategi inovasi percepatan pembangunan daerah didukung oleh 2 faktor sebagai berikut :

1. Komitmen kepemimpinan. Faktor ini merupakan faktor **essensial** bagi penerapan inovasi kebijakan publik, karena seorang pemimpin dalam melakukan inovasi perlu melakukan manajemen konflik dengan baik. Selain itu untuk mengimplementasikan perubahan secara baik perlu di dasari suatu **peta strategi inovasi** dalam aspek konseptual, institusional, organisasional dan proses manajemen publik yang baik. Olehkarena itu seorang pemimpin dalam hal ini merupakan seseorang yang selain mampu sebagai perencana yang baik, juga merupakan sosok yang menjaga konsistensi pelaksanaan strategi inovasi tersebut bagi kemajuan daerahnya.
2. Inovasi yang didasari ide-ide kreatif tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kreatif. Karena itu diperlukan organisasi birokrasi yang efisien, profesional, dan responsif sebagai jaringan pelaksana (*network implementor*) dan birokrasi yang menjadi *motivating actor* dalam menemukan inovasi-inovasi baru dalam menata daerahnya.

Selain itu diperlukan inovasi dalam manajemen aparatur dan sistem kerja birokrasi daerah sehingga mampu menunjang kerja-kerja inovasi di daerah. Kedua yang diuraikan di atas merupakan faktor kunci (**key factor**) yang merupakan

prasyarat utama mewujudkan perubahan yang *innovatif* pada daerah yang diharapkan menjadi gerakan kompetitif yang dilaksanakan sebagai wujud keberhasilan dan implementasi semangat otonomi daerah.

10.3 Studi Pendahuluan yang Telah Dilakukan dan Hasil yang telah Dicapai

Hasil penelitian yang dilakukan Rasyid (2009) menyatakan bahwa 80% Daerah Otonom Baru bertambah miskin setelah memisahkan diri dari induknya, ditambah lagi banyak permasalahan yang dihadapi, selain persoalan ketimpangan antara besarnya dana yang dialokasikan dan hasil yang dicapai dalam pembangunan daerah otonom baru, masalah ***kapasitas kelembagaan yang rendah dan kualitas sumber daya aparatur yang sangat minim***, ditambah lagi di beberapa DOB munculnya konflik horisontal yang cenderung semakin meningkat berkaitan dengan batas wilayah.

Selanjutnya penelitian Mulyana (2009) menyatakan bahwa dalam bidang layanan publik, persoalan penganggaran mempengaruhi *delivery* bentuk-bentuk pelayanan publik pada daerah otonom baru (DOB). Dengan tidak maksimalnya kapasitas anggaran, mengakibatkan lemahnya kapasitas penyelenggaraan layanan publik yang secara langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baru itu. Artinya, Pemerintah Daerah baru tersebut tidak bisa hanya mengandalkan model penghantaran (*delivery*) layanan publik yang umum dilaksanakan pada daerah yang sudah mapan. Sehingga mengharuskannya menghasilkan gagasan (*innovative government*) untuk memunculkan model-model penghantaran (*delivery*) layanan publik yang dapat menjadi solusi yang baik bagi Pemerintah Daerah.

10.4 Studi Awal Tentang Kabupaten Pesawaran Sebagai Daerah Otonom Baru dan Hasil yang Telah Dicapai

Kabupaten Pesawaran yang diresmikan menjadi daerah otonom baru (DOB) pada 17 Juli 2007 dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2007 ini memiliki 7 Kecamatan, yaitu: (1). Gedong Tataan, (2). Kedondong, (3). Negeri Katon, (4). Padang Cermin, (5). Punduh Pidada, (6). Tegineneng dan (7). Way Lima. Daerah otonom baru dengan motto **Ragom Pepandu Sai Batin** ini memiliki luas wilayah 2.243,51 km². Kecamatan Gedongtataan ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Pasawaran berdasarkan Surat Keputusan DPRD Lampung Selatan No. 02/DPRD-LS/2005 tanggal 07 Januari 2005 tentang Penetapan Calon Ibu Kota Kabupaten Pesawaran. Juga Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan No. 07/ TAPEM/ HK-LS/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesawaran dengan Ibu Kota Gedongtataan. Letak yang berbatasan dengan Bandar Lampung memiliki arti strategis. Ini sangat mendukung Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung dalam memenuhi kebutuhannya.

Studi yang dilakukan Tim (2011), sebagai daerah otonom baru (DOB), tata kelola administrasi pemerintahan dan pemberian layanan publik di kabupaten Pesawaran belum terlaksana dan terwujud dengan baik, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan untuk tingkat desa/pekon masih ditandai dengan kurangnya koordinasi antara aparat desa dalam menjalankan tugas administrasi, dalam menjalankan tugas seringkali terjadi tumpang tindih, hal ini dikarenakan **job description yang tidak jelas**. Padahal dengan segala keterbatasan yang dimiliki dan sebagai tulang punggung dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pemerintah desa/pekon dituntut untuk bisa melaksanakan dan mengelola aspek-aspek administrasi negara tersebut.

Tim (2012) juga menyimpulkan sampai dengan menjelang tahun ke 6 terbentuknya Kabupaten Pesawaran sebagai Daerah Otonom Baru, masih pula dirundung berbagai permasalahan menyangkut tatakelola pemerintahan daerah termasuk **manajemen**

pembangunan daerah, partisipasi publik dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pembangunan daerah **belum berjalan maksimal**, demikian pula penghantaran pelayanan publik yang diberikan dan peningkatan daya saing daerah belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Olehkarena itu, perubahan yang *innovatif* dengan dukungan komitmen pemimpin dan organisasi birokrasi yang efisien, profesional, dan responsif sebagai jaringan pelaksana (*network implementor*) dan birokrasi yang menjadi *motivating actor* dalam menemukan inovasi-inovasi baru dalam menata daerahnya sangat diharapkan. Dengan demikian, semangat **berinovasi** tersebut dapat menjadi gerakan kompetitif yang dilaksanakan sebagai wujud keberhasilan DOB dan implementasi semangat otonomi daerah di era reformasi ini.

B.PUSTAKA RUJUKAN

- Syaodih, Ernandy. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*. Bandung : Pt Refika Aditama
- Siagian, Sondang. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Syafarudin. 2008. *Meluruskan Tujuan Pemekaran Daerah*. Artikel, Radar Lampung 4 November 2008
- Suyono, Haryono. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Mengantar Masyarakat Mandiri*. Grasindo. Jakarta
- Usman, Sanyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

BAB 11

STRATEGI PENATAKELOLAAN PARIWISATA KABUPATEN PESAWARAN MENUJU INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Strategi penatakelolaan pariwisata kabupaten Pesawaran menuju industri pariwisata mandiri berbasis kearifan lokal dilakukan melalui :

a. Daya Tarik (attraction)

Data yang diperoleh Tim berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Industri Pariwisata dan Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Kabupaten Pesawaran, disimpulkan bahwa:

Berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Pesawaran yang memfokuskan pada pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD), khususnya kawasan strategis pariwisata daerah (KSPD) Kecamatan Teluk Pandan yang memiliki banyak potensi wisata, salah satunya adalah wisata buatan yakni Taman hutan rakyat (Tahura) Wan Abdul Rachman yang terletak di desa Hurun dengan luas 22.249,31 ha. Daya tarik wisata lainnya adalah kawasan pantai yakni kawasan wisata pantai mutun, pantai sari ringgung dan pantai klara.

Ketiga area wisata pantai tersebut menjadi tujuan kunjungan wisata lokal/domestik dan luar daerah. Pemerintah Daerah telah melakukan sosialisasi dan kerjasama dalam penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata.

Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam penatakelolaan area wisata menuju industri pariwisata berbasis kearifan lokal dilakukan melalui program **One Village One Destination (satu desa satu destinasi wisata)**. Pemerintah Kabupaten Pesawaran berusaha mengembangkan desa-desa di Pesawaran untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Dari 148 desa di Pesawaran saat ini sudah 50 desa yang mengembangkan destinasi wisata, antara lain : Desa Sungai Langka Kecamatan Gedung Tataan terdapat agrowisata, Desa (Pekon) Ampai kecamatan Marga Punduh mengembangkan destinasi budaya rumah adat, desa Negeri Katon sebagai desa sulam tapis, Desa Muncak Kecamatan Teluk Pandan memiliki teropong laut dan mayoritas wisata bahari, Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai memiliki potensi wisata air terjun dan agrowisata dan destinasi lainnya.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus mendorong agar desa-desa di Kabupaten Pesawaran mempunyai keunggulan masing-masing, baik budaya, kerajinan, agrowisata, air terjun dan potensi lainnya yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata baru yang dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat di destinasi wisata tersebut.

Dari 50 desa yang telah memiliki destinasi wisata tersebut akan dipilih 16 desa yang berdaya saing dengan destinasi unggulannya. Dimana nantinya setelah terpilih 16 besar, dari ke 16 desa tersebut dalam skala even baik propinsi maupun nasional.

Melalui program *one village one destination* diharapkan dapat menyuguhkan daya tarik wisata sesuai potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Meskipun demikian, Pemerintah setempat tetap perlu membenahi fasilitas-fasilitas pendukung, antara lain ketersediaan toko-toko atau gerai-gerai penjual souvenir, fasilitas rumah makan bagi pengunjung, dan sarana pendukung lainnya.

b. Accessible

Strategi pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam memenuhi kebutuhan wisatawan mendapatkan kemudahan aksesibilitas (*accessible*) antara lain akan ditingkatkannya kualitas angkutan umum sejak tahun 2017-2021, pengembangan prasarana

telekomunikasi (pengembangan jaringan serat optik dan pengembangan jaringan mikro mempergunakan jaringan kabel bawah laut sepanjang tahun 2017-2021.

Strategi pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pengembangan pariwisata secara umum sudah baik (prasarana informasi dan sistem telekomunikasi telah tersedia) namun yang perlu dibenahi adalah prasarana transportasi, beberapa ruas jalan tanah yang masih menjadi kendala, juga terjadinya kemacetan apabila hari libur tiba. Tentunya hal ini masih menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Pesawaran khususnya, agar aksesibilitas objek-objek wisata di kawasan Kecamatan Teluk Pandan menjadi lebih baik lagi

c. Amenittis

Salah satu syarat daerah tujuan wisata (DTW) adalah fasilitas dari objek wisata, antara lain fasilitas penginapan, MCK, dan fasilitas parkir. Dalam hal fasilitas Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik antara lain, penginapan, tempat peristirahatan bagi wisatawan, sarana parkir yang luas dan representatif, restaurant, dan sarana MCK yang cukup memadai.

d. Ancillary(lembaga pengelola)

Data yang penulis dapatkan dari pihak Kecamatan Teluk Pandan mengenai strategi pemerintah dalam hal lembaga pengelola antara lain adalah melakukan program **kerjasama** antar lembaga. Lembaga pengelola yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah, pengelola objek wisata dan investor.

Berdasarkan data tersebut, strategi pemerrintah dalam hal lembaga pengelola di bedakan menjadi 2 indikator yaitu:

1. Program kerjasama antar lembaga pemerintahan dan lintas sektor, antara lain pengembanagn program pariwisata, penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengembalian kembali fungsi hutan lindung yang telah menurun kualitasnya, pengembangan taman hutan raya Wan Abdurrahman, pengembangan sarana promosi,

2. Program kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat antara lain pemberdayaan masyarakat disekitar objek wisata, pembentukan paket wisata bersama, pameran dan promosi bersama

Ketiga lembaga tersebut sudah bersinergi cukup baik dalam rangka mengembangkan obyek wisata yang berada di kawasan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Pihak pengelola tetap harus meningkatkan lagi promosi-promosi obyek wisata agar investor tertarik dan mau berkontribusi dalam mengembangkan kawasan wisata Teluk Pandan

Berdasarkan penjabaran di atas, strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam penatakelolaan industri pariwisata berbasis kearifan lokal yakni dengan dibentuknya KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) pariwisata Kecamatan Teluk Pandan yang bertujuan :

- i) Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan berkelanjutan
- ii) Penataan perencanaan pembangunan daerah yang terencana baik
- iii) Promosi potensi daerah
- iv) Mengoptimalkan kekayaan alam daerah
- v) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah
- vi) Menciptakan lapangan pekerjaan khususnya terhadap masyarakat daerah
- vii) Mendukung pembangunan daerah, provinsi dan nasional

Selain itu, pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Kecamatan Teluk Pandan juga melibatkan peran investor baik pihak swasta maupun pihak lainnya. Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan dapat menjadi objek wisata terintegrasi (*integrated area tourism*) antara wisata alam, wisata budaya hingga wisata MICE (*MICE and events tourism*). Sebagaimana diketahui, Kecamatan Teluk Pandan selama ini dikenal sebagai kawasan destinasi wisata bahari yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun yang berasal dari luar Provinsi Lampung.

BAB 12

PENUTUP

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam penatakelolaan area wisata menuju industri pariwisata berbasis kearifan lokal dilakukan melalui program **One Village One Destination (satu desa satu destinasi wisata)**. Pemerintah Kabupaten Pesawaran berusaha mengembangkan desa-desa di Pesawaran untuk dijadikan sebagai destinasi wisata. Dari 148 desa di Pesawaran saat ini sudah 50 desa yang mengembangkan destinasi wisata, antara lain : Desa Sungai Langka Kecamatan Gedung Tataan terdapat agrowisata, Desa (Pekon) Ampai kecamatan Marga Punduh mengembangkan destinasi budaya rumah adat, desa Negeri Katon sebagai desa sulam tapis, Desa Muncak Kecamatan Teluk Pandan memiliki teropong laut dan mayoritas wisata bahari, Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai memiliki potensi wisata air terjun dan agrowisata dan destinasi lainnya.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran terus mendorong agar desa-desa di Kabupaten Pesawaran mempunyai keunggulan masing-masing, baik budaya, kerajinan, agrowisata, air terjun dan potensi lainnya yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata baru yang dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat di destinasi wisata tersebut.

Dari 50 desa yang telah memiliki destinasi wisata tersebut akan dipilih 16 desa yang berdaya saing dengan destinasi unggulannya. Dimana nantinya setelah terpilih 16 besar, dari ke 16 desa tersebut dalam skala even baik propinsi maupun nasional. Melalui program *one village one destination* diharapkan dapat menyukseskan daya tarik wisata sesuai potensi yang dimiliki wilayah

tersebut. Meskipun demikian, Pemerintah setempat tetap perlu membenahi fasilitas-fasilitas pendukung, antara lain ketersediaan toko-toko atau gerai-gerai penjual suvenir, fasilitas rumah makan bagi pengunjung, dan sarana pendukung lainnya.

Penatakelolaan pariwisata Kabupaten Pesawaran menuju **industri pariwisata mandiri berbasis kearifan lokal**, dilakukan antara lain melalui gerakan Sadar Wisata, citra dan produk wisata, serta jalinan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral. Dengan demikian peran serta setiap unsur yang terkait dalam upaya pengembangan pariwisata untuk menciptakan mutu dan produk wisata mutlak diperlukan. Apabila salah satu mata rantai pariwisata mengecewakan penikmat wisata, bukan tidak mungkin berakibat rusaknya citra produk atau jasa yang telah diberikan secara keseluruhan.

Melalui program *one village one destination* diharapkan dapat menyuguhkan daya tarik wisata sesuai potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Meskipun demikian, Pemerintah setempat tetap perlu membenahi fasilitas-fasilitas pendukung, antara lain ketersediaan toko-toko atau gerai-gerai penjual suvenir, fasilitas rumah makan bagi pengunjung, dan sarana pendukung lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto. L. 2005. *Analisis Sosial Ekonomi Dalam Strategi Konservasi Sumber Daya Pesisir Dan Kelautan: Pendekatan Coastal Livelihood Analysis*. Makalah.

PKSPL. Bogor

Astuti, Marina.A. 2007 *Deskripsi Pembangunan Kawasan Pesisir Bandar Lampung*. Hasil Penelitian.

Bengen, D.G. 2002. *Sinopsis Ekosistem Dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut Serta Prinsip Pengelolaannya*.

PKSPL-IPB: Bogor

Catur, FX, Budi, R. 2007. *Studi Deskriptif Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Obyek Wisata Pantai (Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)*.

Hasil Penelitian. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Cicin, Sain and R.W Knecht. 1998. *Integrated Coastal and Marine Management*

Island Press: Washington, DC

Damanik, Janianton, dan Helmut F. Weber. 2006. *Perencanaan Ekowisata dari Teori ke Aplikasi*.

Yogyakarta: ANDI.

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah . 2014. *Arah Kebijakan Pengelolaan Kawasan Pesisir*. Jamasy, O. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*.

Jakarta: Belantika

Kagungan, Dian. 2009 *Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah pesisir di Kota Bandar Lampung*.

Hasil Penelitian. Universitas Lampung

Kagungan, Dian. 2018. Model Formulasi Kebijakan Penatakelolaan Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran Berbasis Integrated Coastal Zone Management. Hasil Penelitian.

Kagungan, Dian. 2018 *The Synergi among stakeholder to develop Pisang Island as marine tourism: The case of underdevelop area.*

Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik (MKP). Universitas Air Langga. Hasil penelitian

Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI)
Lakip Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran 2015-2020

Linberg, K and DE. Hawkins. 1995. Ekoturisme : Petunjuk Untuk Perencana dan Pengelola, The Ecotourism Society, North Bennington, Vermont

Malik, Ilham. B. 2008. *Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir Lampung*

Opini Radar Lampung, 28 November 2015

Moleong, Lexy, J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nurmasari. 2019. *Strategi Pengembangan Daerah Penyangga Pariwisata Berbasis Community Based Tourism.*

Hasil Penelitian. Universitas Lampung
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung 2012-2031
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung Tahun 2016

Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata.*

Yogyakarta: ANDI.

Sedarmayanti. 2005. *Membangun Kebudayaan dan Pariwisata.*

Bandung: Mandar Maju.

Sedarmayanti, 2014. *Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan Dan Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata).*

Bandung: Refika Adhitama

Sugandhy, Aca dan Rustam, H. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan PembangBerkelanjutan Berwawasan Lingkungan.*

Bumi Aksara: Jakarta

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Yoeti, Oka, A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata.* Bandung: Angkasa.

Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Ratnasari,,Yuni dan Kagungan. Dian. 2015. *Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Untuk Pengentasan Kemiskinan*

Berbasis Kearifan Lokal Melalui Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Teluk Kiluan.

Hasil Penelitian. Universitas Lampung

Putra, Aristoni. Rizki. 2019. *Analisis Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.*

Hasil Penelitian, Universitas Lampung

Winardi, J. 2003. *Enterpreneur dan Enterpreneurship.* Jakarta: Prenada Media.

Yoeti, Oka, A. 2008. *Ekonomi Pariwisata Introduksi, Informasi, dan Implementasi.* Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.

Yoeti, Oka, A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata.* Bandung: Angkasa.

Pemerintah Provinsi Lampung, 2014. *Atlas Sumberdaya Pesisir*
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. 1998. *Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir.* Laporan Akhir. Bogor.

Pemerintah Provinsi Lampung, PKSPL-IPB 1999. *Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi Lampung*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang *Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*

TENTANG PENULIS



Dra. Dian Kagungan, M.H menamatkan pendidikan S1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung (1992), Selanjutnya Magister Hukum di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung (2005), Aktif sebagai Dosen Tetap Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung. Aktif dalam kegiatan penelitian Nasional sejak tahun 2009 sampai sekarang (skim penelitian hibah bersaing, penelitian produk terapan, penelitian unggulan Perguruan Tinggi, penelitian Strategis Nasional maupun penelitian Strategis Nasional Institusi yang didanai oleh Direktorat Riset Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (DRPM-Kemristekdikti RI). Penelitian-penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kebijakan publik, hukum dan kebijakan publik serta pemberdayaan masyarakat lokal tidak terkecuali tema-tema yang berkaitan dengan kebijakan tatakelola pariwisata di Propinsi Lampung. Beberapa buku yang sudah diterbitkan sebelumnya, diantaranya : Manajemen Pembangunan, Administrasi Pertanahan, Kebijakan Hutan kemasyarakatan, Kebijakan Penatakelolaan Pariwisata Di Daerah Otonom Baru (buku referensi hasil penelitian tahun 2017 dan 2018). Selain kegiatan penelitian dan menulis, penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Curriculum Vitae Penulis

A. Identitas Diri Penulis

1	Nama Lengkap (gelar)	Dra. Dian Kagungan, M.H
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	-
4	NIP	19690851997032001
5	NIDN	0015086903
6	Tempat Tanggal Lahir	Tanjung Karang, 15 Agustus 1969
7	Alamat Rumah	Jl. Badak No. 16 Kedaton Bandar Lampung, 35147
8	No.Telp/Hp	0721-786522/081540918098
9	Alamat Kantor	Jl. Sumantri Brodjonegoro 1 Gedung Meneng Bandar Lampung
10	No. Telp/Fax	(0721) 701609,701888/701888
11	Alamat e-mail	diankagungan@gmail.com
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 100 orang S2= orang S3= orang
13	Mata Kuliah yang diampu	1.Manajemen Sumber Daya Aparatur Publik 2.Sistem Administrasi Negara Indonesia 3.Hukum Administrasi Negara 4.Pengantar Ilmu Hukum

B. Riwayat Pendidikan

Riwayat Pendidikan			
Program	S1	S2	S3
Nama PT	Univ. Lampung	Univ.Lampung	
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Hukum dan Kebijakan Publik	
Thn Masuk	1988	2002	
Thn Lulus	1992	2005	
Judul Skripsi Tesis Disertasi	Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Pembentukan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif	Struktur dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004	
Nama Pembimbing Skripsi dan Tesis	Drs. A. Kantan Abdullah Drs. Yana Ekana, PS	Prof. Dr.Sanusi Husin, S.H.M.H Adius Semenguk, S.H. M.S	

C. Pengalaman Penelitian 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan Sumber
1	2005	Penerapan Model <i>Collaborative Teamwork Learning</i> Pada Mata Kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Mahasiswa (Teaching Grant)	Pemerintah Provinsi Lampung
2	2009	Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir Berbasis <i>Integrated Coastal Zone Management</i> di Kota Bandar Lampung (Mewujudkan Pesisir Bandar Lampung Sebagai <i>Pilot Project</i> Penataan Wilayah Pesisir Indonesia Barat) tahap 1 (selesai)	Penelitian Hibah Strategis Nasional Batch II Unila, DP2M, DIKTI Jakarta (Ketua Peneliti)
3	2010	Model Formulasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Otonom Baru Melalui Pemberian Pelayanan Publik Yang Berwawasan <i>Good Government</i> dan <i>Clean Governance</i> (tahap 1)	Penelitian Hibah Strategis Nasional DP2M, DIKTI Jakarta (Ketua Peneliti)
4	2011	Model Formulasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Otonom Baru Melalui Pemberian Pelayanan Publik Yang Berwawasan <i>Good Government</i> dan <i>Clean Governance</i> (tahap 2 selesai)	Penelitian Hibah Strategis Nasional DP2M, DIKTI Jakarta (Ketua Peneliti)
5	2011	Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Government</i> dan <i>Clean Governance</i>) Di Daerah Otonom Baru (Studi di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung) Tahap I Selesai	Penelitian Hibah Bersaing DP2M, DIKTI Jakarta (Anggota Peneliti)
6	2013	MODEL TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI DAERAH OTONOM BARU: PARTISIPASI PUBLIK DALAM REKRUTMENT CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (tahap 1 selesai)	Penelitian Hibah Strategis Nasional DP2M, DIKTI Jakarta (Anggota Peneliti)
7	2013	Inovasi Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Bidang Pendidikan (<i>Stakeholder Analysis Program Bina Lingkungan</i>)	Dipa Fakultas ISIP Unila (Ketua)
8	2014	MODEL INNOVATIVE GOVERNMENT DAERAH OTONOM BARU: FORMULASI STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU BERBASIS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE	Penelitian Desentralisasi (hbh Bersaing) Dikti, Ketua Peneliti (tahap 1)
9	2015	MODEL INNOVATIVE GOVERNMENT DAERAH OTONOM BARU: FORMULASI STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU BERBASIS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	Penelitian Desentralisasi (hbh Bersaing) Dikti, Ketua Peneliti (tahap 2)

		DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE	
10	2016	MODEL KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI BIDANG KEPEGAWAIAN NEGARA : EVALUASI KEBIJAKAN SELEKSI SUMBER DAYA APARATUR BERBASIS COMPUTER ASSISTED TEST(CAT) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE	Ketua Peneliti Penelitian Produk Terapan (Hibah Bersaing) Tahap 1/Desentralisasi/Dikti Selesai
11	2017	Model Formulasi Kebijakan Penatakelolaan Wisata Desa Pesisir Berbasis Integrated Coastal Zone Management (Menjadikan Kabupaten Pesawaran Sebagai Kawasan Strategis Pusat Pariwisata Di Propinsi Lampung)	Ketua Peneliti Penelitian Produk Terapan Tahap 1 Kemenristekdikti Jakarta
12	2018	Model Formulasi Kebijakan Penatakelolaan Wisata Desa Pesisir Berbasis Integrated Coastal Zone Management (Menjadikan Kabupaten Pesawaran Sebagai Kawasan Strategis Pusat Pariwisata Di Propinsi Lampung)	Ketua Peneliti Penelitian Strategis Nasional Institusi Lanjutan Tahap 2 Kemenristekdikti, Jakarta
13	2019	Model Formulasi Kebijakan Penatakelolaan Wisata Desa Pesisir Berbasis Integrated Coastal Zone Management (Menjadikan Kabupaten Pesawaran Sebagai Kawasan Strategis Pusat Pariwisata Di Propinsi Lampung)	Ketua Peneliti Penelitian Terapan Tahap 3 Kemenristekdikti, Jakarta

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 5 tahun terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan Sumber
1	2007	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam perumusan Kebijakan Desa Melalui Adaptasi Model Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Masyarakat (PPDBM)	Dipa Unila
2	2008	Pelatihan Pengelolaan Dana Pembangunan Desa yang Berwawasan <i>Good Governance</i> bagi Aparatur Desa	Dipa Unila
3	2009	Pelatihan Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pekon Di Pekon Kuto Dalam Kabupaten Tanggamus	Jurusan Administrasi Negara Fisip Unila
4	2010	Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Upaya Mewujudkan <i>Good Government</i> dan <i>Clean Governance</i>) Di Desa Sidosari Kecamatan Natar	Dipa Unila
5	2010	Pelatihan Tentang Peningkatan Peran Aparat Pemerintah Desa Pada Era Otonomi Daerah (Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Perspektif <i>Good Governance</i>)	Jurusan Administrasi Negara
8	2011	Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Bagi Aparatur Desa Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan	Jurusan Administrasi Negara
9	2012	Pelatihan Kepemimpinan Pada Organisasi Siswa Intra Sekolah Madrasah Aliyah se Kabupaten Lampung Timur	Jurusan Adm Negara FISIP UNILA
9	2013	PENINGKATAN KAPASITAS BADANPERMUSYAWARATAN DESA MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERPERSPEKTIF GENDER (UPAYA PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PEDESAAN) DI KECAMATAN JATI AGUNG	Jurusan Administrasi Negara
10	2014	Pelatihan Pelayanan publik bagi Aparatur Pemerintah Kelurahan	Jurusan Adm Negara

11	2015	Peningkatan Kemampuan Technical Skill Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Natar	Jurusan Adm Negara
12	2016	Optimalisasi Kualitas Layanan Publik Bagi Layanan Administrasi Pemerintahan di Di Desa Hurun Kab Lam Sel	Jurusan Administrasi Negara, Anggota
13	2016	Peningkatan Kapasitas Penerima Program Bantuan Wirausaha di Lembaga CCC (children crisis center) Lampung Melalui Penggunaan Analisis SWOT untuk Menciptakan Usaha Strategis	Dipa Unila, Anggota
14	2017	Peningkatan Kapasitas Perempuan melalui Kelembagaan Kelompok Sadar wisata (pokdarwis) di Kecamatan Padang cermin	Jurusan Administrasi Negara
15	2018	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DAN PENGUATAN PERAN EKONOMI PEREMPUAN PESISIR DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS KEARIFAN LOKAL	Dipa BLU SENIOR UNILA
16	2019	PEMAMPUDAYAAN KELEMBAGAAN DESA DAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDAMPINGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM	Dipa BLU Senior Universitas Lampung

E.Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Vol/No
1	2008	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Model <i>Collaborative TeamWork Learning</i> Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pada Mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia	Jurnal Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 5 bulan Juli-Desember 2008	2/5
2	2009	Evaluasi Implementasi Program Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG Kecamatan Bekasi Timur	Jurnal Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 3 No. 6 bulan Januari-Juni 2009	3/5
3	2010	Model Formulasi Kebijakan Penataan Wilayah Pesisir Berbasis <i>Integrated Coastal Zone Management</i> di Kota Bandar Lampung (Mewujudkan Pesisir Bandar Lampung Sebagai <i>Pilot Project</i> Penataan Pesisir Indonesia Barat)	Jurnal Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 3 bulan Juli-Desember 2010	2/3
4	2011	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove (Studi Kasus di Kecamatan Padang Cermin	Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Vol 2 No. 32bulan Juli-Desember 2011 ISSN 2087-0825	2/2
5	2012	Studi Formulasi Kebijakan Penataan Sistem Transportasi Perkotaan Di Kota Bandar Lampung	Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dies Natalis Fisip Unila, ISBN 978-602-7509-47-4 hal 174-196 Desember 2012	
6	2012	Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung	Publica, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 2 No. 1 Maret 2012 Hlm.22-33 ISSN 2087-796X Penerbit Fisip Univ Bandar Lampung	2/1

7	2013	Reformasi Pelayanan Publik Di Daerah otonom Baru	Administratio Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan ISSN 2087-0825 Vol 4 no 1 Januari –Juni 2013	4/1
8	2016	POLICY IMPLEMENTATION ON CIVIL SERVANT RECRUITMENT BASED ON COMPUTER ASSISTED TEST IN LAMPUNG (THE STUDY ON THE RECRUITMENT OF CPNSD METRO IN 2014	<i>Proceeding Konferensi Internasional 1 st SHIELD UNILA</i>	2-3 November 2018
9	2016		<i>Proceeding ICVHE UI</i>	
10	2017	The Effect of Decentralization on Helath Services: The Experient of Pesawaran District, Lampung Province, Indonesia	<i>The Social Science Journal: 12 (11) 2164-2168, 2017</i> ISSN 1818- 5800 <i>Medwell Journal</i>	
11	2017	THE CAPACITY DEVELOPMENT POLICY FOR APARATUR THROUGH NEW GOVERNMENT PARTNERSHIP CORPORATION IN LAMPUNG TO OPTAIN OPTIMUM PUBLIC SERVICE	<i>Proceeding Konferensi Internasional 2 st SHIELD 18-20 SEPTEMBER 2017UNILA</i>	
12	2018	E- TOURISM GOVERNANCE POLICY FOR COASTAL VILLAGE INI PESAWARAN REGENCY	<i>Proseeding IICIS Lampung University. 2018</i>	
13	2017	Innovative Government Daerah Otonom Baru : Tatakelola Administrasi Pemerintahan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	<i>Social Science International Journal</i>	
14	2018	Communities Empowerment and Collaboration Between Stakeholders on Utylization of Community Forest as a Solution for Poverty Reduction and Reduce Intensity of Chopping of Protected Forest in Lampung Province	<i>Journal of Law, Policy and Globalization</i> Vol 78/2018	

15	2018	Strategi For Building Community -Reliance in Managing and Utylizing Community Forest Through The Policy of Community Forest Development	RJOS 7 (79) Juli 2018	
16	2018	KEBIJAKAN NEGARA DALAM BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN: STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN MANGROVE STUDI PADA MASYARAKAT PULAU PAHAWANG	<i>Publish pada Monograph : Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan Dan Perikanan</i> Aura publishing, 2018	
17	2019	<i>The Synergi Among Stakeholders to Develop Pisang Island as Marine Tourism : The Case Underlope Area</i>	<i>Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik (MKP) UNAIR -Surabaya</i>	Vol 1 No 32 Tahun 2019
18	2019	Inter Regional Cooperation Policy Through Determination Of Anti Corruption Integrity Zone For Achieving Good Governance Principles. <i>Journal of Law, Policy and Globalization.</i> ISSN ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online)	<i>Journal of Law, Policy and Globalization</i> ISSN ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online)2019 URL: http://URI: http://repository.lppm.u nila...	

**F. Pengalaman Penyampaian Makalah secara Ilmiah pada
Pertemuan Ilmiah 5 tahun terakhir**

No	Nama pertemuan ilmiah	Judul	Waktu	Tempat
1	ICSPI-UI (International Conference Social and Politic Issues	THE INNOVATIVE GOVERNMENT FOR NEW AUTONOM REGION: STRATEGY FORMULATION FOR THE DEVELOPMENT ACCELERATION OF NEW AUTONOM REGION BASED ON INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING AND EMPOWERMENT OF LOCAL COMMUNITY FOR CREATING GOOD GOVERNANCE	18-19 Oktober 2016	Bali
2	HIPIIS -Unsri Palembang	POVERTY SOLVING POLICY THROUGH OPTIMIZING POLICY ABOUT THE DEVELOPMENT AREA OF WISATA BAHARI BASED ON LOCAL WISDOM AND CAPACITY BUILDING INSTITUTION IN ORDER TO MAINTAIN COMMUNITY WELFARE	27-28 Oktober 2016	Unsri, Palembang
3	SHIELD-UNILA	POLICY IMPLEMENTATION ON CIVIL SERVANT RECRUITMENT BASED ON COMPUTER ASSISTED TEST IN	9 November 2016	Unila

		LAMPUNG (THE STUDY ON THE RECRUITMENT OF CPNSD METRO IN 2014		
4	ICVHE- UI	COMMUNITY DEVELOPMENT MODEL WITH COMMUNITY BEST FOREST WITH MANAGEMENT THROUGH THE SETTING OF MANAGEMENT FOREST RIGHT IN TANGGAMUS, LAMPUNG PROVINCE	9 November 2016	UI, Depok
5.	2rd SHIELD CONFERENCE LAMPUNG UNIVERSITY	THE CAPACITY DEVELOPMENT POLICY FOR APARATUR THROUGH NEW GOVERNMENT PARTNERSHIP CORPORATION IN LAMPUNG TO OBTAIN OPTIMUM PUBLIC SERVICE	18-20 SEPTEMBER 2017	BANDAR LAMPUNG
6	IICIS lampung university	E- TOURISM GOVERNANCE POLICY FOR COASTAL VILLAGE INI PESAWARAN REGENCY	10 SEPTEMBER 2018	Bandar Lampung
7.	Ico CSPA UNAIR SURABAYA	FREE INTERNET PROGRAM FOR PUBLIC LITERACY DEVELOPMENT in North Lampung	12 AGUSTUS 2018	UNAIR SURABAYA

G. Pengalaman Penulisan Buku 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	Manajemen Sumber Daya Manusia	2017	150	Aura Publishing isbn
2.	Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Daerah Otonom Baru (BUKU REFERENSI)	2017	150	Aura Publishing isbn
3	Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (BUKU REFERENSI)	2017	150	Aura Publishing isbn
4	Administrasi Pertanahan(buku ajar)	2019	247	Pusaka Media isbn
5	Manajemen Pembangunan (buku ajar)	2019	125	Pusaka Media isbn
6	KEBIJAKAN PENATAKELOLAAN PARIWISATA KABUPATEN PESAWARAN: STRATEGI PENATAKELOLAAN PARIWISATA KABUPATEN PESAWARAN MENUJU INDUSTRI PARIWISATA MANDIRI BERBASIS KEARIFAN LOKAL "ONE VILLAGE ONE DESTINATION"(buku ajar)	2019	115	Aura Publishing isbn
7	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TELUK KILUAN:(PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BAHARI TELUK KILUAN)	2019	130	GRAHA ILMU

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Kebijakan Penatakelolaan Pariwisata Di Daerah Otonom Baru	2018, 5 Desember	Buku	000126918
2.	Kebijakan Hutan Kemasyarakatan	2018,5	Buku	000126819

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 5 tahun terakhir

No	Judul /Tema Rekayasa Sosial	Tahun	Tempat penerapan	Respon Masyarakat
1.				

J. Penghargaan yang diraih 10 tahun terakhir

No	Jenis penghargaan	Institusi pemberi	Tahun
1.			

INDEKS

A

Attractiveness, 109

Awareness, 109

C

Community, 2, 3, 42, 43, 54, 55, 95, 103,
104, 149, 150

H

Hospitality Law, 1, 6, 21, 40, 65, 81, 86

L

Law, 1, 6, 21, 40, 65, 81, 86, 127, 149,
150

N

Networking, 78, 80

O

One village one destination, 158

S

Stakeholder, 144

Strategic vision, 128

W

Water front City, 158